



**STRATEGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA TERHADAP PETANI
DAN PENGARUHNYA DI JAWA TIMUR
(1953 – 1965)**



AHMAD FATHUL BARI

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
2008**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari Senin, 28 Juli 2008 pukul 10.00 WIB.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Suharto

Pembaca II/ Penguji

Agus Setiawan, S.S, M.Si

Pembimbing I/ Panitera

Dr. Saleh A. Djamhari

Pembimbing II

Dr. Muhammad Iskandar

Disahkan pada hari.....tanggal.....2008, oleh:

Kepala Program Studi Ilmu Sejarah FIB-UI

Dekan

Dr. Muhammad Iskandar

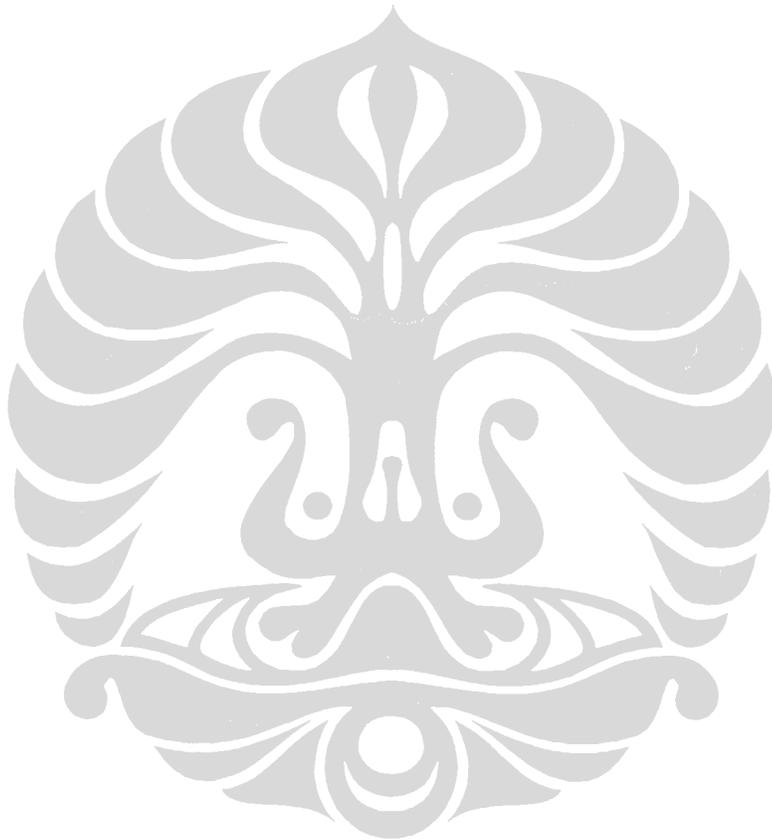
Dr. Bambang Wibawarta

LEMBAR PERNYATAAN

Seluruh isi skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Depok, 28 Juli 2008

Ahmad Fathul Bari
NPM. 0702040044



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hamba kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi di tengah berbagai realitas anak bangsa yang tidak dapat merasakan kesempatan tersebut. Shalawat dan salam terlantun untuk *Rasulullah* Muhammad SAW, seorang “Sejarawan Termasyhur” di muka bumi, yang bukan hanya mempelajari sejarah sebagai inspirasi kehidupan, tetapi telah membuat dan mengubah sejarah kehidupan *minazhzhulumaati ‘ilannur*. *Alhamdulillah* saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Partai Komunis Indonesia terhadap Petani dan Pengaruhnya di Jawa Timur 1953 – 1965”.

Dengan ini, saya menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Saleh A. Djamhari dan Dr. Mohammad Iskandar sebagai pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, kritik serta semangat yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Suharto dan Agus Setiawan, S.S, M.Si selaku Ketua Sidang dan Pembaca/ Penguji.
3. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Ilmu Sejarah FIB-UI yang telah membagi ilmunya serta meluangkan waktunya selama enam tahun masa studi saya.
4. Bapak saya tercinta, H.Achmad Munadi yang telah meninggal dunia di tahun 2003. Terima kasih kuucapkan kepadanya yang telah memberikan kesempatan bagiku untuk mengucapkan salam perpisahan di akhir hayatnya dengan meminta diriku untuk pulang dari kampus sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga Allah melapangkan kuburnya dan kembali mempertemukan kita di *jannah*-Nya.

5. Ibu tercinta, Hj.Tuti Suryati, yang telah banyak mengorbankan hidupnya bagi anak-anak dan keluarganya, terutama setelah Bapak pensiun sebagai Lurah. Begitu banyak pengorbanan beliau untuk menyambung hidup anak dan keluarga. Do'akan aku Ibu agar dapat membalas semua pengorbanan tersebut dengan berbagai amal shalih. Semoga Allah mempertemukan kita di surga.
6. Semua kakak tercinta. Balyanur, Tadjuddin Nur, Malkan Nur, Alfiyah, Fauzi Nur, Saukani Nur, Achmad Badawi, serta Udin dan Nur di Bandung. Semoga Allah mempertemukan keluarga besar kita di surga.
7. Seluruh teman-teman Sejarah Angkatan 2002, terutama Agus dan Deccy. Sungguh, hati ini masih sakit mendengar keputusan berat itu. Semoga ada jalan terbaik untuk kalian. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Babay. Bagi yang membaca skripsi ini, tolong segera diperiksa *cover* skripsi ini. Saya khawatir nama yang tercantum di depan adalah Nurbaity. Hehehe.... Terima kasih banyak ya Bay. Kebaikan itu tidak akan kulupakan seumur hidup. Terima kasih kepada Cholik dan Ferdi yang sudah mau membantu penyelesaian skripsi saya. Terima kasih kepada saudaraku Arya “Pribadi Unggul” Maulana. Terima kasih kepada tujuh diantara “Delapan Pejuang *deadliner*”: Agus, Deccy, Aria Pambudi, Arya Maulana, Ferdi, Priya, dan Widi. Seharusnya kita buat prasasti nih.. Terima kasih *especially* kepada Ibu Uchie dan Bapak Frank. Dua orang yang memberikan warna bagiku dalam perjalanan organisasi. Terakhir, terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2002 yang lain, yang belum disebutkan satu persatu. Kalau udah tua, kita reuni ya... ^_^
8. Teman-teman Forum Amal dan Studi Islam (FORMASI) FIB-UI. FORMASI bak “kawah candradimuka” bagiku... Terima kasih kepada Mustofa '98, Haryo '00, Wiji '01, Aulia '02, dan teman-teman lainnya...
9. Teman-teman Senat Mahasiswa FIB Periode 2005 yang selalu “Memahami Anda Apa Adanya”. Terima kasih untuk semua BPH yang mau dipimpin orang *faqir* seperti saya. Wirawan, Arie Fachrizal, Mas Ivan, Zainal, Jerry,

Yudi, Iqbal, Gita, Iwied, Manda, Ani, Rian, Haura, Marni, Azizah, Alia, dan Mey2. Terima kasih banyak kepada seluruh pengurus SM FIB 2005. Sungguh, perjuangan delapan bulan yang akan selalu dikenang sepanjang masa... ^_^ Mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika FIB-UI atas berbagai kekhilafan dan keterbatasan saya dalam memimpin SM FIB-UI 2005. Legenda Pemilihan Raya (Pemira) 2005 FIB-UI tidak akan pernah kulupakan...

10. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) periode 2006/2007. Terima kasih untuk semua BPH yang mau dipimpin orang *faqir* seperti saya. Habibi, Fauzan, Aji, Khemal, Yusuf, Eka, Arif, Rimas, Tian, Andika, Miske, Kaukabus, Shima, Manda, Kiki, Lintang, Arieska, Devi, dan Sari. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus BEM UI 2006/2007. Sungguh sebuah pengalaman berharga bagi saya mencapai posisi “puncak” di kampus besar ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika UI atas berbagai kekhilafan dan keterbatasan saya dalam memimpin BEM UI 2006/2007.
11. Terima kasih kepada teman-teman yang sangat membantu penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Isye dan Manda yang telah meminjamkan laptop. Terima kasih kepada Isye dan Lela yang telah meminjamkan printer. Terima kasih kepada Lintang dan temannya di LIPI yang telah membuatkan peta, table, dan grafik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah banyak membantu meringankan beban saya ketika penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Mas Ivan (Arab'03) selaku Guru Besar Ilmu Manajemen Patah Hati FIB UI. Hehehe... Tenang Mas, masih banyak penjurur bumi lainnya... ^_^
13. Terima kasih untuk semuanya... (Maaf gak disebutkan semua karena khawatir halamannya melebihi isi skripsi). ^_^

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan.
Semoga Allah SWT mempertemukan kita di-jannah nya...

***Barang siapa menghendaki kemerdekaan
untuk umat, maka ia harus siap
kehilangan kemerdekaan dirinya...***



Depok, 29 Juli 2008

(Al-Faqir)

Ahmad Fathul Bari

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
IKHTISAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	11
1.4. Tujuan Penelitian	12
1.5. Metode Penelitian	13
1.6. Sumber Sejarah	14
1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONDISI MASYARAKAT PETANI JAWA TIMUR	17
2.1. PKI Membuka Isolasi	17
2.2. Kondisi Sosial Masyarakat Jawa Timur	23
2.3. Keadaan Petani dan Konstelasi Politik di Jawa Timur	26
BAB III MEMBANGUN BASIS DUKUNGAN MASSA PETANI	36
3.1. Program Agraria PKI Hasil Kongres Nasional ke-V	36
3.2. Konsolidasi PKI terhadap Golongan Abangan	42
3.3. Pembentukan Organisasi <i>Onderbouw</i> PKI	48
3.4. Pemilu 1955 dan 1957/1958	51

BAB IV PETANI SEBAGAI ALAT POLITIK PKI	62
4.1. Krisis Politik Pasca Pemilu 1955	62
4.2. Demokrasi Terpimpin dan Kaum Tani	65
4.3. Program Tuntutan Minimum PKI Hasil Kongres Nasional ke-VI	69
4.4. Pembentukan Front Nasional	72
4.5. <i>Landreform</i> dan Aksi Sepihak	76
4.6. Aksi Ofensif Revolusioner	88
BAB V KESIMPULAN	92
BIBLIOGRAFI	99
LAMPIRAN	108



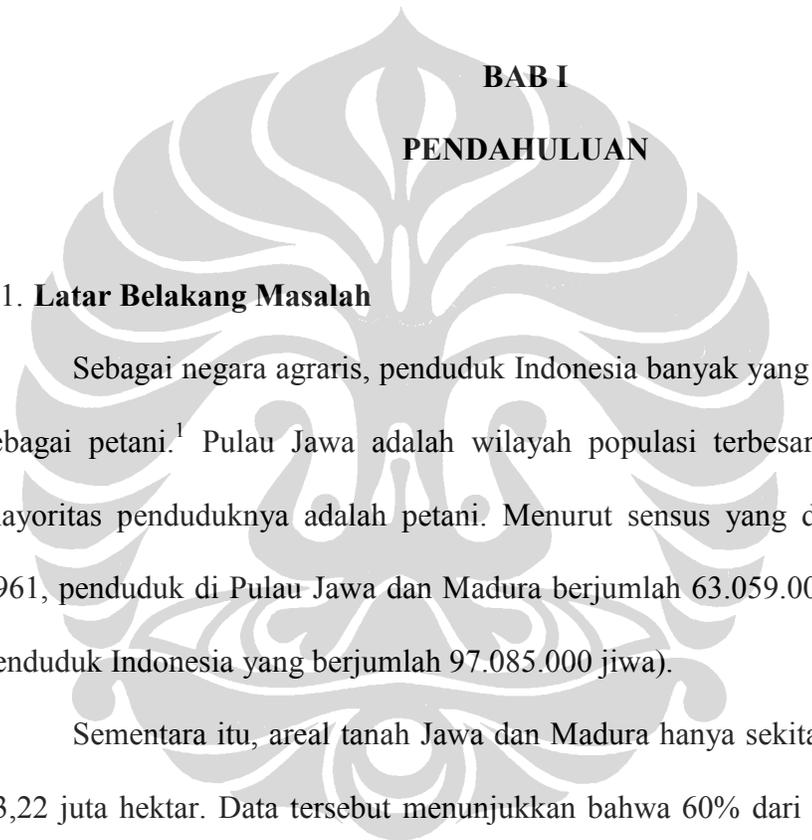
IKHTISAR

AHMAD FATHUL BARI (0702040044). Strategi PKI Terhadap Kaum Petani dan Pengaruhnya di Jawa Timur 1953 – 1965. (Di bawah bimbingan Dr. Saleh A. Djamhari dan Dr. Mohammad Iskandar). Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2008.

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Pulau Jawa adalah wilayah Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Permasalahan utama petani di Indonesia adalah mengenai kepemilikan tanah. Satu hal yang menjadi permasalahan umum yakni polarisasi komposisi penggunaan tanah serta hak-hak yang berbeda sesuai ketentuan yang ada antara tuan tanah dengan buruh tani maupun antara kaum kolonial dengan masyarakat tani. Masalah pertanahan dan petani inilah kemudian diangkat oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai isu yang penting dan dijadikan sebagai strategi perjuangannya untuk mencapai revolusi sosial berdasarkan ajaran marxisme. PKI mengikutsertakan masyarakat pedesaan terutama petani sebagai penyokong gerakan politik yang dilakukannya. Maklumat tanggal 3 November 1945 menyatakan bahwa pemerintah memberikan izin berdirinya partai-partai politik. Setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, partai-partai berusaha menjadikan pedesaan sebagai basis.

Menjelang Pemilu, arahan isu yang berkembang, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur berkisar pada pemisahan tradisional masyarakat antara golongan priyayi, santri, dan abangan. Usaha yang dilakukan PKI dalam memenangkan pemilu adalah melakukan konsolidasi PKI terhadap golongan abangan. Langkah yang dilakukan PKI dalam mencari dukungan massa adalah dengan mengenali berbagai aspek kehidupan petani dalam hubungannya dengan masalah agraria. Untuk tujuan itu, PKI membentuk organisasi *onderbouw* seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Indonesia (SAKTI), dan sebagainya.

Pada Pemilu DPR 1955, PKI menjadi tiga besar di bawah NU dan PNI. Kemenangan itu memberikan gambaran bahwa daerah pedesaan Jawa Timur merupakan salah satu basis PKI terkuat dan potensial. Ketidakstabilan kabinet dalam kerangka demokrasi parlementer pada masa itu membantu PKI dalam menanjak ke puncak kekuasaan. Berkat kemenangan dalam Pemilu 1955 dan 1957, PKI menjadi salah satu kekuatan sosial politik terbesar. Kemenangan PKI tersebut menjadikan perjuangan dalam mewujudkan revolusi sosial yang direalisasikan dalam revolusi agraria ke dalam garis kebijakan landreform. PKI mengajukan “Program Tuntutan” atau yang juga sering disebut sebagai “Tuntutan Minimum” atau program tuntutan yang dianggap paling mendesak untuk segera dilakukan. Dalam kenyataannya, pelaksanaan landreform yang diinginkan PKI tidak dapat berjalan dengan baik sehingga PKI menjalankan aksi sepihak sebagai bukti kekecewaannya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

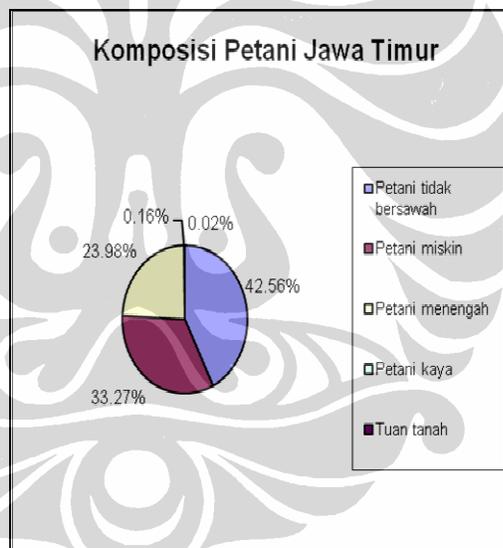
Sebagai negara agraris, penduduk Indonesia banyak yang bermatapencaharian sebagai petani.¹ Pulau Jawa adalah wilayah populasi terbesar di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah petani. Menurut sensus yang dilakukan BPS pada 1961, penduduk di Pulau Jawa dan Madura berjumlah 63.059.000 jiwa (dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 97.085.000 jiwa).

Sementara itu, areal tanah Jawa dan Madura hanya sekitar 132.174 km² atau 13,22 juta hektar. Data tersebut menunjukkan bahwa 60% dari penduduk Indonesia bermukim di wilayah yang hanya 7% dari luas wilayah Indonesia (1.904.350 km²).² Khusus mengenai kondisi petani di Jawa Timur, data yang dihimpun oleh Aminuddin

¹ Menurut Justus M. van der Kroef, klasifikasi sosial petani menurut keadaan pertanian di Jawa dapat dibedakan menjadi beberapa kelas sosial, yakni Petani Kaya, Petani Sedang, Petani Miskin, dan Buruh Tani. Justus M. van der Kroef dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Gramedia, 1984, hlm. 162 – 163.

² Berdasarkan data BPS yang dikutip oleh Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001, hlm.44 – 45.

Kasdi dari berbagai sumber menyatakan bahwa seluruh petani di pedesaan Jawa Timur berjumlah sekitar 19.645.218 jiwa (kira-kira 2.806.460 kepala keluarga), 8.363.283 jiwa (1.194.755 KK) atau 42,56% merupakan lapisan masyarakat tidak bertanah (sawah). Sementara itu, sisanya yang berjumlah 11.281.935 (1.611.705 KK) atau 57,44% merupakan lapisan masyarakat yang memiliki tanah (sawah). Mereka terdiri dari lapisan petani miskin (33,27%), petani sedang (23,98%), petani kaya (0,16%), dan tuan tanah (0,02%).³



Perkembangan gerakan komunis di Indonesia dimulai sejak kehadiran Hendricus Fransiscus Sneevliet pada tahun 1913 di Semarang dan membentuk

³ Dihimpun oleh Aminuddin Kasdi dari *Sensus Penduduk 1961*, *Sensus Pertanian 1963*, dan E Utrecht, "Landreform", *BIES*, (ANU Press: 1969) Vol. V, No. 3, hlm. 76. *Ibid.*, Dalam Aminuddin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah*, *ibid.*, hlm. 50 – 51.

Indische Sosial Democratische Vereeniging (ISDV) pada tahun 1914⁴. Pada awal-awal gerakannya, dia mencoba mempengaruhi dan menggerakkan Serikat Buruh Kereta Api dan Kereta Listrik (VSTP) menjadi organisasi yang berhaluan sosial dan bersikap radikal. Di sisi lain, pada periode yang sama juga terbentuk Serikat Islam pada 1912. Sneevliet juga mencoba melakukan infiltrasi ke dalam tubuh Serikat Islam (SI) yang pada masa pergerakan nasional Serikat Islam berkembang menjadi organisasi yang cukup penting dengan memiliki anggota yang cukup besar dan mencakup banyak wilayah. Hingga pada akhirnya, terbentuk Serikat Islam Merah oleh pada 1923 karena perpecahan di tubuh SI yang dipengaruhi oleh kaum komunis.⁵ Selanjutnya, SI Merah berubah nama menjadi Serikat Rakyat.⁶ Setelah terbentuknya Serikat Rakyat, kaum komunis juga berusaha bergerak di kalangan petani.⁷ Hal itu didasarkan kepada keputusan konferensi Kota Gede (Yogyakarta) pada Desember 1923 yang menghendaki agar Serikat Rakyat dipergunakan untuk melakukan hal tersebut.⁸

⁴ Mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan komunis di Indonesia bisa dibaca selengkapnya dalam Arnold C Brackman, *Indonesian Communism*, New York: Frederick A, Praeger, 1963, hlm. 4 – 8.

⁵ Sebelumnya, ISDV mengalami pergantian nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia-Belanda pada tanggal 23 Mei 1920. Kemudian atas usul Moskow, nama Perserikatan diubah menjadi Partai. Dalam pertemuan tanggal 23 Mei itu juga memilih Semaun sebagai Ketua dan Darsono sebagai Wakil Ketua. *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁷ Pada perkembangan awal, kaum komunis di Indonesia lebih bertumpu kepada pemikiran-pemikiran Marx dan Lenin yang lebih menekankan inti pergerakan kepada kaum buruh.

⁸ H. J. Benda dan Ruth Mc Vey (ed): *The Communist Uprising of 1926 – 1927 in Indonesia; Key Document*, Ithaca, New York: Cornell University, 1960, hlm. 124. Hal itu dilakukan karena gerakan protes terhadap pemerintah kolonial yang dilakukan serikat-serikat buruh yang disponsorori oleh PKI dianggap lebih membahayakan oleh pemerintah kolonial dibandingkan gerakan yang digalang oleh Serikat Islam. John Ingleson, *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Serikat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2004, hlm. 52 – 54. Selain itu, pemimpin PKI

Pada tanggal 22 – 25 November 1945 digelar Kongres Petani di Yogyakarta, setelah sebelumnya dilakukan pertemuan kaum buruh dan tani pada tanggal 5-7 November 1945 di Surakarta.⁹ Kongres Petani di Yogyakarta menghasilkan suatu keputusan untuk membentuk suatu organisasi petani yang dinamakan Barisan Tani Indonesia (BTI).¹⁰ Pada masa awal pembentukannya, BTI banyak mengangkat isu antikolonialisme. Dengan isu tersebut, BTI dapat merangkul berbagai kalangan dengan latar belakang ideologis apapun. Namun, pasang surut perkembangannya mengarah pada radikalisme karena semakin dominannya pimpinan BTI yang menganut ajaran Marxisme.¹¹

Memfokuskan konsolidasi gerakan kepada kaum petani memang bukan hal baru bagi PKI. Salah satu gambaran bahwa PKI menjadikan petani sebagai elemen penting dapat dilihat dari AD/ART PKI hasil Kongres ke-IV bulan Januari 1947. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, PKI berusaha mencapai tujuannya dengan

menganggap bahwa gerakan dengan menggunakan serikat-serikat buruh sebagai kendaraan politik memiliki beberapa kelemahan terutama mengenai karakter buruh sebagai masyarakat yang dapat langsung berhubungan dengan pengaruh luar sehingga dapat membuat kegoncangan. Alasan utama lainnya adalah perbedaan kesadaran sosial dan politik antara kaum buruh di Eropa dengan di Indonesia.

⁹ Dinamika politik Indonesia pascakemerdekaan, membuka ruang gerak bagi partai politik. Hal tersebut dilegalkan oleh sebuah maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Hatta pada 3 November 1945. Lihat Kementerian Penerangan RI, *Kepartaian di Indonesia*, Jogjakarta, 1950, hlm. 3. Semangat mengisi kemerdekaan yang diusung pemerintahan baru Soekarno-Hatta untuk membuka kesempatan luas berorganisasi juga menggulirkan upaya-upaya pembangunan organisasi massa petani. Ruang gerak partisipasi politik bagi organisasi massa juga disambut dengan partisipasi kaum petani untuk mewujudkan perbaikan yang dicita-citakannya.

¹⁰ Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress, 1999, hlm. 131.

¹¹ Akibat dominasi tersebut, pada 1947, pemimpin yang berlatar ideologi Islam meninggalkan BTI dan menggabungkan diri dalam suatu organisasi tani yang disponsori oleh Partai Masyumi, yakni STII (Serikat Tani Islam Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1946.

jalan perjuangan kelas yang revolusioner termasuk petani.¹² Selain itu, salah satu poin urgensi program PKI dinyatakan bahwa salah satu pembangunan ekonomi yang tidak bersifat kolonial dijalankan dengan memberikan tanah untuk petani melarat dan petani sedang serta mendesak untuk membuat Undang-Undang Agraria yang baru.¹³

Organisasi massa petani, selain menjadi wadah perjuangan kaum petani juga digunakan oleh partai politik sebagai kendaraan guna mendapatkan dukungan massa petani.¹⁴ Partai Komunis Indonesia (PKI) juga tidak melepaskan masyarakat pedesaan terutama petani sebagai penyokong gerakan politik yang dilakukannya. Pada tahun 1950-an, PKI melakukan serangkaian perubahan strategi partai. Perubahan strategi PKI mulai dilakukan pada 1951 ketika partai itu dipimpin oleh DN. Aidit. Keluar dari pemahaman lazim terhadap marxisme yang selama ini dibuat tabu, Aidit bahkan berani mengatakan bahwa Marxisme bukanlah doktrin yang kaku. Rakyat Indonesia bisa membuat berbagai langkah baru dengan tetap menjadikan marxisme sebagai pedoman. PKI di bawah kepemimpinan Aidit mulai melakukan komunikasi politik dengan golongan lain. Selain itu, PKI juga mulai "turun" ke masyarakat pedesaan yang selama ini jarang dilakukan. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI menempuh jalur damai yang sering disebut "strategi kanan". Aksi-aksi sosial kemasyarakatan juga dilakukan untuk melirik kaum buruh dan tani sebagai basis gerakannya.

¹² Kementerian Penerangan RI, 1951, *op.cit.*, hlm.281.

¹³ *Ibid.*, hlm. 293.

¹⁴ Selain STII, organisasi petani lainnya yang berada di bawah naungan partai politik antara lain adalah Petani (Persatuan Tani Nasional Indonesia) di bawah PNI, Pertanu (Persatuan Tani Nahdhatul Ulama) di bawah NU, dan RTI (Rukun Tani Indonesia) di bawah PKI.

PKI dengan giat berupaya untuk melaksanakan program reformasi agraria (*Agricultural Reform*) secara menyeluruh walaupun realitas di lapangan menunjukkan bahwa PKI hanya memakai cara yang tidak konseptual dengan hanya membagikan tanah yang telah mereka rampas dari para petani kaya.¹⁵ Salah satu poin lainnya yang penting untuk dicatat mengenai lemahnya cara yang ditempuh PKI dalam menggalang massa kaum petani di Indonesia adalah pengalaman yang sedikit dalam bekerja di daerah pedesaan.¹⁶

Perubahan fokus inti gerakan kepada kaum petani yang dilakukan oleh Aidit pada mulanya diawali dengan perubahan orientasi internasional PKI yang setelah tahun 50-an mulai terlihat cenderung berorientasi kepada Cina.¹⁷ Cina dianggap sebagai contoh terbaik bagi sosialisme di Asia karena lebih menekankan inti gerakan revolusioner kepada kaum petani dibandingkan dengan Uni Soviet yang lebih menitikberatkan kaum buruh sebagai pilar revolusi. Selain dianggap sebagai revisionis ideologi marxis di Asia Tenggara, wilayah Cina yang lebih dekat secara geografis juga menjadi salah satu alasan Aidit. Dengan berbagai alasan tersebut, Aidit menganggap Cina sebagai "tetangga besar kita".¹⁸ Model gerakan komunis yang

¹⁵ Anthony Reid, *Revolusi Nasional Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996, hlm. 248.

¹⁶ Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia (1951-1963)*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966, hlm. 75.

¹⁷ Di luar orientasi internasional PKI, hubungan antara komunis Uni Soviet dan Cina mengalami perselisihan yang terutama dikarenakan oleh pertentangan tentang perbatasan antar kedua negara tersebut. Hal itu juga berpengaruh kepada orientasi patronase PKI terhadap kedua negara komunis itu. Akan tetapi, PKI (yang masih menghormati dua negara komunis terbesar di dunia itu) menjadi lebih bebas menentukan kebijaksanaannya sendiri karena pertentangan yang terjadi membuat kontrol komunis internasional terhadap partai-partai komunis lokal semakin lemah. Dan pada perkembangannya, PKI tetap menjadikan Uni Soviet dan Cina sebagai rujukan gerakan mereka.

¹⁸ Brackman, *Op.Cit.*, hlm. 203.

menjadikan petani sebagai inti gerakan revolusioner pada awalnya dikembangkan oleh Mao Ze Dong yang terinspirasi oleh pemikiran tokoh awal marxis di Cina yang bernama Li Dazhao.¹⁹ Dengan bekal pengalaman melihat kegagalan gerakan Partai Komunis Cina (PKC) seperti serangkaian gerakan buruh kereta api pada 1924 serta kegagalan Front Persatuan I yang dibentuk PKC dan Partai Nasionalis Cina pada 1927 untuk menumpas kekuatan *Warlord*²⁰, Mao makin yakin bahwa pendirian para tokoh PKC yang tidak membumi dan tidak sesuai dengan kondisi di Cina dengan masih bertumpu pada kekuatan kota adalah keliru karena 90% rakyat Cina hidup dari dan untuk pertanian di pedesaan.²¹

Lebih mendekati diri kepada kaum petani merupakan salah satu langkah politik untuk menggalang suara PKI menjelang Pemilu 1955. Dalam hal ini, PKI juga berupaya membangun basis dukungan partai secara lebih luas ke masyarakat pedesaan. Pada tahun 1953, Aidit mendesak kader partai untuk lebih

¹⁹ Li Dazhao (1888 – 1927), adalah orang pertama di Cina yang memproklamkan dirinya secara terbuka sebagai seorang Marxis sepulangnya ia dari studi di Universitas Waseda, Jepang pada tahun 1916. Ia memiliki pandangan lain atas penerapan Marxisme di Cina. Keluar dari doktrin marxisme klasik yang terlalu kaku mempercayai bahwa kelas buruh adalah inti gerakan komunis, Li Dazhao menyesuaikan kondisi sosial kultural di Cina yang mayoritas masyarakatnya adalah petani. Mao Ze Dong adalah salah seorang muridnya yang baru datang ke Beijing dan bergabung dengannya. Kedekatan Mao dengan Li Dazhao berlanjut ketika Li diangkat menjadi Kepala Perpustakaan Universitas Beijing sementara Mao menjadi asistennya. Sejak saat itu, Mao banyak berguru dan terpengaruh oleh pemikiran Li, terutama tentang konsep yang menekankan petani sebagai tiang utama revolusi sosialis. Setelah Li Dazhao meninggal dunia, Mao mengembangkan pemikiran Li Dazhao dengan berbagai artikel yang ditulisnya serta gerakan yang dilakukannya. Priyanto Wibowo, *Mao dan Perubahan Sosial di Pedesaan Cina 1949 – 1959: Kebijakan-kebijakan untuk Menuju Masyarakat Baru*, Depok: Disertasi FIB-UI, 2006, hlm. 2 – 5.

²⁰ Warlord adalah sisa-sisa kekuatan pimpinan militer beserta pasukannya yang tidak terakomodasi dalam pemerintahan Republik Cina.

²¹ *Ibid.*, hlm. 6. Setelah melakukan otokritik terhadap gerakan PKC serta dengan melakukan berbagai kajian mendalam terkait hal tersebut, Mao berhasil melakukan mendirikan Republik Soviet Cina di daerah Ruijin, propinsi Jiangxi, Cina pada tahun 1931. Republik Soviet Cina yang dibentuknya menjadi tonggak bersejarah bagi perjuangan komunis Cina yang berbasis petani dan pada akhirnya mengantarkan Mao sebagai orang nomor satu di PKC dan Cina. *Ibid.*, hlm. 8.

mengoptimalkan usahanya untuk mendapatkan dukungan kaum tani dengan mencetuskan semboyan "Tanah untuk Kaum Tani". Pernyataan Aidit mendapat respon di seluruh Indonesia. Rencana Aidit itupun menandai perubahan garis strategi PKI ketika diadakannya Kongres Nasional V PKI pada bulan Maret 1954 yang mengubah fokus utama partai dari buruh kepada petani. Hal itu dilakukan karena menyadari bahwa revolusi agraria adalah inti revolusi demokratik rakyat di Indonesia.²²

Setelah kongres tersebut, PKI sangat aktif melakukan berbagai aksi untuk membangun basis massa di pedesaan yang difokuskan kepada kaum petani. Seperti yang telah disinggung di awal bahwa masyarakat pedesaan yang mayoritas petani berada di Pulau Jawa terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apabila kita melihat data hasil Pemilu DPR 1955 dan Pemilu DPRD 1957/ 1958 di Jawa Timur, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu parameter perkembangan PKI.

Pada Pemilu DPR 1955 di Jawa Timur, PKI menjadi tiga besar di bawah NU dan PNI dengan perolehan suara sebanyak 2.299.599. Bahkan pada Pemilu DPRD, PKI berhasil menjadi dua besar dengan perolehan suara sebesar 2.704.523. Sedangkan NU yang pada Pemilu sebelumnya menjadi partai dengan perolehan suara terbesar dengan 3.370.554 suara yang diperolehnya justru mengalami penurunan

²² Karl Pelzer, *Sengketa Agraria: pengusaha perkebunan melawan petani*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 55.

perolehan suara dengan hanya mendapatkan 2.999.785 suara walaupun tetap menjadi yang terbesar.²³

Langkah yang diambil PKI untuk lebih menyentuh masyarakat pedesaan bukan hanya sebatas jargon politik yang didengungkan oleh para petinggi partai itu. Pada Kongres ke-VI PKI tahun 1959, PKI menyerukan kepada para kadernya untuk melakukan beberapa penelitian dan investigasi secara langsung ke dalam masyarakat pedesaan. Bahkan, pada Kongres ke-VII PKI tahun 1962, PKI memiliki kajian secara khusus tentang beberapa isu tematis antara lain tentang hubungan buruh tani dengan tuan tanah serta kajian spesifik mengenai penggunaan tanah, sistem panen, dan biaya produksi untuk meningkatkan pendapatan dan produktivitas.²⁴

PKI juga menggunakan langkah struktural melalui organisasi petani, baik yang dibentuknya sendiri maupun dengan cara infiltrasi ke organisasi massa petani yang sudah berdiri. Seperti telah disampaikan di atas, berbagai organisasi massa petani yang dibentuk pascakemerdekaan merupakan suatu wadah strategis untuk menggalang dukungan massa untuk PKI.²⁵

Langkah yang dilakukan PKI dalam menggalang kaum petani adalah langkah awal PKI di masa demokrasi parlementer untuk mendapat pola dukungan massa yang baik. Langkah jangka pendek PKI terutama menjelang pemilu 1955 terkesan

²³ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955*, Jakarta: KPG, 1999, hlm.84, 94, dan 95.

²⁴ Ruth McVey, "Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution", *Indonesia*, Vol. 50, 25th Anniversary Edition, Oktober 1990, hlm. 25.

²⁵ BTI yang pada awalnya berdiri sebagai organisasi terbuka bagi segala kalangan yang memiliki perhatian terhadap kemajuan petani di Indonesia, berubah menjadi organisasi massa petani di bawah kendali PKI. Hal itu terjadi setelah terjadi fusi RTI dan BTI pada tahun 1953, serta disusul SAKTI (Serikat Tani Indonesia) pada tahun 1955, yang semuanya dilebur menjadi BTI. Noer Fauzi, *op.cit.*, hlm. 122.

membuat PKI semakin pragmatis. Walaupun begitu, Aidit sangat yakin dapat mengontrol massanya dan menjadikannya kelak sebagai massa yang sadar dan tangguh karena studi gerakan yang dikembangkan.

Karya tulis tentang PKI memang sudah cukup banyak dihadirkan oleh para peneliti. Beberapa rujukan utama tentang PKI antara lain adalah karya Arnold C. Brackman yang berjudul *Indonesian Communism* dan tulisan Donald Hindley yang berjudul *The Communist Party of Indonesia (1951-1963)*. Sebagian besar karya tentang PKI secara umum membahas perkembangan partai serta berbagai pemberontakan yang dilakukan PKI. Akan tetapi, masih jarang karya tentang PKI yang secara khusus menuliskan tentang strategi politik PKI terhadap kaum petani maupun langkah PKI yang terkait dengan isu tanah.

Ada dua karya penting yang cukup terkait dan memiliki kemiripan tema tulisan, yaitu tulisan karya Arbi Sanit yang berjudul *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* serta karya Aminuddin Kasdi yang berjudul *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1950 – 1965*. Tentu saja penulis dalam hal ini mencoba menuliskan hal baru melalui perspektif yang berbeda yakni dengan menguraikan strategi PKI terhadap petani serta pengaruhnya di Jawa Timur dengan melihat latar belakang masyarakat pedesaan Jawa dan konstelasi politik yang berkembang saat itu dalam sudut pandang ilmu sejarah.

1.2. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Partai Komunis Indonesia terhadap petani serta pengaruhnya di Jawa Timur 1953 – 1965. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diajukan beberapa pertanyaan penelitian antara lain:

1. Bagaimana kondisi masyarakat petani di Jawa Timur tahun 1950-an?
2. Mengapa petani dianggap sebagai faktor penting bagi PKI?
3. Bagaimana kebijakan politik PKI terhadap kaum petani dan pengaruhnya di Jawa Timur?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus pembahasan penelitian ini adalah strategi PKI untuk menggalang kaum tani dan pengaruhnya di Jawa Timur. Periodisasi yang digunakan yaitu tahun 1953 – 1965. Tahun 1953 dipakai berdasarkan pidato Aidit yang menyampaikan semboyan "Tanah untuk Kaum Tani". Hal tersebut lalu direspon dalam Kongres Nasional PKI ke-V pada bulan Maret 1954 menjadi Program Agraria PKI serta menjadi momentum perubahan strategi politik PKI dalam menggalang massa kaum petani di Indonesia. Sedangkan tahun 1965 diambil sebagai periodisasi akhir penelitian karena pada tahun tersebut peran PKI mulai memudar terutama setelah peristiwa pembunuhan para Jenderal yang dikenal dengan Gerakan 30 September/ G 30 S PKI.

1.4. Tujuan Penelitian

Isu agraria merupakan isu yang banyak diangkat oleh setiap kelompok gerakan sosial di dunia. Di berbagai sejarah gerakan sosial, isu ini selalu menjadi alat strategis dalam melakukan revolusi. Di berbagai negara, isu agraria didominasi oleh kelompok sosialis. Hal itu memang cukup relevan dengan ajaran Marxis, terutama tentang teori pertentangan kelas. Kaum petani diharapkan menjadi subjek gerakan revolusioner.

Dalam upaya meraih dukungan petani, PKI melakukan serangkaian kegiatan politiknya berupa penelitian, pelatihan-pelatihan dan kursus singkat, kegiatan kesejahteraan serta berbagai kegiatan pemberdayaan politik dengan berbagai langkah pendekatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada kita tentang sosialisasi, "pencerdasan", dan pemberdayaan politik yang seyogianya dilakukan oleh setiap partai politik, terutama dalam masyarakat pedesaan. Hal itu diperlukan guna meningkatkan mobilitas pemahaman dan kapasitas politik masyarakat pedesaan. Munculnya PKI sebagai empat besar partai pemenang Pemilu 1955 serta perolehan suara PKI di Jawa Timur pada Pemilu DPR 1955 dan Pemilu DPRD 1957/ 1958, serta menjadi salah satu elemen terkuat yang paling berpengaruh di masa Demokrasi Terpimpin setidaknya dapat menjadi parameter kesuksesan PKI dalam menggalang massa "akar rumput", terutama kaum petani, terlepas dari tujuan pragmatis PKI yang hanya memanfaatkan petani sebagai alat politiknya mencapai kekuasaan.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. Metode ini diawali dengan mengumpulkan sumber atau disebut *heuristik*. Pencarian sumber tentang Partai Komunis Indonesia memang tidak terlalu sulit karena cukup banyak karya yang membahas PKI.

Karya-karya tersebut antara lain adalah karya yang ditulis oleh Arnold C. Brackman yang berjudul *Indonesian Communism* dan tulisan Donald Hindley yang berjudul *The Communist Party of Indonesia (1951 – 1963)*, serta karya Ruth T Mc Vey yang berjudul *The Rise of Indonesian Communist*. Selain itu, penulis juga mencari sumber yang berkaitan dengan pertanian, khususnya tentang gerakan sosial petani, maupun yang secara khusus membahas tentang PKI dan isu tanah atau petani.

Beberapa karya terkait yang penulis dapatkan antara lain adalah karya Arbi Sanit yang berjudul *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur* dan karya tulis tentang PKI dan Aksi Sepihak *Land Reform* yang ditulis oleh Aminuddin Kasdi dengan judul *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/ BTI di Jawa Timur (1960 – 1965)*.

Penulis juga mendapatkan menggunakan beberapa sumber primer seperti arsip, surat kabar, dan majalah. Dokumen arsip didapatkan penulis di Arsip Nasional RI, Perpustakaan PB NU, dan Dinas Dokumentasi Pusat Sejarah TNI. Sedangkan surat kabar dan majalah penulis dapatkan di Perpustakaan Nasional RI.

Setelah melakukan *heuristik*, penulis melanjutkan dengan kritik sumber. Kritik sumber dalam hal ini sangat membutuhkan kecermatan karena kita harus

mengetahui kredibilitas sumber yang kita kumpulkan. Kritik sumber sangat penting untuk dilakukan terutama kritik terhadap PKI yang notabene menjadi partai yang mengundang banyak kontroversi. Setelah melewati tahapan kritik sumber, penulis melanjutkan dengan interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap fakta yang ditemukan dari sumber-sumber yang telah melewati tahap kritik sumber. Dalam melakukan interpretasi, penulis juga menggunakan bantuan teori-teori sosial dan disiplin ilmu lainnya.

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan dan telah melewati tahap selanjutnya lalu disusun dan ditempatkan dalam suatu urutan kronologis dalam merekonstruksi peristiwa.

1.6. Sumber Sejarah

Sumber-sumber dalam penulisan sejarah terdiri dari dua jenis yaitu sumber primer dan sekunder. Hal itu berlaku untuk berbagai bentuk sumber, baik lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber primer berupa arsip, surat kabar majalah pada masa itu yang berafiliasi terhadap PKI, dan surat kabar umum. Arsip-arsip tersebut penulis dapatkan di Arsip Nasional RI, Perpustakaan PB NU, dan Dinas Dokumentasi Pusat Sejarah/ PUSJARAH TNI. Surat kabar dan majalah yang berafiliasi terhadap PKI yang digunakan antara lain *Bintang Merah* dan *Harian Rakjat*. Selain itu juga digunakan beberapa surat kabar yang

diterbitkan di daerah Jawa Timur seperti *Trompet Masyarakat*. Penulis juga menggunakan beberapa surat kabar umum lainnya seperti *Berita Antara*.

Surat kabar dan majalah tersebut dapat ditemukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain menggunakan sumber primer, penulis juga menggunakan berbagai sumber sekunder berupa buku-buku yang dapat ditemukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Perpustakaan FISIP UI, UPT Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan PUSJARAH TNI, dan Perpustakaan CSIS.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan disusun suatu kerangka penulisan yang dijabarkan dalam setiap Bab dan sub-sub judul mengenai poin-poin penting.

Pada Bab 1, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sumber sejarah, serta sistematika penulisan.

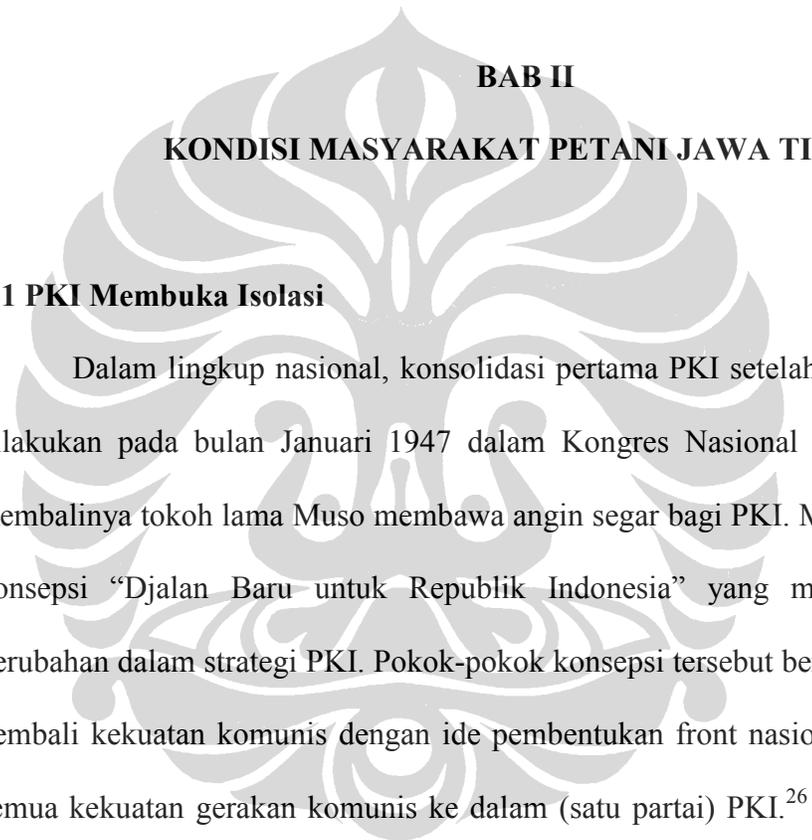
Bab 2, menggambarkan perubahan strategi PKI sejak masa kepemimpinan Aidit. Selain itu juga menggambarkan kondisi masyarakat Jawa Timur melalui beberapa perspektif antara lain konsep kepemimpinan masyarakat Jawa, struktur sosial masyarakat, agraria, dan politik.

Bab 3, menguraikan upaya PKI meraih basis dukungan massa kaum petani. Dimulai dengan program agraria yang disahkan PKI dalam Kongres Nasional PKI ke-V tahun 1954. Setelah itu PKI melakukan berbagai pekerjaan di kalangan kaum tani

baik melalui riset, pembentukan organisasi *onderbouw* massa petani, kegiatan sosial, maupun propaganda terhadap kondisi masyarakat pedesaan yang ditunjukkan untuk menghadapi Pemilu 1955 dan 1957/1958.

Bab 4, akan memaparkan upaya politik PKI menjadikan kaum petani sebagai alat politik. Berbekal hasil Pemilu DPR 1955 serta Pemilu DPRD 1957 dan 1958 di Jawa Timur yang menempatkan PKI sebagai partai besar, PKI menjadikan petani sebagai alat politik dalam menggalang massa untuk kebijakan mereka. Hal itu dapat dilihat dari masuknya PKI dalam Front Nasional yang dibentuk oleh Soekarno. PKI menjadikan massa petani sebagai bahan bakar Front Nasional. Proses *Land Reform* di Indonesia yang ditandai dengan disahkannya UU Pokok Agraria pada tahun 1960 yang dijawab PKI dengan seruan aksi sepihak bagi para petani yang tidak mempunyai tanah serta dengan melakukan berbagai aksi ofensif revolusioner.

Bab 5, adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penulisan ini yang menyimpulkan secara keseluruhan bab sebelumnya. Selain itu juga akan mengambil pesan-pesan penting yang didapatkan ketika menjawab pokok permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan penelitian.



BAB II

KONDISI MASYARAKAT PETANI JAWA TIMUR

2.1 PKI Membuka Isolasi

Dalam lingkup nasional, konsolidasi pertama PKI setelah masa kemerdekaan dilakukan pada bulan Januari 1947 dalam Kongres Nasional ke-IV di Surakarta. Kembalinya tokoh lama Muso membawa angin segar bagi PKI. Muso menyampaikan konsepsi “Djalan Baru untuk Republik Indonesia” yang meletakkan beberapa perubahan dalam strategi PKI. Pokok-pokok konsepsi tersebut berupaya menghimpun kembali kekuatan komunis dengan ide pembentukan front nasional dan meleburkan semua kekuatan gerakan komunis ke dalam (satu partai) PKI.²⁶ Rencana yang telah digariskannya itu berhasil dengan bergabungnya Partai Buruh pimpinan Setiadjid

²⁶ Subhan Sd, *Langkah Merah: Gerakan PKI 1950 – 1965*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999, hlm. 9. Muso melihat kelemahan-kelemahan dalam PKI yang terpecah atas grup-grup yang berlainan dasar dan pandangan. Hal ini tidak memungkinkan partai menjadi organisasi yang akan membimbing partai dan organisasi-organisasi lainnya menuju masyarakat komunis.

pada tanggal 27 Agustus 1948 serta bergabungnya Partai Sosialis pada tanggal 30 Agustus 1948.²⁷

Pada masa itu, PKI juga telah memikirkan program perjuangan yang sesuai dengan keadaan masyarakat pedesaan. Konferensi PKI pada bulan Agustus 1948 membuat program agraria yang akan mementingkan pekerjaan di kalangan petani.²⁸ Hal tersebut dinyatakan oleh PKI bahwa tanah untuk siapa yang mengerjakannya, dan semua tanah yang tidak dikerjakan (sisa) harus diberikan kepada petani.²⁹ PKI menyatakan bahwa tanpa sokongan aktif dari petani, revolusi nasional tidak akan menemui sasarannya. Program ini digunakan untuk memperoleh dukungan massa petani dan menarik petani ke dalam kerjasama dengan kaum buruh. Selain itu, PKI juga melihat potensi lain untuk mendapatkan dukungan, yakni lapisan tengah dan atas.³⁰ PKI melihat golongan ini sebagai golongan yang cukup penting dengan peran ekonominya yang berguna dalam perjuangan nasional.

Aidit terpilih menjadi pemimpin PKI dalam suksesi yang digelar pada tanggal 17 Januari 1951.³¹ Ketika masa awal kepemimpinannya, Aidit diuji dengan Razia Agustus 1951 yang dilakukan oleh Perdana Menteri Sukiman untuk merazia orang-

²⁷ Arnold C Brackman, *op.cit.*, hlm. 85.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁹ *Dari Front Nasional*, 20 September 1948. Lihat: George Mc T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952, hlm. 297.

³⁰ Golongan ini akan dilibatkan dalam Front Nasional. Golongan ini adalah kelas borjuis dan kelas-kelas lainnya. Kalau dilihat usaha PKI menarik kaum borjuasi nasional yang merupakan golongan penguasa, maka kesimpulan ini adalah hasil dari sikap petani yang bereaksi secara pasif terhadap masalah-masalah politik. Petani sebagai orang biasa tidak dapat diandalkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di desa-desa yang akan membuat PKI berhasil. Jadi PKI mencari dukungan dari golongan lain. *Ibid.*, hlm. 68.

³¹ Subhan Sd, *op.cit.*, hlm. 28. Sebelum kepemimpinan Aidit, PKI dipimpin oleh Alimin. Akan tetapi, gerakan yang dilakukan tidak secara terbuka akibat trauma politik setelah pemberontakan Madiun.

orang komunis atau kelompok kiri. Hal itu dilatarbelakangi oleh aksi-aksi pemogokan yang marak terjadi sepanjang tahun 1950 – 1951.³² Akan tetapi, razia tersebut tidak sampai berujung pada pembubaran PKI. Setelah masalah Razia Agustus 1951 dapat dilewati, PKI mulai melakukan konsolidasi pembangunan partai.

Sekembalinya dari Moscow dan RRC pada tahun 1953, Aidit melontarkan konsep yang dikenal dengan “Djalan ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia”.³³ PKI di bawah kepemimpinan Aidit berusaha menyatukan kembali semua potensi komunisme Indonesia setelah peristiwa yang ia sebut sebagai “Provokasi Madiun”. Dalam konsepsi “Djalan ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia”, Aidit menyampaikan tentang pembahasan kritik dan otokritik partai setelah Razia Agustus 1951. Ia juga menjelaskan tentang pentingnya perluasan keanggotaan dan organisasi partai untuk membangun kekuatan partai.³⁴ Aidit juga menerangkan tentang dua kewajiban urgen yang harus dilakukan partai yakni menggalang kekuatan front persatuan nasional anticolonialisme yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani serta meneruskan pembangunan PKI yang meluas di seluruh negeri dan mempunyai

³² Pemogokan itu antara lain dilakukan oleh SOBSI dan BTI. Aksi pemogokan mereka lakukan antara lain bertujuan untuk menandingi kekuatan asing dan penyikapan terhadap Perang Korea 1950. Aksi provokatif yang digerakkan oleh PKI itu justru dianggap oleh pemerintah akan merugikan perekonomian negara.

³³ DN. Aidit dalam aritikel yang ditulis dalam memperingati sewindu Revolusi 17 Agustus 1945, “Djalan ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia”. Tulisan ini menjadi Laporan Umum CC PKI dan disahkan dalam Kongres Nasional PKI ke-V tahun 1954. Dalam DN. Aidit, *Pilihan Tulisan*, Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1959.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 242.

karakter massa yang luas, yang sepenuhnya dikonsolidasikan di lapangan ideologi, politik, dan organisasi.³⁵

Munculnya Aidit juga membawa warna baru bagi gerakan partai dengan melakukan interpretasi terhadap ideologi maupun propaganda komunisme. Menurut Aidit, kaum komunis Indonesia jangan mengikuti ajaran marxisme secara dogmatis. Ia menyampaikan bahwa ajaran itu cukup dijadikan pegangan karena yang seharusnya dilakukan oleh kaum komunisme di Indonesia adalah melakukan transformasi ajaran marxisme ke dalam permasalahan kongkret di Indonesia.³⁶ Analisis Aidit juga menjalankan strategi kanan yang merangkul kaum borjuis nasional.³⁷ Sesuai pembabakan periodisasi pembentukan front persatuan nasional yang ia sampaikan, dalam periode kelima pembentukan front persatuan nasional perlu untuk merangkul kaum borjuis nasional. Akan tetapi, ia juga menekankan tentang pentingnya menjaga keseimbangan melihat hal tersebut.

Periode kelima... ialah periode dimana persatuan dengan burdjuasi nasional makin bertambah erat, tetapi persekutuan buruh dan kaum tani masih belum kuat. Dengan perkataan lain, Partai masih tetap belum mempunyai fondamen yang kuat. Dalam tingkat ini Partai dengan keras harus melawan penjelewengan ke kanan yang member arti berlebihan kepada persatuan dengan burdjuasi nasional dengan mengetjilkan arti pimpinan kelas buruh dan arti persekutuan kaum buruh dan kaum tani. Bahaja ini ialah bahaja

³⁵ *Ibid.*, 245.

³⁶ Donald Hindley. *The Communist Party of Indonesia (1951 – 1963)*, *op.cit.*, hlm. 30.

³⁷ Strategi Kanan (*Right Strategy*) merangkul dengan taktis kaum borjuis, kerjasama dengan musuh masyarakat, dan kolaborasi dengan imperialis (jika diperlukan). Strategi ini menampilkan sikap kompromi, negosiasi, dan konsiliasi. Secara ekstrim, strategi kanan ini bisa berganti menjadi apa yang digambarkan sebagai revisionisme. Strategi kiri dilakukan dengan memutarbalikan kenyataan, menggunakan sikap kasar, antikompromi, suka huru-hara, perselisihan, dan penentangan, menimbulkan kekerasan dalam skala kecil maupun besar, serta menyukai konfrontasi dan kekerasan. Secara ekstrim, strategi kiri ini dapat mengarah kepada dogmatisme. Arnold C. Brackman, *Cornell Paper: di Balik Kolapsnya PKI*, Yogyakarta: elstReba, 2000, hlm. 8.

melepaskan sifat bebas daripada Partai, bahaja meleburkan diri dengan burdjuasi. Di samping itu, sudah tentu partai djuga harus dengan keras mentjegah penjelewengan ke kiri, mentjegah sektarisme, jaitu sikap jang tidak mementingkan politik front persatuan nasional dengan burdjuasi nasional dan memelihara front persatuan itu dengan sekuat tenaga.³⁸

Bila kita mencermati perubahan strategi yang dilakukan Aidit, ada dua faktor yang dapat kita lihat menjadi pemicu. Faktor yang pertama adalah garis politik komunis Cina yang dikenal dengan “Jalan Mao Tse Tung”. Komunis Cina menghendaki penyelesaian persoalan disesuaikan dengan kondisi objektif mereka sendiri karena mereka yang paling mengenal wilayahnya.³⁹ Dalam perkembangannya, pada dasawarsa 1950-an, mulai tampak polarisasi dunia komunis antara Uni Soviet dan Cina. Kedua kubu komunis itu seringkali terjebak dengan perdebatan sengit mengenai arah gerakan komunis dunia. Garis komunis Cina seolah menjadi inspirasi Aidit dalam merumuskan berbagai program PKI. Faktor kedua adalah berbagai pengalaman sejarah pahit PKI dalam kasus Madiun 1948 dan Razia Agustus 1951 yang membuat Aidit harus memikirkan keselamatan partainya. Dalam wadah front persatuan nasional tersebut, PKI berusaha menunjukkan kesan nasionalis dan patriotis serta memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan dukungan massa yang luas.

Pemberontakan yang gagal di tahun 1948 menjadi bumerang terhadap perkembangan PKI. Citra buruk PKI serta infrastruktur organisasi menjadi dua poin hancurnya kekuatan partai. Melihat hal tersebut, sejak tahun 1950, PKI melakukan

³⁸ DN. Aidit, “Djalan ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia”, *loc.cit.*, hlm. 248.

³⁹ Lebih lengkapnya baca Priyanto Wibowo, *Mao dan Perubahan Sosial di Pedesaan Cina 1949 – 1959: Kebijakan-kebijakan untuk Menuju Masyarakat Baru*, Depok: Disertasi FIB-UI, 2006.

serangkaian pembangunan partai. Hal itu dimulai dengan membangun kembali infrastruktur partai di masing-masing wilayah. Mulai dari struktur kekuasaan tertinggi yakni Kongres Nasional, *Central Comite (CC)* sebagai badan pimpinan tertinggi, sampai di tingkat kelurahan berupa *Resort Comite (RC)*. Upaya memperbanyak keanggotaan di dalam partai juga dilakukan oleh PKI. Menurut Maurice Duverger, komposisi keanggotaan PKI disebar dengan dua bentuk karakter yang dilakukan guna merekrut pendukung sebanyak-banyaknya. Dua karakter keanggotaan itu disebut *direct structure* dan *indirect structure*.⁴⁰ Konsepsi *direct structure* mengandung pengertian bahwa komposisi keanggotaan PKI dilihat dari individu yang sadar masuk dan mengikatkan diri ke dalam partai tersebut. Sedangkan *indirect structure* adalah komposisi anggota yang diperoleh secara otomatis oleh PKI dari organisasi-organisasi massa yang berafiliasi di bawah partai tersebut.

Selain melakukan pengembangan kuantitas jumlah anggota, PKI juga melakukan pembangunan partai melalui peningkatan pemahaman anggota partai terhadap teori komunis. Aidit mengharapkan kader PKI memiliki pemahaman terhadap teori komunis yang diimbangi dengan penguasaan terhadap praktek di lapangan, begitu juga sebaliknya. Pemahaman dan penerapan strategi kanan maupun strategi kiri secara berlebihan akan mengakibatkan (yang diistilahkan oleh Aidit sebagai) “subjektivisme”. Menurut Aidit, dalam melawan subjektivisme di dalam partai, perlu dilakukan dua cara, yaitu:⁴¹

⁴⁰ Dikutip oleh Subhan Sd, *op.cit.*, hlm.48.

⁴¹ DN. Aidit, “Djalan ke Demokrasi Rakjat Bagi Indonesia”, *loc.cit.*, hlm. 254.

...*pertama*, mengadjar anggota2 partai untuk memakai metode Marxis-Leninis dalam menganalisa situasi politik dan dalam menghitung kekuatan kelas. Dengan demikian kita menentang analisa dan perhitungan setjara subjektif. *Kedua*, memimpin perhatian anggota2 ke arah penjelidikan dan studi di lapangan sosial dan ekonomi, agar dengan demikian bisa menentukan taktik perjuangan dan metode kerdja. Dan dengan demikian membikin kawan2 kita mengerti bahwa kesalahan dalam sesuatu keadaan jang njata akan menjebabkan mereka tenggelam dalam fantasi dan avonturisme.

Selain itu, PKI juga meningkatkan pemahaman teori anggota partainya dengan menggunakan media yang mereka terbitkan serta buku-buku teori komunisme yang mereka terjemahkan. Media yang mereka terbitkan antara lain adalah majalah *Bintang Merah* dan surat kabar *Harian Rakjat*. Selain menjadi sarana pencerdasan terhadap para kader partai, media yang mereka terbitkan juga bertujuan untuk melakukan perluasan propaganda dan publikasi partai. Bahkan, media yang mereka terbitkan juga seringkali menjadi jembatan dalam membangun konsolidasi dengan kekuatan politik lain.

Berbagai rangkaian perubahan strategi yang dilakukan PKI, khususnya di masa awal kepemimpinan Aidit, menunjukkan usaha PKI untuk melepaskan isolasi yang melekat pada dirinya pasca peristiwa-peristiwa yang mencoreng partai tersebut. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, PKI sedikit demi sedikit menghilangkan hambatan untuk masuk kembali dalam kancah politik nasional.

2.2 Kondisi Sosial Masyarakat Jawa Timur

Dua unsur penting dalam pranata sosial adalah pengurus/ pengatur (organisator) dan yang diatur/ diurus. Dalam konteks negara, kita mengenal hubungan

pemimpin dengan rakyatnya. Masyarakat tradisional Jawa mengenal hal tersebut dengan istilah *kawula-gusti* (hamba dan tuan).⁴² Istilah lain tentang dua unsur itu diutarakan oleh Clifford Geertz dengan istilah *patron-client*. Selain itu, Geertz juga membagi masyarakat Jawa menjadi tiga golongan primordial yakni Priyayi, Santri, dan Abangan.⁴³ Dalam perkembangannya, faktor-faktor di atas mempengaruhi dimensi sosial-politik kehidupan masyarakat Jawa.

Masalah kepemimpinan menjadi faktor yang perlu dikaji dalam melakukan studi kemasyarakatan. Konsep kepemimpinan memiliki hubungan erat dengan konteks sosial dan politik yang berkembang. Kedudukan dan peran pemimpin serta kepemimpinannya menjadi penting dalam masyarakat karena dalam sistem sosial terdapat interrelasi antarunsur, pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi atau diarahkan.⁴⁴

Pola hubungan *kawula-gusti* adalah pola hubungan antara pelindung dengan yang dilindungi; atasan dengan bawahan; atau hubungan antara raja dan rakyatnya. Konsep *kawula-gusti* tidak hanya menunjukkan hubungan antara yang tinggi dengan yang rendah, tetapi juga merupakan ikatan pribadi dan akrab, saling menghormati dan bertanggung jawab. Bahkan lebih dari itu, hubungan *kawulo-gusti* juga menunjukkan hubungan ketergantungan yang erat antara dua unsur yang berbeda namun tak

⁴² Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985, hlm. 17.

⁴³ Lebih lengkapnya dapat dibaca dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, dan Priyayi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

⁴⁴ Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. V.

terpisahkan.⁴⁵ Pola kepemimpinan tradisional dalam masyarakat tradisional Jawa di atas menjadikan pemimpin sebagai seorang tokoh yang mempunyai kekuasaan untuk dipatuhi dan ditakuti.⁴⁶ Konsep hubungan *kawula-gusti* berpengaruh dalam hubungan antara kepala desa dengan warganya, kiai dengan santrinya, atau hubungan antara tuan tanah dengan penggarap/ buruh tani.⁴⁷ Dengan pengertian hubungan pelindung-terlindungi/ yang dilindungi, pola hubungan yang ada dalam masyarakat Jawa juga diharapkan dapat membuat hubungan kebermanfaatan yang seimbang.

Setelah Indonesia merdeka, hubungan *kawula-gusti* mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan masyarakatnya. Hubungan dengan luar atau supradesa juga mengalami perubahan. Untuk itu hubungan-hubungan baru diciptakan melalui kepartaian, perluasan pemerintahan, dan program pembangunan. Pejabat-pejabat desa sebagai pemegang kekuasaan desa dalam berbagai bentuknya bertindak sebagai perantara antara pemerintahan desa dengan supradesa. Mereka memiliki hubungan patronase, baik kepada rakyat, petani, maupun sponsornya, yang biasanya sebagai tokoh tradisional.

⁴⁵ Dalam mistik Jawa dikenal istilah *jumbuhing kawula gusti* (menyatunya hamba dan tuan) yang melukiskan tujuan tertinggi dalam hidup manusia, yaitu terciptanya “kesatuan” yang sesungguhnya (*manunggal*) dengan Tuhan. Soemarsaid, *op.cit.*, hlm. 18. Lambang kesatuan *kawula-gusti* oleh masyarakat Jawa juga diimajinasikan dengan dua bagian keris yakni sarung keris (*warangka*) dan mata keris (*curiga*). Sarung disamakan dengan rakyat dan matanya dengan raja sehingga melukiskan hubungan yang mutlak ada. Yang satu tidak akan sempurna tanpa kehadiran yang lain. *Ibid.*, hlm. 25 - 26.

⁴⁶ Terkait dengan hal tersebut, Herbert Feith memakai istilah “Bapakisme”. Artinya, bapak atau pemimpin dipatuhi oleh anak buah, murid, atau pengikutnya yang memberi kesetiaan dan dukungan terhadap tindakannya. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy on Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962, hlm. 127.

⁴⁷ Rex Mortimer, “Class, Sosial Cleavage, and Indonesian Communism”, dalam *Indonesia*, Vol. 8, (Oct., 1969), hlm.6.

Beberapa paparan di atas mencoba melihat latar belakang sosial masyarakat Jawa dalam konteks konsep kepemimpinan serta pola hubungan *kawula-gusti* yang terbangun. Akan tetapi, bila memperhatikan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya setelah tercapai kemerdekaan nasional serta pengaruh politik yang hadir setelah itu, maka terdapat dua tipe kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan khususnya petani di Jawa, yakni kepemimpinan tradisional dan kepemimpinan modern.⁴⁸ Selain kepemimpinan tradisional yang telah dipaparkan di atas, kita juga dapat melihat pola kepemimpinan modern yang terbangun melalui hubungan institusi dengan sarana organisasi dengan mendasarkan kemampuan terukur yang dibuat oleh organisasi sebagai parameter kecakapan kepemimpinan. Dua pola kepemimpinan ini berkembang seiring dengan situasi politik yang berjalan setelah kemerdekaan, khususnya tahun 1960-an.⁴⁹

2.3 Keadaan Petani dan Konstelasi Politik di Jawa Timur

Mayoritas penduduk Jawa adalah masyarakat pedesaan yang sebagian besar diantaranya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Penduduk Jawa adalah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan data tahun 1961 yang dihimpun oleh Koentjaraningrat, penduduk Jawa berjumlah sekitar 65% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia yakni sebesar 62.993.000 jiwa. Sebagian besar diantaranya adalah masyarakat pedesaan, yakni sebesar 52.186.000 jiwa. Sedangkan jumlah

⁴⁸ Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, hlm. 87.

⁴⁹ *Ibid.*

penduduk Jawa Timur dan Madura berjumlah 21.823.000 jiwa.⁵⁰ Mengenai jumlah kepemilikan tanah di Jawa Timur, dari data yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan RI pada tahun 1957 disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Jawa Timur adalah golongan yang memiliki tanah di bawah 0,5 ha, yakni 933.615 jiwa dari 1.872.261 jiwa pemilik sawah di Jawa Timur.⁵¹

Kriteria kepemilikan tanah menjadi dasar bagi berbagai klasifikasi struktur warga desa di Jawa. Klasifikasi ini membedakan warga desa menjadi beberapa golongan, yaitu:

1. Kelompok penduduk desa inti (disebut *baku*, *gogol*, atau pribumi) yakni kelompok pembuka desa atau nenek moyang yang bermukim dan memiliki tanah serta pekarangan. Kelompok ini memiliki tanah rumah dan hak serta kewajiban penuh sebagai warga desa dalam berbagai pekerjaan desa dan pemeliharaan komunal.
2. *Indung*, yaitu kelompok yang memiliki sebidang tanah pertanian atau rumah tetapi tidak kedua-duanya. *Indung* memiliki hak dan kewajiban komunal terbatas.

⁵⁰ Data Sensus Penduduk BPS 1961 yang dikutip oleh Koentjaraningrat, *Javanese Culture*, Singapore: Oxford University Press, 1985, hlm. 8

⁵¹ Dihimpun oleh Soedigdo Hardjosudarmo dari Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Land Reform, Departemen Penerangan RI, 1957. Soedigdo Hardjosudarmo, *Masalah Tanah di Indonesia: suatu studi sekitar pelaksanaan landreform di Djawa dan Madura*, Djakarta: Bhratara, 1970, hlm. 59 dan 61.

Nusup, tlosor, atau *bujang* yaitu kelompok yang tidak memiliki tanah, rumah, maupun halaman. Mereka bertempat tinggal di pekarangan orang lain, bekerja sebagai penyewa tanah, petani kecil ataupun sebagai buruh tani.⁵²

Pada tahun 1950-an PKI juga mulai mewarnai penggolongan masyarakat pedesaan Jawa dengan penelitian yang mereka lakukan.⁵³ Dinamika masyarakat pedesaan Jawa setelah kemerdekaan nasional juga mempengaruhi berbagai struktur sosial masyarakat, terutama yang terkait dengan kepemilikan tanah. Hal itu terjadi di desa juga karena diakibatkan oleh masyarakatnya yang dalam mencapai integrasi sosial telah terdesak oleh ambisi dan gengsi perseorangan atas dasar kekayaan. Kriteria kepemilikan tanah tidak lagi mencerminkan keikutsertaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban secara penuh seperti dalam masyarakat desa yang utuh, melainkan lebih merupakan polarisasi ekonomi yang merupakan landasan pertentangan yang dikobarkan oleh PKI. Ditinjau dari sudut itu, struktur kelas baru masyarakat desa dilukiskan dan kemudian dikembangkan oleh PKI.⁵⁴ Struktur yang dikembangkan

⁵² Justus M. van der Kroef mengutip pendapat Ter Haar dalam “*Adat Law in Indonesia*” (1984), hlm. 72, dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah*, *op.cit.*, hlm. 159 – 160. Dalam penelitian lain, Chandra Bhal Tripathi dalam kajiannya terhadap struktur kelompok masyarakat di Jawa berdasarkan kepemilikan tanah, membagi menjadi lima kelompok, berurutan dari yang terbesar memiliki tanah yakni *kuli kenceng, kuli kendo, gundul, magersari, dan mondok empok/num pang*. Dikutip oleh Justus M. Van der Kroef dari Chandra Bhal Tripathi, “Some Notes on a Central Javanese Village”, *The Eastern Antropologist*, No. 10. *Ibid.*, hlm. 161

⁵³ Seperti yang disampaikan oleh Hiroyosi Kano dalam Kata Pengantarnya. Hiroyosi Kano, Frans Husken, dan Djoko Surjo, *Di bawah asap pabrik gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20*, Yogyakarta: Akatiga & Gadjah Mada University Press, 1996.

⁵⁴ Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, hlm. 39.

oleh PKI yakni melakukan polarisasi menjadi *tuan tanah*, *petani kaya*, *petani sedang*, *petani miskin*, dan *buruh tani*.⁵⁵

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk serta masuknya ekonomi pasar (komersial) ke pedesaan mengakibatkan para petani kecil secara berangsur-angsur terusir dari tanahnya. Lahan yang terlalu sempit yang jumlahnya kurang dari setengah hektar tidak berarti lagi secara ekonomi. Hal ini mengakibatkan para petani semakin terikat pada hutang. Mereka terpaksa harus melepaskan tanahnya yang kemudian menjual tanah itu kepada orang yang lebih mampu. Ketiadaan tanah yang diderita para petani, membuat mereka menjadi buruh yang dipekerjakan oleh kaum tani yang lebih sukses. Petani yang sukses ini dapat menarik keuntungan yang cukup besar dari tanah yang dimiliki. Di lain pihak, golongan petani kecil semakin banyak yang kehilangan tanah. Hal ini mengakibatkan berkembangnya struktur sosial berdasarkan polarisasi kepemilikan tanah.

Dalam kehidupan di desa memang telah terjadi polarisasi dan perkembangan-perkembangan baru akibat hubungannya dengan supradesa tetapi tidak berarti semua kehidupan tradisional desa tidak berlaku lagi. Beberapa bentuk solidaritas lama masih tetap kukuh. Polarisasi yang dibuat oleh PKI dalam perkembangannya menjadi konsepsi PKI dalam melakukan pertentangan kelas antara para tuan tanah dengan buruh tani.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 39 -40. Dikutip oleh Aminuddin Kasdi dari DN Aidit, *Pemecahan Masalah Ekonomi dan Ilmu Ekonomi di Indonesia Dewasa Ini*, Djakarta: Pembaruan, 1964, hlm. 13 – 15.

Setelah izin pendirian partai politik diberikan oleh pemerintah,⁵⁶ partai-partai politik berusaha menjadikan pedesaan sebagai basis.⁵⁷ Pembentukan basis tersebut bertujuan agar segala aliran paham dapat dipimpin secara teratur. Untuk tujuan itu, para petani di pedesaan diperkenalkan dengan struktur politik baru.

Pembentukan partai-partai pada saat itu mempunyai pengaruh lebih intensif walaupun beberapa organisasi telah ada sejak zaman penjajahan. Dalam struktur baru itu, kaum tani diberi kerangka politik yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menangani masalah-masalah internal dan eksternal. Dengan kerangka itu, polarisasi kehidupan sosial di pedesaan mempunyai bentuk yang jelas. Melalui kerangka itu pula, politisasi di tingkat nasional akan tampak di tingkat pedesaan. Di samping melahirkan hubungan-hubungan baru, para petani juga mengalami peralihan dari orientasi internal ke orientasi eksternal. Dalam situasi yang

⁵⁶ Sesuai maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Hatta pada 3 November 1945. Lihat Kementerian Penerangan RI, *Kepartaian di Indonesia, op.cit.*, hlm. 3.

⁵⁷ Pedesaan merupakan kekuatan dan alat yang dapat dipergunakan PKI untuk mencapai tujuan. Pedesaan merupakan pendukung terbesar yang dapat diharapkan PKI. Keadaan masyarakat di Indonesia umumnya dan di desa-desa Jawa Tengah dan Jawa Timur khususnya bersifat agraris yang mana 60 – 70% penduduk hidup di desa-desa dari pertanian. Mengenai hal itu yang terpenting adalah keadaan petani paling buruk. Hal tersebut menurut PKI harus berubah. Petani harus dibangkitkan dan di bawah pimpinan kaum buruh mengoper kekuasaan masyarakat dan negara dan membangun masyarakat desa. Keadaan-keadaan khusus di desa-desa yang dapat dilihat sebagai pertentangan antara golongan-golongan atau sekelompok penganut agama seperti santri-abangan, merupakan salah satu keadaan yang dapat diinterpretasikan melalui teori-teori komunis (PKI) serta dipergunakan pula untuk tujuan-tujuan PKI. Lihat D.N. Aidit, “Kibarkan Tinggi Pandji2 Tanah Untuk Petani dan Rebut Kemenangan Satu Demi Satu”, *Bintang Merah*, No. Konfernas Tani, Thn. Ke-XV, April – Mei 1959, hlm. 217.

baru itu, kaum petani mulai berurusan dengan dunia luar dan lembaga-lembaga baru supradesa⁵⁸ melalui para pemimpin atau elit desa.

Organisasi-organisasi politik yang baru, membangun jaringan kegiatan mereka untuk mencapai desa dengan mendirikan cabang-cabang atau ranting-ranting di tingkat lokal sehingga menjadikan desa banyak terlibat dengan kegiatan ke luar. Dalam menjalankan mekanisme organisasi maka diangkat seorang pemimpin partai dan kader-kadernya dari kalangan berpendidikan. Mereka kemudian menggunakan fasilitas, alat komunikasi, dan simbol-simbol modern. Dengan cara itu para pemimpin partai semakin berpengaruh di kalangan rakyat terutama di lingkungan mereka yang berstatus rendah seperti petani miskin dan petani tidak bertanah yang tidak mempunyai orientasi ke dunia luar.

Perubahan struktur baru dengan masuknya partai politik ke dalam pedesaan telah menyebabkan merosotnya wibawa elit tradisional. Hal itu disebabkan dilibatkannya desa ke dalam politik nasional sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan di kalangan pemimpin-pemimpin supradesa yang mencari dukungan dan suara para petani. Kehidupan masyarakat petani pun terbagi dalam berbagai aliran sebagai akibat berkembangnya faksionalisme. Dalam berbagai kejadian, seperti pada pembentukan dan pengembangan organisasi politik modern, keperluan terhadap kepemimpinan yang rasional dan berwawasan tidak dapat dihindari lagi. Hal ini diperkuat lagi dengan semakin eratnya hubungan desa dengan dunia luar yang

⁵⁸ Margo L. Lyon memakai istilah *supra-village*, yakni organisasi yang berasal dari tingkat atas desa dalam bentuk organisasi-organisasi politik. Margo L. Lyon, "Dasar-dasar konflik di Pedesaan Jawa", dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah, op.cit.*, hlm. 186.

menyebabkan kedudukan elit tradisional semakin merosot dan tergeser. Kedudukan elit tradisional ini tidak berarti terhapuskan.⁵⁹

Penelitian yang dilakukan Clifford Geertz dengan membagi masyarakat Jawa menjadi tiga golongan juga mempengaruhi konstelasi politik yang berkembang. Dalam hal ini, PKI lebih memilih untuk melakukan pendekatan kepada golongan abangan.⁶⁰ PKI menerapkan strategi partai yakni meletakkan kepentingan desa⁶¹ di atas kepentingan kota dengan cara memberikan tanggapan terhadap keperluan petani, meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka. Pemimpin-pemimpin PKI menyatakan bahwa petani merupakan dasar kehidupan partai mereka. Guna mencapai tujuan politiknya, PKI menggariskan tujuannya untuk melaksanakan program agraria daripada industri. Melalui streteginya tersebut, PKI bersaing dengan NU dan PNI dalam menarik dukungan dari petani. Dalam mekanisme pencarian dukungan, PKI

⁵⁹ Terkadang kenyataan memperlihatkan bahwa partai mulai mengambil orang desa sebagai pemimpin-pemimpin partai tingkat desa. Dengan demikian melalui partai, orang bisa menempati status yang baik dalam masyarakatnya. Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 196.

⁶⁰ Dalam kelompok masyarakat desa yang tergolong dalam lingkungan santri, kepemimpinan Kiai mendapatkan legitimasi dengan terbentuknya partai NU. Pasang surutnya prestise elite tradisional ditentukan oleh kesempatan yang mampu mereka perankan sebagai perantara dengan dunia luar. Keterlibatan desa dengan supradesa yang semakin besar mengancam “ketenangan” dan sekaligus juga sebagai ancaman bagi elit desa yang cenderung ke dalam. Adanya pilihan untuk masuk pada salah satu aliran politik tertentu menyebabkan desa terbagi kedalam faksi-faksi dengan berbagai saluran komunikasinya masing-masing. Golongan santri yang menjadi bagian dari masyarakat desa di Jawa termobilisasi berdasarkan pada orientasi keagamaan dengan tekanan pada simbol-simbol Islam. Selain *modin* dan pejabat-pejabat desa yang santri, tokoh penting dalam kegiatan organisasi-organisasi politik adalah guru-guru agama, haji, dan ulama atau kiai. Daya tarik utama organisasi atau partai-partai Islam seperti, Muhammadiyah, Masyumi, dan NU, hampir seluruhnya berdasarkan keagamaan dan tampaknya sukar untuk menarik perhatian para petani di pedesaan berdasarkan kepentingan sekuler seperti ekonomi. Hal itu dikarenakan keanggotaan organisasi atau partai-partai itu dari sudut ekonomi lebih beragam atau heterogen dibandingkan dengan keanggotaan PKI.

⁶¹ Taktik PKI yang selalu dipakai adalah mengeksploitir situasi dan keadaan setempat. Aidit mengetahui bahwa petani kekurangan tanah, dan di desa kehidupan sulit, lapangan kerja terbatas, dan tingkat hidup petani rendah. Sebaliknya, Aidit seperti setiap orang yang mempelajari daerah pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kenal apa maunya.

menggunakan pola secara sistematis dengan memotong silang batas-batas vertikal pemilihan kelas sosial dalam struktur agraria. Di berbagai daerah pedesaan Jawa, PKI tidak hanya mendapat pengikut dari lapisan petani kecil atau buruh tani, tetapi juga dari lapisan petani kaya dan tuan tanah sama halnya seperti pengikut NU dan PNI yang sering ditunjuk sebagai partai kelas petani kaya dan tuan tanah. Partai-partai itu juga mendapat dukungan sangat kuat dari *client* mereka masing-masing pada lapisan petani miskin dan buruh tani. Hal itu membuktikan bahwa partai-partai politik di Indonesia pada masa itu bukanlah partai yang mewakili perbedaan kelas. Selain itu, seperti halnya partai-partai lain, PKI merekrut massa anggotanya dari pendukung aliran-aliran kebudayaan atau keagamaan tertentu yang tidak dipersatukan oleh solidaritas kelas, melainkan dipertautkan oleh hubungan *patron-client* atau *kawula-gusti*.

Hubungan *kawula-gusti* dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan oleh kedua belah pihak antara *kawula* dan *gusti*. Salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai jaminan sosial bagi mereka karena hubungan tersebut dapat memberi rasa aman kepada pelaku-pelakunya. Hal terpenting bahwa *kawula* juga menjadi penghubung dengan dunia luar. Ia memegang kunci bagi sumber-sumber serta kekuasaan dari luar desa sehingga struktur hubungan itu mempunyai peranan menentukan dalam proses mobilisasi petani.

Tipe kepemimpinan masyarakat Jawa pada dasawarsa 1960-an terbagi menjadi dua, yakni tradisional dan modern. Kepemimpinan tradisional berdasarkan kemampuan pribadi dan hubungan pribadi dengan landasan *kawula-gusti*.

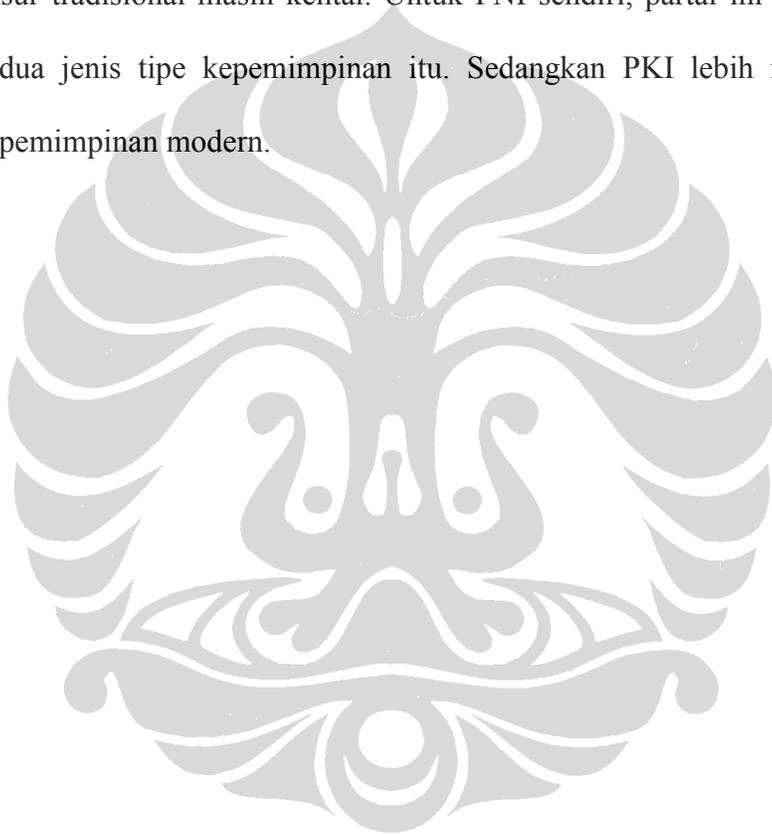
Kepemimpinan ini harus dapat menunjukkan kemampuannya memberikan keuntungan materi atau non materi hingga dapat memberikan rasa puas kepada warga masyarakatnya. Kepemimpinan tipe ini berorientasi kedalam. Contoh ekstrim tipe kepemimpinan ini adalah kepemimpinan pesantren atau NU. Kepemimpinan modern dilihat berdasarkan hubungan yang terjalin di suatu institusi dengan sarana organisasi. Ciri-ciri kepemimpinan modern antara lain: adanya birokrasi, disiplin organisasi, serta nilai-nilai yang dikembangkan mengarah kepada kepemimpinan dan tujuan organisasi. Contoh kepemimpinan tipe ini adalah kepemimpinan dalam PKI. Kedua kepemimpinan ini sama-sama berkembang di pedesaan Jawa.⁶²

Peranan elit desa dalam menjalankan hubungan *kawula-gusti* dengan warganya berperan sebagai perantara dalam penyusunan saluran-saluran partai-partai politik secara vertikal. Peranannya yang sejajar dengan kebijakan pemerintah dalam memberi identitas baru kepada warga desa itu justru memperkuat kepemimpinan yang mendukung aliran politik mereka. Kedudukannya sebagai *kawula* pun semakin kuat. Kuatnya peranan elit desa ini memunculkan kooptasi diantara elit tradisional lurah dan kiai. Para pejabat desa biasanya bekerja sama dengan partai atau aliran yang menguasai birokrasi pemerintah, dalam hal ini PNI. Elit keagamaan memihak kepada partai keagamaan nasional. Di pedesaan Jawa Timur mereka berpihak terutama pada NU. Sedangkan PKI membuka pintu masuk ke dalam sistem politiknya

⁶² Untuk tepatnya, barangkali dapat digambarkan pada pernyataan PKI bahwa “PNI adalah partai Priyayi (abangan lapisan atas), Masyumi dan NU merupakan partainya orang santri, dan PKI adalah partai rakyat (abangan)”. Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955*, Jakarta: KPG, 1999, hlm..

yang lebih besar melalui organisasi-organisasi yang mencakup segala kelompok kepentingan.

Para santri lebih mengandalkan kharisma kiai dalam hal kepemimpinan. Mereka juga mempergunakan cara-cara modern seperti organisasi walaupun unsur-unsur tradisional masih kental. Untuk PNI sendiri, partai ini berhasil menggunakan kedua jenis tipe kepemimpinan itu. Sedangkan PKI lebih menonjolkan segi-segi kepemimpinan modern.



BAB III

MEMBANGUN BASIS DUKUNGAN MASSA PETANI

3.1 Program Agraria PKI Hasil Kongres Nasional ke-V

Kongres Nasional PKI ke-V tahun 1954 menggariskan pola strategi Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP) yaitu: (1) melaksanakan aksi gerilya di lingkungan massa petani di pedesaan, (2) gerakan revolusioner kaum buruh di kota-kota, dan (3) penyusupan di kalangan angkatan bersenjata. Metode tersebut merupakan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Kongres Nasional ke-IV.⁶³ Dengan dilaksanakannya MKTBP, PKI telah melakukan persiapan awal bagi pecahnya revolusi sosial.

⁶³ Dikutip oleh Hermawan Sulistyono dari DN. Aidit, *Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI)*. Hermawan Sulistyono, *Palu Arit di Ladang Tebu*, Jakarta: KPG, 2000, hlm. 33 -34. Dalam perkembangan selanjutnya, MIRI menjadi “dasar perumusan” Manifesto Politik (Manipol) yang merupakan hasil sistemisasi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. MIRI merupakan Tesis PKI tentang Masyarakat Indonesia yang dirumuskan pada tahun 1957. Di dalam MIRI terdapat beberapa pembahasan Masyarakat dan Revolusi Indonesia versi PKI diantaranya mengenai sasaran pokok Revolusi Indonesia, tugas-tugas Revolusi Indonesia, tenaga-tenaga penggerak atau kekuatan pendorong Revolusi Indonesia, watak Revolusi Indonesia, dan sebagainya. Tim Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indoensia*, Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1998, hlm. 25 – 26.

Strategi PKI terhadap kaum petani pada masa kepemimpinan Aidit mulai dirumuskan dalam Kongres Nasional PKI ke-V tahun 1954. Program agraria PKI tersebut didasarkan kepada tulisan Aidit di Majalah Bintang Merah pada bulan Juli 1953 yang berjudul "Hari Depan Gerakan Tani Indonesia". Dalam tulisan itu, Aidit dengan tegas mengkritik program "Nasionalisasi Tanah"⁶⁴ yang menurutnya tidak sesuai dengan Revolusi Indonesia dan memisahkan para kader dengan massa kaum tani serta membuat kecurigaan di kalangan kaum tani. Kecurigaan yang dimaksud oleh Aidit adalah tentang prinsip tanah milik perseorangan atas tanah yang digaungkan dengan semboyan "Nasionalisasi Semua Tanah". Menurut Aidit, program yang bermaksud menjadikan semua tanah sebagai milik negara akan membuat kecurigaan petani yang menganggap hal tersebut hanya tipuan untuk mengambil tanah milik mereka.⁶⁵

Sebelum merumuskan program agraria, Aidit terlebih dahulu menyampaikan analisis kondisi sebagai berikut:

Sebagai suatu negeri yang sudah dikuasai oleh sistem kapitalisme, feodalisme di Indonesia sudah tentu tidak penuh lagi, sudah tidak 100% lagi. Yang masih ada di Indonesia sekarang ini ialah sisa feodalisme yang penting dan berat. Ini dapat kita lihat dari kenyataan: pertama, masih adanya hak monopoli tuantanah² besar atas tanah yang dikerdjakan oleh kaum tani yang sebagian terbesar tidak mungkin memiliki tanah dan arena itu terpaksa menjewa tanah dari tuantanah² menurut syarat² apa saja; kedua, ialah pembayaran sewatanah dalam wujud barang kepada tuantanah² merupakan bagian sangat besar dari hasil panen kaum tani dan yang mengakibatkan

⁶⁴ Kongres BTI di Jember pada tahun 1947 menggunakan semboyan "Hak Negara atas Semua Tanah". Oleh RTI, program dan semboyan tersebut diubah menjadi "Nasionalisasi Semua Tanah". "Hari Depan Gerakan Tani Indonesia" dalam DN. Aidit, *Pilihan Tulisan*, Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1959, hlm. 158 – 159.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 161.

kemelaratan bagian terbesar kaum tani; ketiga, jalah sisti sewatanah dalam bentuk kerdja di tanah tuantanah², jang menempatkan bagian terbesar kaum tani dalam kedudukan hamba; jang terachir jalah tumpukan hutang² jang menimpa bagian terbesar kaum tani dan jang menetapkan mereka dalam kedudukan budak terhadap pemilik² tanah.⁶⁶

Dengan berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut dan melalui berbagai diskusi yang dilakukan menjelang Kongres Nasional PKI ke-V tahun 1954, maka dirumuskan politik agraria Partai sebagai berikut:

„semua tanah jang dimiliki oleh tuantanah² asing maupun tuantanah² Indonesia harus disita tanpa penggantian kerugian. Kepada kaum tani, pertama² kepada kaum tani takbertanah dan kaum tanimiskin, diberikan dan dibagikan tanah dengan tjuma²”. Sebagai sembojan ditetapkan: „tanah untuk kaum tani” dan „milik perseorangan tani atas tanah”.⁶⁷

Walaupun program agraria PKI menyerukan sita tanah milik para tuan tanah dan diberikan kepada kaum tani tak bertanah serta kaum tani miskin, dalam pelaksanaannya Aidit menyerukan kepada para kader dan anggota partai bersama kaum tani menentukan sendiri tuntutan yang paling mendesak disampaikan sesuai situasi dan kondisi masing-masing wilayah melalui berbagai sembojan yang mereka buat. Seperti pernyataan Aidit berikut:

Adalah kewadajiban kader² dan anggota² Partai untuk menentukan, melalui perundingan dengan kaum tani, tuntutan mana jang paling mendesak (urgen) disesuatu tempat dan pada waktu jang tertentu. Bagi tiap² tuntutan bisa diadakan gerakan jang berdasarkan sembojan², misalnja sembojan² sbb.: “turunkan sewa tanah”, “turunkan bunga uang pindjaman”, “hapuskan rodi”, “djangan diganggu tanah jang sudah dikerdjakan kepada kaum tani”, “hak kaum tani menentukan sewa tanahnja kepada perkebunan asing”,

⁶⁶ DN. Aidit, “Hari Depan Gerakan Tani Indonesia”, *loc.cit.*, hlm. 159.

⁶⁷ DN. Aidit, *Kaum Tani Menggajang Setan-Setan Desa* (Laporan singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Djawa Barat), Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1964, hlm. 11.

“persendjatai kaum tani untuk membasmi DI/TII dan gerombolan2 teror lainnja”, “bantuan bibit dan alat bagi kaum tani”, “satu sekolah pertanian untuk ketjamatan”, “hapuskan pembajaran surat keterangan”, “perbaiki irigasi lama dan bikin jang baru”, “bentuk pemerintah desa jang membela rakjat”, dsb.⁶⁸

Dengan pernyataan Aidit tersebut, kita dapat melihat bahwa PKI menyadari kekuatan politik yang mereka miliki belum terlalu kuat untuk mendorong sebuah kebijakan yang mereka harapkan. Sehingga, yang mereka angkat hanyalah semboyan dan semangat perjuangan partai untuk mendapatkan simpati dari kaum tani. Sisi pragmatisme yang realistis tersebut terlihat dalam pernyataan Aidit berikut ini:

Tiap2 tuntutan harus sesuai dengan kekuatan jang sesungguhnya dari organisasi kaum tani. Djika organisasi masih lemah, maka tuntutan tidak boleh tinggi2, supaja dibatasi sampai kira2 bisa berhasil dengan dukungan kekuatan organisasi jang belum kuat itu. Makin kuat organisasi makin tinggi dan makin banjak gerakan menuntut jang bisa diadakan. Dalam menentukan tuntutan, peganglah senantiasa pedoman: “Biar ketjil, tapi berhasil”.⁶⁹

Dengan berbagai semboyan di atas, maka sesuatu yang dibutuhkan PKI adalah melakukan pekerjaan Partai di kalangan kaum tani. Aidit menyadari bahwa kesadaran kader partai untuk bekerja di kalangan kaum tani masih belum optimal. Hal itu didasarkan kepada jumlah kader yang masih sedikit dari kalangan kaum tani serta belum adanya anggota partai yang benar-benar mengerti hubungan agraria dengan tuntutan kehidupan petani. Oleh karena itu, Aidit menyerukan pentingnya pekerjaan di kalangan kaum tani. Pekerjaan di kalangan kaum tani diharapkan dapat menggalang basis front persatuan nasional. Pekerjaan yang dimaksud tersebut adalah beberapa langkah praktis untuk membantu kaum tani dalam melakukan perlawanan

⁶⁸ DN. Aidit, “Hari Depan Gerakan Tani Indonesia”, *loc.cit.*, hlm. 166.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 167.

terhadap para tuan tanah serta melalui pekerjaan mengorganisasi dan mendidik kaum tani.

Salah satu rumusan Kongres Nasional PKI ke- V pada tahun 1954 telah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi PKI untuk memimpin front persatuan nasional tanpa mengorganisasikan massa petani dan memasukannya sebagai bagian dari front persatuan nasional.⁷⁰ Sejak saat itu, Aidit dengan gencar menyerukan kepada kader PKI untuk melakukan penelitian ke dalam masyarakat pedesaan. Hal tersebut antara lain disampaikan Aidit dalam berbagai publikasi yang dibuatnya. Aidit menyerukan kadernya untuk "Turun ke Bawah" melakukan penelitian terhadap permasalahan kepemilikan tanah.

Metode riset dalam pekerjaan partai di kalangan kaum tani sudah dilakukan PKI sejak tahun 1951.⁷¹ Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui persoalan agraria, kaum tani, dan gerakan tani dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner yakni menyebarkan formulir-formulir yang memuat daftar pertanyaan dengan kolom-kolom yang harus diisi oleh kader. Akan tetapi, metode penelitian yang dilakukan itu tidak berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaannya banyak formulir yang tidak kembali kepada *Comite* yang mengirimkannya. Hanya sedikit kuesioner yang kembali dengan memuat angka-angka resmi dari kelurahan dan kecamatan. Dengan berbagai kenyataan tersebut, PKI menganggap bahwa metode

⁷⁰ Dikutip oleh Justus M. van der Kroef dari *Materi Kongres Nasional PKI ke-VI*, Jakarta: Departemen Agitprop CC PKI, 1958. Justus van der Kroef, "Indonesian Reform and The Indonesia Communist Party", *Far Eastern Survey*, Vol. 29, No.1 (Jan, 1960), hlm. 6.

⁷¹ DN. Aidit, *Kaum Tani Menggajang Setan-Setan Desa*, *op.cit.*, hlm. 10.

penelitian ini keliru karena para kader tidak bersentuhan langsung dengan kenyataan kongkrit di lapangan yang akan memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang hubungan antar kelas dan cara-cara penghisapan di desa.⁷² Oleh karena itulah, pada tahun 1953, Aidit menyerukan kepada para kader partai untuk melakukan pekerjaan di kalangan kaum tani.⁷³ Selain penelitian yang dilakukan dengan cara bersentuhan langsung dengan realitas petani, Aidit menyerukan para kader partai untuk melakukan pekerjaan di kalangan kaum tani dengan mendidik dan mengorganisasi kaum tani dalam perjuangan melawan para tuan tanah, kaum reaksioner, dan imperialis untuk mendapatkan tuntutan bagian dan kebutuhan kesehariannya.

Melihat realitas kekuatan politik yang belum signifikan, cara-cara yang dilakukan PKI masih terbatas dengan melakukan propaganda terkait masalah tanah nasib petani. Selain itu, PKI juga menggunakan Front Persatuan Tani (FPT) yang dibentuk pada tanggal 2 Juli 1951 sebagai sayap gerakan komunis terhadap kaum tani. Hal itu semakin bertambah besar di akhir tahun 1952 sebelum akhirnya terjadi fusi antara berbagai organisasi tani ke dalam BTI yang sudah dikuasai kaum komunis. Beberapa langkah provokatif dan advokasi juga dilakukan oleh berbagai elemen tersebut. Dalam *Harian Rakjat* tercatat beberapa langkah taktis yang dikembangkan antara lain seruan FPT untuk menghapus sisa-sisa feodalisme dengan menghapus kekuasaan tuan tanah atas tanah dan digantikan oleh kekuasaan kaum tani

⁷² *Ibid.*

⁷³ DN. Aidit, "Hari Depan Gerakan Tani Indonesia" dalam *Pilihan Tulisan, op.cit.*, hlm.162

atas tanah serta menyerukan “Berikan Tanah Bagi Petani!”.⁷⁴ Selain itu juga diberitakan tentang tuntutan PKI Lamongan terhadap pemerintah daerah untuk memperbaiki nasib kaum tani. Seksi Komite PKI Lamongan mengirim delegasi untuk bertemu dengan Bupati Lamongan Djawatan Pertanian dan DPU setempat. Tuntutan mereka antara lain mengenai masalah tanah, penghapusan sisa-sisa feodal dan demokratisasi pedesaan, serta syarat-syarat untuk menambah hasil produksi.⁷⁵ Bentuk aksi demonstrasi juga terjadi di pabrik gula pesantren di Kediri.⁷⁶ Kegiatan kursus bagi petani maupun acara ceramah politik bagi petani juga menjadi bagian langkah taktis PKI.⁷⁷

3.2 Konsolidasi PKI Terhadap Golongan Abangan

Berdasarkan contoh yang dilakukan oleh Mao melalui penyelesaian persoalan yang didasarkan terhadap kondisi lapangan di wilayah tersebut, PKI juga mencoba untuk memahami konteks sosial masyarakat Jawa Timur. Menjelang Pemilu, arahan isu yang berkembang, khususnya di daerah Jawa Timur, berkisar pada pemisahan tradisional masyarakat antara golongan priyayi, santri, dan abangan.⁷⁸ PKI mencoba untuk lebih memfokuskan dukungan massa golongan abangan. Secara ideologis, golongan abangan lebih lemah dibandingkan golongan santri.

⁷⁴ *Harian Rakjat*, 11 Desember 1953.

⁷⁵ *Harian Rakjat*, 11 November 1954.

⁷⁶ *Harian Rakjat*, 9 Desember 1954.

⁷⁷ *Harian Rakjat*, 29 Desember 1953.

⁷⁸ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955*, *op.cit.*, hlm. 24.

Sebagai pengikat, golongan santri mempunyai landasan yang terperinci, yakni nilai yang harus dianut dalam memandang masyarakat dan cara-cara menyusun masyarakat. Landasan tersebut telah diatur dalam ajaran-ajaran agama Islam. Sementara itu, pada golongan abangan, lemahnya peranan doktrin dalam mempersatukan mereka berpangkal kepada sifat sekuler dari ajaran-ajaran agama mereka. Bagi golongan abangan, agama merupakan urusan pribadi. Terserah kepada anggapan seseorang apakah sebaiknya ia mengikuti atau menolak semua ajaran-ajaran agama mereka. Golongan abangan tidak terikat kepada kewajiban untuk mentaati agama sehingga dijumpai paham pragmatis dan kurangnya keterikatan kepada lembaga-lembaga sosial.

Kebebasan bagi golongan abangan untuk beribadah dengan cara-cara yang dianggap baik oleh setiap orang serta tidak adanya kewajiban untuk menyusun masyarakat berdasarkan kepada ajaran-ajaran agama, cenderung mengurangi keutuhan golongan ini. Hal itu disebabkan ikatan golongan yang lebih didasarkan kepada tradisi dan hal-hal yang dianggap baik secara perseorangan dari pandangan hidup golongan. Hal inilah yang menjadi penyebab PKI mudah diterima oleh golongan abangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Clifford Geertz menyebutkan bahwa:

“Diterimanya pengaruh PKI oleh golongan abangan ternyata dapat pula dilihat sebagai kelemahan ideologis. Golongan ini tidak mempunyai suatu idealisme yang mengikat mereka secara keseluruhan. Tidak seperti golongan santri yang terikat kepada Islam sebagai yang diideologikan”.⁷⁹ Clifford

⁷⁹ Selanjutnya dapat dibaca dalam Clifford Geertz, “The Integrative Revolution” dalam Clifford Geertz (ed.), *Old Societies and New States*, Glencoe, 1963, hlm. 363.

Geertz juga menambahkan: “Ada(nya) suatu buku yang ditulis oleh Permai yang berisi doktrin dan merupakan fusi dari ideologi modern seperti Pancasila dengan pola-pola kepercayaan tradisional orang Jawa (abangan) seperti simbol-simbol makanan, metode disiplin spiritual, ditambah nilai-nilai baru seperti nilai Islam di satu pihak dan campuran antara nilai-nilai petani seperti rukun, dengan nilai Marxist di lain pihak”.⁸⁰

Secara ideologis, kerja sama antara abangan dengan PKI dapat dilihat pula dari tidak bertentangnya agama sinkretisme dengan ideologi PKI. Terdapat persamaan nilai-nilai yang dipahami antara abangan dan PKI. Hal itu, antara lain pengakuan atas peranan pemimpin yang relatif tidak terbatas dalam pengaturan masyarakat, tidak lazimnya sifat yang mendahulukan kepentingan perseorangan, dan tidak dihargainya tuntutan akan peranan individu yang menonjol dalam masyarakat abangan. Hal-hal tersebut merupakan aspek dari cita-cita penyusunan dalam masyarakat Marxisme-Leninisme-Maoisme.⁸¹

PKI menyadari pentingnya peranan kepemimpinan dukun di desa-desa. Selain dukun, kelompok-kelompok abangan juga memberikan loyalitas mereka kepada guru di suatu padepokan.⁸² Biasanya, seorang guru kebatinan ini juga ahli mengenai soal-soal pengobatan. Melalui guru kebatinan itu pula orang-orang desa meminta pengobatan. Ahli-ahli ini sering pula dipengaruhi oleh PKI. Menurut PKI, mereka membantu orang-orang yang meminta pengobatan dan sekaligus merupakan mata rantai dari jaringan organisasi PKI di desa-desa.

⁸⁰ Clifford Geertz, *ibid.*, hlm. 115.

⁸¹ Arbi Sanit, *op.cit.*, hlm. 210.

⁸² Semacam lembaga pendidikan ilmu kebatinan bagi orang abangan dan kadang-kadang sekaligus merupakan tempat pertapaan.

Kurangnya kemampuan berorganisasi pada golongan abangan dan kenyataan bahwa golongan santri lebih mampu dalam berorganisasi mendorong golongan abangan untuk mencari sokongan di luar golongannya sendiri. Mereka memperoleh sokongan, bimbingan, dan latihan-latihan dari PKI. Semua itu dilakukan melalui organisasi-organisasi massa yang dibentuk sesuai dengan pelbagai lapangan kehidupan petani.

Bergesernya sebagian dari golongan abangan kepada PKI menjadi gambaran bahwa kesetiaan mereka kepada golongan priyayi yang bersifat tradisional telah menurun. Terdapat beberapa faktor mengapa hal ini dapat terjadi. Faktor itu antara lain berkaitan dengan kemunduran posisi golongan priyayi sebagai pemimpin masyarakat melalui penguasaan tanah yang sudah dimulai sejak dikembangkannya perusahaan-perusahaan perkebunan orang-orang Eropa. Hal ini mengakibatkan petani yang semula tergantung kepada tanah, yang umumnya dikuasai oleh golongan priyayi, tidak lagi memberikan kesetiaan penuh kepada priyayi. Terutama, mereka yang tidak lagi mengerjakan tanah-tanah yang dikuasai orang-orang priyayi, tetapi telah bekerja sebagai buruh di perkebunan, pabrik, tambang dan sebagainya.

Jika dilihat dari motivasi dan kesediaan golongan abangan menerima pengaruh PKI memperlihatkan bahwa perimbangan kekuasaan merupakan faktor utama dari pertimbangan-pertimbangan golongan ini. Pada golongan abangan, usaha pemupukan kekuasaan sosial kurang dilembagakan. Begitu pula halnya dengan usaha-usaha menegakkan kekuasaan politik merupakan dorongan terkuat bagi terlaksananya kerja sama antara golongan abangan dengan PKI.

PKI berkesimpulan bahwa golongan abangan menguntungkan kalau diorganisir. Pertimbangan yang memungkinkan hal itu dapat dilihat dalam usaha PKI mencari sasaran di pedesaan yang merupakan pemusatan sebagian besar penduduk di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Timur. Dari hal itu, dapat dijumpai golongan abangan tidak terikat kepada ideologi politik tertentu. Melalui tradisi kebudayaan, PKI mencoba memberikan dasar-dasar ajaran komunisme kepada golongan abangan.

Beberapa cara lainnya yang digunakan PKI terkadang dipakai pula oleh partai lain dalam berkampanye. Cara tersebut, antara lain rapat-rapat umum, pembicaraan langsung kepada petani, mengadakan sidang-sidang khusus, mengadakan kunjungan ke rumah-rumah atau disebut juga dengan anjangsana.⁸³ Cara tersebut merupakan cara kampanye PKI yang lazim digunakan untuk menarik massa.

PKI juga melihat kelemahan berorganisasi golongan abangan dapat digunakan untuk membangkitkan simpati mereka apabila diberikan suatu bimbingan. Gejala pemberian kesetiaan kepada struktur organisasi dan bukan kepada program partai merupakan sifat masyarakat desa. Dengan demikian, PKI lebih mudah untuk menanamkan pengaruh kepada golongan abangan. Apalagi, golongan abangan relatif tertinggal dari golongan santri dalam hal berorganisasi. Persamaan sikap umum yang antisantri, baik oleh PKI maupun kalangan abangan juga menyebabkan kedua pihak ini saling mendekati.

⁸³ Seloosomardjan, *Sosial Change in Yogyakarta*, Ithaca, 1962, hlm. 180—181.

Hasil yang diperoleh PKI di kalangan abangan dicapai dengan melakukan kegiatan dan keahlian PKI sendiri. Selain itu, juga ditentukan oleh ada tidaknya persaingan dalam berebut pengaruh. Dari segi struktur politik, golongan abangan banyak dipengaruhi oleh PKI. Hal ini dapat terlihat dari pengorganisasian golongan ini atas bermacam organisasi massa sesuai dengan bidang-bidang kehidupan petani. Terdapat organisasi di bidang pertanian, perikanan, pengajaran, perburuhan, kehutanan, kesenian, dan sebagainya. Ternyata, ikatan orang desa terutama tertuju kepada struktur organisasi itu sendiri daripada kepada program partai.

Untuk melihat dukungan petani abangan kepada PKI dapat ditunjukkan dari hasil-hasil Pemilihan Umum tahun 1955 dan 1957/ 1958 yang memperlihatkan perolehan suara terbesar kedua dan ketiga PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasil yang dicapai PKI ini merupakan hasil dari usaha PKI dalam mengorganisir pendukung-pendukungnya itu. Golongan abangan yang didekati PKI, antara lain tiga kelompok kekuatan yang satu sama lain bersaing memengaruhi massa tani. Pertama, lurah serta pembantu-pembantunya para pamong desa dan golongan tuan tanah,⁸⁴ kedua, para dukun dan guru-guru mistik, dalang dan guru pencak yang terkemuka

⁸⁴ Untuk menarik dukungan kelompok pamong desa, PKI menguasai Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) pada tahun 1951 yang telah terbentuk sejak 26 September 1946. Agar sasaran dapat dicapai, PPDI mengemukakan programnya: "Memperjuangkan bagi pejabat-pejabat resmi desa pelbagai hal, pertama, mengusahakan status pegawai negeri bagi mereka, kedua, menuntut suatu penghasilan yang wajar, ketiga, mengusahakan semacam uang duka bagi pejabat desa yang pernah diteror oleh gerombolan-gerombolan seperti DI-TII". Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam Donald Hindley, "Political Power and the October 1965 Coup in Indonesia", *The Journal of Asian Studies*, (Vol. XXVI, No. 2, February 1967), hlm. 170 – 171.

atau dapat dimajukan ke muka;⁸⁵ dan ketiga pemuda-pemuda menjaga desa, eks gerilyawan, mahasiswa yang gagal, guru sekolah, orang-orang berpendidikan barat yang memberontak terhadap tradisi desa.

3.3 Pembentukan Organisasi *Onderbouw* PKI

Langkah yang dilakukan PKI dalam mencari dukungan massa adalah dengan mengenali berbagai aspek kehidupan petani dalam hubungannya dengan masalah agraria. Dalam hal ini, PKI menjalankan salah satu program utama, yakni dengan mengirimkan kader-kader partai ke pedesaan. Mereka mengadakan diskusi, konsolidasi serta meluaskan jaringan organisasi yang berafiliasi kepada PKI sebagai kegiatan pokok partai.

Selain organisasi yang didasarkan kepada fungsi organ-organ PKI, terdapat juga organisasi yang didasarkan kepada tugas seseorang atau kelompok. Petani digerakkan melalui organisasi pemuda, wanita, buruh (tani), nelayan, dan sebagainya. Organisasi yang terbentuk adalah Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Indonesia (SAKTI), dan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI). Dibentuk pula organisasi untuk pamong desa, yakni Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) yang semula merupakan organisasi non-komunis, tetapi sejak 1951 dikuasai PKI.

⁸⁵ PKI juga menguasai organisasi Persatuan Marhaenis Indonesia (PERMAI). Sebagai organisasi politik bagi golongan abangan, Permai dikuasai karena meliputi beberapa golongan, Clifford Geertz menyebutkan bahwa: "Permai mewakili tiga macam kelompok yakni dukun-dukun yang terkenal; golongan kepercayaan (agama) abangan dan ketiga, ...golongan orang desa radikal... Clifford Geertz, 1963, hlm. 113.

Segala usaha yang dibentuk untuk kepentingan petani di desa-desa sebenarnya telah diorganisir oleh Aidit sejak 1951. Hal ini terbukti dari pernyataannya: “Usaha ini gamblang dapat dilihat dalam pembentukan Front Persatuan Tani (FPT) pada tanggal 2 Juli 1951 dengan organisasi-organisasi intinya Barisan Tani Indonesia (BTI), Rukun tani Indonesia (RTI), dan Serikat Tani Indonesia (SAKTI) dengan program dan tuntutan bersama”.⁸⁶

Dengan tindakan ini, PKI memiliki organisasi yang dapat dipakai sebagai alat untuk memasuki berbagai kegiatan hidup di pedesaan dan menjadikan petani sebagai kader militan untuk menarik dukungan yang luas. Dalam tingkat perjuangan ini, kader adalah penggerak organisasi yang dapat diharapkan. Untuk tujuan itulah, FPT mengorganisir pendidikan kader bersama pada Desember 1952. Berdasarkan materi-materi yang telah diberikan dalam pendidikan RTI pada Juni 1952, maka terbentuklah sekolah kader-kader organisasi tani PKI.⁸⁷ Kader-kader inilah yang nantinya akan diambil untuk bekerja di desa-desa. Segala biaya yang dibutuhkan dalam pendidikan ini ditanggung bersama oleh petani dan iurannya diserahkan kepada BTI.

Front Persatuan Tani (FPT) memiliki kelemahan pokok, yaitu masih merupakan gabungan dari berbagai organisasi tani. Untuk mencapai bentuk yang satu dan merupakan faham serta pendirian dari komunisme, maka pada permulaan tahun

⁸⁶ Lihat: Harian *Kompas*, tanggal 15 April 1967 yang dikutip oleh Arbi Sanit, *ibid.*, hlm. 147. Lihat juga Djarot, “Organisasi-organisasi Tani Perlu Dipersatukan”, dalam *Bintang Merah*, Tahun ke-VIII, Desember, 1952, hlm. 171–174.

⁸⁷ Mengenai pendidikan kader ini selanjutnya dapat dibaca dalam Ruth McVey, “Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution”, *Indonesia*, Vol. 50, 25th Anniversary Edition, Oktober 1990.

1953, RTI mengusulkan penyatuan semua organisasi-organisasi tani, yaitu: BTI, SAKTI, dan RTI sendiri agar bergabung.⁸⁸ Akhirnya, tercapai pembentukan berbagai organ tersebut menjadi satu dengan nama BTI berdasarkan hasil rapat RTI dan BTI yang berlangsung dari tanggal 14 – 20 September 1953.⁸⁹ SAKTI baru menggabungkan diri pada Juni 1955. Dengan demikian, petani mempunyai organisasi yang lebih kuat dan dapat menghasilkan kebijaksanaan yang tunggal. Hal itu juga menguntungkan PKI untuk melakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif.

Sebagai organisasi utama bagi petani yang berhasil dibentuk oleh PKI, BTI diorganisasikan dengan struktur sebagai berikut: kekuasaan tertinggi terletak pada Kongres Nasional BTI yang diadakan sekali dalam 4 tahun; konferensi ini akan sah apabila dihadiri oleh utusan-utusan konferensi daerah, sekurang-kurangnya dua-pertiga dari semua Dewan pimpinan Daerah (DPD) yang harus bertanggung jawab kepada Konferensi Daerah dan DPP; DPD berperan dalam mengurus daerah tingkat provinsi dan mengawasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC). DPC ini memiliki peran dalam mengorganisir petani dalam daerah suatu kabupaten.⁹⁰

Gerakan koperasi di kalangan petani juga berhasil dibentuk oleh PKI. PKI berusaha mendirikan dan mengembangkan koperasi tani. Bentuk koperasi desa yang didirikan adalah koperasi produksi, konsumsi, dan kredit. PKI menggerakkan usaha

⁸⁸ Selengkapnya dapat dibaca dalam S. Takdir Alisyahbana, *Revolusi Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966, hlm. 95.

⁸⁹ Karl Pelzer, *Sengketa Agraria, op.cit.*, hlm. 83.

⁹⁰ DH. Burger, *Structural Change In Javanese Society: The Supra Village Sphere*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1956, hlm. 150.

koperasi atas keputusan “Koperasi Tani Nasional PKI” yang berlangsung pada 1951.⁹¹ Hasil keputusan tersebut menyatakan kesimpulan untuk menghilangkan antipati petani kepada koperasi. Kesimpulan yang telah diambil PKI ini disebabkan koperasi dapat dipakai untuk memperkuat pengaruh partai dan koperasi merupakan sistem yang dekat kepada sosialisme. Sebagai usaha sosialisme, usaha perkoperasian perlu digiatkan sebab petani telah mempunyai kecurigaan kepada koperasi.⁹² Namun, dalam perkembangan selanjutnya, PKI kembali menggiatkan “Koperasi Pekerdja”, bersamaan dengan Konferensi Nasional Tani I pada 1959 yang memiliki tiga agenda pokok yakni masalah tani, masalah nelayan, dan masalah koperasi.⁹³

3.4 Pemilu 1955 dan 1957/1958⁹⁴

Setelah menggulirkan gagasan menggalang Front Persatuan Nasional dan melakukan langkah politik melalui parlemen, PKI ambil bagian dalam Pemilihan Umum.⁹⁵ Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan Konstituante itu dilakukan dengan beberapa tahap pelaksanaan. Pemilu untuk memilih anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September. Pemilu untuk memilih anggota

⁹¹ Lihat: Donald Hindley, *The PKI and The Peasant, Problem of Communism*, Vol. XI, No. 9, September, 1964, hlm. 29 yang dikutip oleh Arbi Sanit, *op.cit.*, hlm. 143.

⁹² Koperasi pernah dibentuk oleh badan resmi (pemerintahan desa), maupun badan-badan swasta lainnya, seperti partai, telah berusaha membentuk koperasi. Tapi pada kenyataannya jalannya tidak baik atau kampanye yang kurang menarik dan kurang meyakinkan bagi petani. *Ibid.*, hlm. 144. Lihat pula CC PKI, *Surat Terbuka Kepada Kaum Komunis dan Rakyat Indonesia dalam CC PKI*, Bahan Kongres PKI, Jakarta: Depagitro CC PKI, 1957, hlm. 74 yang dikutip oleh Arbi Sanit.

⁹³ Lebih lengkapnya dapat dibaca dalam *Bintang Merah*, No. Konfernas Tani, *op.cit.*

⁹⁴ Pemilu DPR dan Komstituante masing-masing dilakukan pada tanggal 29 September dan 15 Desember 1955. Sedangkan Pemilu DPRD Tingkat I dan II Jawa Timur dilakukan pada tanggal 29 Juli 1957. Di beberapa daerah ada yang melangsungkan pemungutan suara ulang pada tahun 1958 karena terjadi kekeliruan dan kecurangan. Arsip PB NU No.76.

⁹⁵ Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia (1951 – 1963)*, *op.cit.*, hlm. 218.

Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Sedangkan Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan pada tahun 1957 dan 1958, tergantung masing-masing daerah.

Sebelum pelaksanaan Pemilu 1955, PKI dihadapkan kepada permasalahan nama daftar dan tanda gambar yang mereka pakai dalam Pemilu yang telah disetujui oleh Panitia Pemilihan Indonesia. PKI memakai jargon “PKI dan orang-orang yang tak berpartai” serta memakai tanda gambar palu dan arit. Hal itu mendapat protes dari berbagai institusi dan partai politik. Mereka menganggap bahwa jargon itu dapat menguntungkan PKI karena jumlah orang yang tak berpartai lebih banyak dibandingkan dengan orang yang menjadi anggota partai. Protes itu antara lain dilakukan oleh lembaga seperti HMI, GP Anshor, dan GPII.⁹⁶ Protes resmi juga disampaikan oleh berbagai partai politik seperti NU dan Masyumi. PB NU juga mengajukan surat kepada para kader mereka yang berada dalam Kabinet untuk memperjuangkan agar hal tersebut ditinjau kembali dalam sidang-sidang kabinet.⁹⁷ Masyumi, dalam keterangan yang disampaikan oleh Jusuf Wibisono melakukan protes yang menyatakan bahwa cara PKI bertentangan dengan UU No.7/1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Pemerintah No.9/1954. Disampaikan pula bahwa dengan melakukan hal tersebut berarti PKI “memperokosa” kebebasan dan kemerdekaan orang yang tidak berpartai

⁹⁶ Berdasarkan surat pernyataan PB HMI, PP GP Anshor, dan GPII Jatim yang ditujukan kepada Presiden RI. Arsip Kabinet Presiden 1950 – 1959 No.941a dan No. 792.

⁹⁷ Berdasarkan Surat PB NU tanggal 10 Juni 1954 No.3060/Int/VI/-'54 perihal Peninjauan kembali tanda gambar PKI dalam Pemilu yang akan datang. Surat itu ditujukan kepada kader NU yang berada dalam kabinet yaitu Zainul Arifin, KH. Masjkur, dan Moh.Hanafiah. Arsip PB NU.

dengan “mendefaktokan” orang yang tidak berpartai untuk masuk ke dalam lingkungan salah satu golongan.⁹⁸

Menyikapi berbagai protes tentang nama daftar dan tanda gambar PKI yang dilakukan oleh berbagai elemen, PKI melalui Keterangan Pers Sekjen DN. Aidit membantah tuduhan pelanggaran UU No.7/1953 serta memberikan keterangan mengenai hal tersebut. Dalam keterangannya, Aidit menyampaikan

...bahwa tjara PKI samasekali tidak bertentangan dengan undang-undang manapun, tjara PKI djustru menurut ketetapan undang2. Undang2 No.7/1953, Bab VI, fasal 36, tentang sjarat2 pentjalonan, menerangkan bahwa ada dua macam daftar tjalon, jaitu daftar-perseorangan dan daftar-kumpulan. Daftar jang diadjukan oleh partai2 dan organisasi2 pada hakekatnja adalah daftar-kumpulan. Dalam keterangan mengenai daftar-kumpulan tidak ada keterangan mengenai larangan anggota2 partai mengadjukan satu daftar-kumpulan bersama2 dengan orang tak berpartai. Oleh karena itu, djelas sekali bahwa undang2 memungkinkan daftar-kumpulan daripada anggota2 sesuatu Partai dengan orang2 tak berpartai, djadi djuga memungkinkan daftar-kumpulan “PKI dan orang tak berpartai”.⁹⁹

Selain itu, PKI juga mulai kembali melakukan kegiatan di kalangan petani yang terhenti setelah pemberontakan Madiun dipadamkan.¹⁰⁰ Menjelang pemilu, PKI mengangkat persolan kemiskinan dan kehidupan rakyat yang buruk karena kekuasaan imperialisme yang masih berlanjut atas perekonomian Indonesia. PKI juga

⁹⁸ Pernyataan Aidit yang mengutip protes dari Masyumi. Berdasarkan keterangan pers DN. Aidit. Surat CC PKI tanggal 14 Juni 1954 No.554/osi.54 yang ditujukan kepada Dr. Ir. Sukarno, Presiden RI. Arsip Kabinet Presiden, *op.cit.*, No.796. Selain itu, beberapa pimpinan cabang Masyumi juga melakukan protes. Antara lain dilakukan oleh Masyumi Cabang Sidoarjo dan Tuban, Jawa Timur. *Ibid.*, No.792.

⁹⁹ Keterangan pers DN. Aidit. Surat CC PKI tanggal 14 Juni 1954, *ibid.* Aidit juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan PKI sebenarnya tidak jauh berbeda dengan partai-partai politik lainnya yang menggunakan berbagai jargon. Antara lain PNI yang memakai nama daftar “Front Marhaenis” dan Partai Murba yang memakai nama daftar “Murba pembela proklamasi. Menurut Aidit, hal itu bukan berarti bahwa orang yang mengaku marhaenis akan memilih PNI. Begitu juga dengan orang yang membela proklamasi bukan berarti harus memilih Partai Murba.

¹⁰⁰ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955*, *op.cit.*, hlm. 14.

mengangkat isu kelangkaan garam serta kenaikan harga beras dan minyak goreng pada pekan-pekan sebelum 29 September. Peran partai komunis dalam kaitan dengan Kabinet Ali dan partai-partai yang diwakili di dalamnya menciptakan keadaan khusus sepanjang menyangkut isu-isu pemilihan umum. Kaum komunis cepat mendukung setiap upaya partai-partai pemerintah untuk menggambarkan oposisi sebagai golongan yang tidak setia. Kaum komunis juga menjadi pelopor kampanye yang mengaitkan Masyumi dengan Darul Islam di satu sisi, dan dengan kepentingan perkebunan dan pertambangan asing di sisi lain. PKI mempertentangkan keputusan PKI pada November 1954 untuk menerima Pancasila sebagai dasar politik Republik Indonesia dengan mengusulkan adanya perubahan dengan kritik yang dilontarkan oleh Masyumi atas dasar Negara itu.¹⁰¹

Masalah tanah merupakan hal yang penting dalam kampanye PKI di beberapa daerah yang luas dan besar. PKI dan BTI selalu memperjuangkan kepentingan penggarap liar di semua daerah perkebunan dan di berbagai daerah bukan perkebunan, termasuk sebagian besar kawasan di pulau Jawa yang berbatasan dengan hutan pemerintah. Partai itu menjanjikan pembagian tanah di berbagai daerah, dan di sebagian daerah tersebut tanah dijanjikan kepada mereka yang memilih PKI atau BTI. Hal itu mengakibatkan timbulnya ketegangan sosial di beberapa wilayah pedesaan terutama di Jawa.

Metode lain kampanye PKI yang melampaui partai-partai lain adalah kegiatan kesejahteraan sosial. Bagi partai komunis, kegiatan semacam itu dimaksudkan tidak

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 19.

hanya untuk menang dalam pemilihan umum, tetapi juga untuk membangun basis massa yang lebih permanen. Kegiatan inilah yang membedakan PKI dengan partai-partai lain yang umumnya mencontoh PKI. Dengan menggunakan slogan “kegiatan kecil tapi bermanfaat”, aktivis PKI di desa-desa, Kegiatan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh PKI antara lain membersihkan kampung/ kerja bakti, membangun dan memperbaiki jembatan, membuat tempat MCK, membangun saluran air, dan membantu kegiatan pernikahan, orang melahirkan, dan penguburan.¹⁰² PKI juga menggunakan acara hiburan tradisonal masyarakat Jawa sebagai alat kampanye mereka. Acara hiburan rakyat seperti tarian, pertunjukan wayang, dan *ludruk* diselengi oleh orasi politik kader PKI.¹⁰³ Selain kegiatan sosial dan non-politik tersebut, PKI juga melakukan tuntutan-tuntutan politik lokal. Kegiatan dalam melakukan tuntutan-tuntutan politik lokal antara lain menurunkan sewa tanah dan suku bunga utang, serta memperbaiki pembagian air desa.

Sebagian kampanye tidak menyangkut masalah-masalah umum sebagai bangsa, melainkan dengan partai itu sendiri khususnya mengenai sejarahnya, pemimpinnya, dan tanda gambarnya. Semua partai besar menekankan peranannya dalam perjuangan nasional, terutama sumbangannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945 – 1949. Perayaan ulang tahun menjadi keharusan bagi PKI, PNI, dan PSII. Masing-masing menekankan kesinambungan sejarahnya dengan partai bernama sama yang mashur pada zaman sebelum perang.

¹⁰² Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia (1951 – 1963)*, *op.cit.*, hlm. 221.

¹⁰³ *Ibid.*

Dalam kampanye komunis, kewibawaan tokoh sebagai “bapak” yang disegani diganti dengan mutu sang tokoh sebagai “saudara” dan “kawan” yang memahami rakyat karena dia juga berasal dari rakyat. Partai-partai yang menempatkan pemimpin tunggal pada tempat teratas dalam daftar calon seperti PKI, Masyumi, dan PSI misalnya menonjolkan ciri-ciri pribadi pemimpin bersangkutan. Di tingkat desa, kampanye umumnya juga menonjolkan ciri-ciri pribadi tokoh-tokoh desa.

Dalam berkampanye, PKI sangat giat memperagakan lambangnya. Sejak awal PKI sudah unggul dalam hal ini dan terus mempertahankan keunggulan itu selama masa kampanye. Lebih jauh lagi, papan-papan peraga lambang partai ini banyak bertebaran di kota-kota besar dan kecil. Sangat banyak papan peraga buatan pabrik yang terbuat dari besi pelat dengan ukuran dan isi yang seragam. PKI juga tidak tertandingi dalam daya cipta memanfaatkan apa saja untuk memperagakan tanda gambarnya seperti dari layang-layang hingga dekorasi panggung pertunjukkan desa. Selain itu, PKI membuat pamflet dan brosur untuk dijual atau dibagikan secara massal.

PKI membuat kartu anggota untuk melakukan rekrutmen dan menggalang dukungan massa. Anggota partai ini terdiri dari dua golongan anggota yang sudah ada yaitu anggota penuh dan calon anggota yang ditambah golongan anggota baru yaitu anggota pencinta. Jumlah anggota ini seluruhnya yaitu 7910 pada awal tahun 1952, 165.206 pada Maret 1954, dan meningkat menjadi 1.000.000 pada Februari 1956.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

Dalam masa kampanye juga terdapat laporan mengenai intimidasi. Laporan-laporan mengenai intimidasi pada tahap akhir kampanye dan pada hari pemungutan suara datang dari hampir seluruh penjuru Indonesia. Salah satu wilayah yang memiliki intensitas intimidasi yang cukup banyak yakni di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah.¹⁰⁵ Bentuk-bentuk intimidasi yang digunakan di wilayah-wilayah bergolak tidak banyak diketahui.¹⁰⁶ Salah satu informasi yang didapatkan penulis antara lain penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh oknum PKI terhadap beberapa pemimpin NU yang mereka tuduh melakukan korupsi. Bahkan pada saat kampanye, diantara mereka ada yang membawa poster yang bergambar orang-orang yang tersangkut masalah korupsi. Poster itu disandingkan dan dibandingkan dengan tokoh-tokoh PKI yang tidak tersangkut tuduhan masalah korupsi.¹⁰⁷

Pemilihan Umum 1955 dibagi menjadi dua tahap pemilihan, yakni yang dilakukan pada tanggal 29 September untuk pemilihan anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk pemilihan anggota konstituante. Dalam perolehan suara Pemilu di tingkat nasional, PKI memperoleh suara terbesar keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Pada pemilu parlemen, PKI memperoleh suara sebesar 6.176.914 atau

¹⁰⁵ Intimidasi dilakukan oleh lurah-lurah PNI dan pembantu mereka, dari tingkat yang lebih rendah dilakukan oleh orang-orang Komunis penjaga keamanan desa. *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁰⁶ Terdapat informasi mengenai berbagai bentuk intimidasi dari yang keras sampai yang halus dan menguntungkan Komunis serta PNI. Begitu juga sebaliknya, intimidasi juga terjadi ketika pemuda-pemuda Komunis yang bersenjata pisau dan pentungan untuk tugas pengamanan desa bergerak dari rumah ke rumah pada malam hari mengumpulkan tandatangan dan cap ibu jari keanggotaan organisasi-organisasi front komunis, atau mengancam menculik orang-orang yang tidak memilih palu arit. *Ibid.* hlm. 69.

¹⁰⁷ Surat PW NU Jawa Timur yang ditujukan kepada PB NU di Jakarta. Surat No.127/A/Tanf./PW/IX-57 tanggal 20 September 1957 perihal Laporan Situasi Pemilihan DPRD Jawa Timur. Arsip PB NU No.76.

16,4% dari persentase keseluruhan suara. Sedangkan dalam pemilu konstituante, PKI memperoleh suara sebesar 6.232.512, atau memperoleh tambahan dibandingkan pemilu parlemen.¹⁰⁸ Dalam Pemilu DPR 1955 di Jawa Timur, dibandingkan dengan PNI dan gabungan partai Islam (Masyumi, NU, dan PSII), PKI memperoleh kemenangan di Karesidenan Madiun dan Kediri. Posisi dua ditempati PKI di Karesidenan Bojonegoro dan Surabaya.

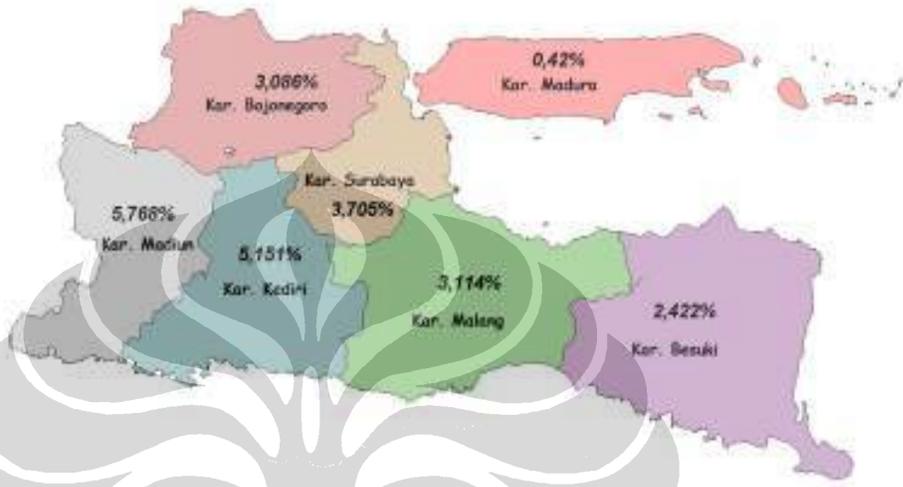
**Tabel Perolehan Suara
Hasil Pemilihan Umum DPR tahun 1955 di Jawa Timur**

Daerah	Masy, NU, PSII		PKI		PNI		Lain-lain		Jumlah	
	Pemilih	%	Pemilih	%	Pemilih	%	Pemilih	%	Pemilih	%
Kresid Madiun	305,501	3.09	569,625	5.75	322,608	3.26	109,047	1.10	1,197,746	12.10
Kresid Kediri	442,054	4.47	508,597	5.14	478,756	4.84	137,248	1.39	1,666,405	16.84
Kresid Bojonegoro	522,973	5.28	304,757	3.08	168,243	1.70	57,553	0.58	1,053,526	10.64
Kresid Malang	847,416	8.56	307,546	3.11	501,434	5.07	151,239	1.53	1,807,635	18.26
Kresid Besuki	883,729	8.93	239,137	2.42	391,942	3.96	108,380	1.09	1,623,188	16.40
Kresid Surabaya	641,048	6.48	365,852	3.70	297,700	3.01	163,775	1.65	1,583,505	16.00
Kresid Madura	735,628	7.43	4,084	0.04	90,336	0.91	99,484	1.01	966,060	9.76
Jawa Timur	4,378,349	44.23	2,299,598	23.23	2,251,019	22.74	826,726	8.35	9,898,065	100.00

Sumber: Arbi Sanit, *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 191.

¹⁰⁸ Herbert Feith, 1999, *Op.Cit.*, hlm.84 dan 94.

**Peta Persentase Persebaran Suara PKI
Hasil Pemilihan Umum DPR tahun 1955 di Jawa Timur**



Diolah dari Arbi Sanit., *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hal. 191.

Berbeda dengan perolehan suara di tingkat nasional yang menempatkan PKI di posisi empat besar, di daerah pemilihan Jawa Timur PKI justru mengalami peningkatan. PKI mendapatkan suara terbesar kedua setelah NU dalam pemilu parlemen dan suara terbesar ketiga setelah NU dan PNI dalam pemilu konstituante. Dalam pemilu parlemen, PKI mendapatkan suara sebesar 2.299.602 atau 23,3% dari total suara. Perolehan suara PKI berada di bawah NU yang mendapatkan suara sebesar 3.370.000. Sedangkan dalam pemilu konstituante, PKI mendapatkan suara sebesar 2.266.801 di bawah NU dan PNI yang masing-masing mendapatkan suara sebesar 3.260.392 dan 2.329.991.¹⁰⁹ Dalam Pemilu DPRD Jawa Timur yang mulai

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

dilakukan pada tanggal 29 Juli 1957, PKI kembali memperoleh peningkatan suara yang sangat signifikan. Perolehan suara PKI melonjak menjadi 2.952.555 suara atau 29,3% dari total suara.¹¹⁰

Kemenangan itu memberikan gambaran bahwa daerah pedesaan Jawa Timur merupakan salah satu basis PKI terkuat dan potensial. Keberhasilan itu didukung pula dengan kondisi dalam negeri yang sangat menguntungkan PKI karena banyaknya pemberontakan. Ketidakstabilan kabinet dalam kerangka demokrasi parlementer pada masa itu membantu PKI dalam menanjak ke puncak kekuasaan. Berkat kemenangan dalam Pemilu 1955 dan 1957/1958, PKI menjadi salah satu kekuatan sosial politik terbesar.

Kemenangan itu menambah keyakinan para pemimpin PKI bahwa revolusi sosial sebagai lanjutan dari Revolusi Agustus 1945 dapat mereka realisasikan. Untuk tujuan itu, PKI menyambutnya dengan berbagai persiapan, baik yang bersifat filosofis, teoretis, yuridis, maupun teknis organisatoris. Pada tahun 1957, CC PKI menerbitkan brosur berjudul ABC Revolusi Indonesia sebagai diktat pegangan kader-kader. Diktat ini dipegang di tingkat seksi (kabupaten) dan subseksi (kecamatan) yang merupakan ujung tombak partai yang berhadapan langsung dengan massa rakyat.

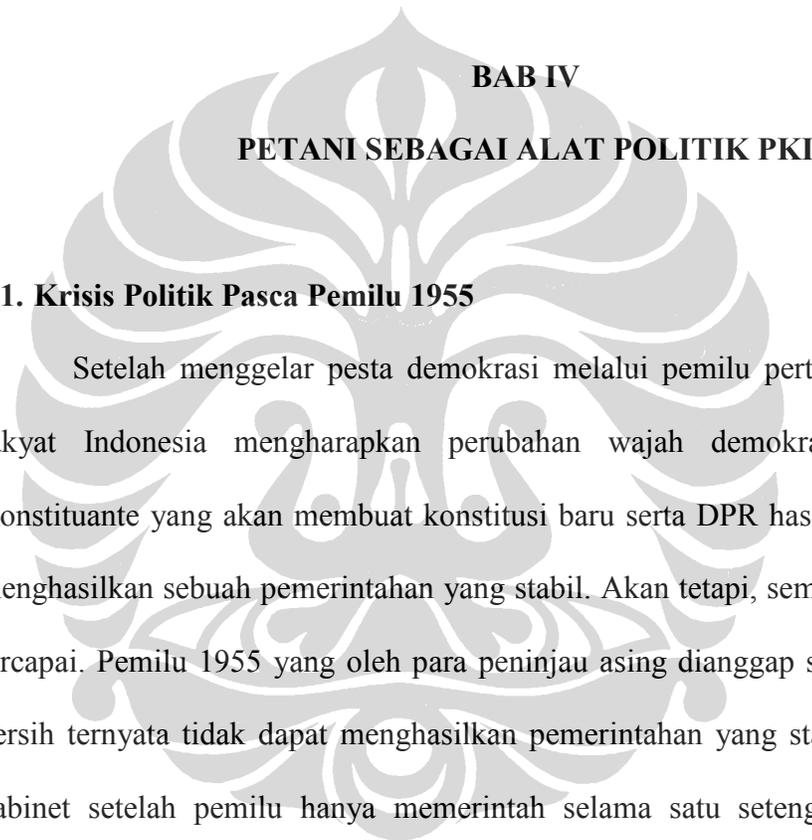
Dalam diktat itu dijelaskan secara singkat tentang hakikat revolusi rakyat, sasaran revolusi, tugas-tugas revolusi, tenaga penggerak, watak dan hari depan

¹¹⁰ Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia (1951 – 1963)*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966, hlm. 223.

revolusi Indonesia. Karena sasaran revolusi adalah melenyapkan imperialisme dan sisa-sisa feodalisme, maka kedua “kaum” itu ditetapkan sebagai musuh yang harus dibasmi dalam revolusi sosial. Kaitannya dalam hal itu, tanah dianggap sebagai faktor produksi sekaligus sebagai alat penghisap paling pokok. Karena itulah, menurut PKI revolusi sosial akan terjadi melalui revolusi agraria. Dalam penutupnya PKI menegaskan bahwa hari depan revolusi Indonesia adalah sosialisme dan komunisme.¹¹¹



¹¹¹ Dikutip oleh Aminudin Kasdi dari Depagitprop CC PKI, ABC Revolusi Indonesia, Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1957, hlm. 11 – 12, Aminudin Kasdi, *op.cit.*, hlm. 121.



BAB IV

PETANI SEBAGAI ALAT POLITIK PKI

4.1. Krisis Politik Pasca Pemilu 1955

Setelah menggelar pesta demokrasi melalui pemilu pertama di tahun 1955, rakyat Indonesia mengharapkan perubahan wajah demokrasi melalui Badan Konstituante yang akan membuat konstitusi baru serta DPR hasil Pemilu yang akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang stabil. Akan tetapi, semua harapan itu tidak tercapai. Pemilu 1955 yang oleh para peninjau asing dianggap sebagai pemilu yang bersih ternyata tidak dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil karena rata-rata kabinet setelah pemilu hanya memerintah selama satu setengah tahun. Sebelum Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 tentang kembali ke UUD 1945, masa empat tahun setelah pemilu mengalami tiga masa kabinet yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956), Kabinet Ali Satroamidjojo II (Maret 1956 – Maret 1957), dan Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959).¹¹²

¹¹² Nugroho, SNI Jilid VI, *op.cit.*, hlm. 220.

Setelah Pemilu juga terjadi banyak pemberontakan dan pergolakan di daerah yang sebagian besar alasan diantaranya karena ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat.¹¹³ Gerakan-gerakan daerah yang mendapat dukungan dari beberapa panglima militer itu membentuk dewan-dewan daerah antara lain Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Medan, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Manado.¹¹⁴ Hal itu juga dipicu atas respon mereka terhadap pidato Presiden dalam peringatan Sumpah Pemuda yang berniat membubarkan partai politik karena dianggapnya sebagai akar kesulitan yang dihadapi negara.¹¹⁵ Selain itu, Soekarno juga mengajukan konsepsi Demokrasi Terpimpin dan mengajukan pembentukan Kabinet Gotong Royong serta Dewan Pertimbangan Agung yang anggotanya terdiri dari semua partai politik dan golongan fungsional.¹¹⁶ Ide Soekarno itu ditolak oleh Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI yang berpendapat bahwa dalam mengubah sistem ketatanegaraan secara radikal harus diarahkan kepada Konstituante. Hal tersebut memicu meningkatnya suhu politik. Di tengah situasi itu dan ditambah pergolakan daerah yang semakin meningkat dengan adanya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) dan “Perjuangan Rakyat

¹¹³ Ketidakpuasan yang dimaksud terutama karena masalah alokasi biaya pembangunan yang diterima daerah dari pemerintah pusat.

¹¹⁴ Pembentukan dewan-dewan daerah tersebut tidak dalam waktu yang bersamaan. Dewan Banteng dibentuk oleh Letkol Achmad Husein pada tanggal 20 Desember 1956, Dewan Gajah oleh Kolonel Maludin pada tanggal 22 Desember 1956, Dewan Garuda dibentuk oleh kelompok golongan politik yang mempengaruhi militer dan selanjutnya dipimpin oleh Mayor Nawawi. Serta Dewan Manguni yang dibentuk oleh Letkol Ventje Sumual pada tanggal 18 Februari 1957. *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 224 – 225.

¹¹⁶ *Ibid.*

Semesta” (Permesta)¹¹⁷ membuat Presiden mengumumkan Keadaan Darurat Perang (SOB).¹¹⁸

Setelah pemberlakuan keadaan darurat perang, terbentuklah Kabinet Djuanda atas dasar penunjukkan formatur Soekarno.¹¹⁹ Kabinet Djuanda terbentuk pada tanggal 9 April 1957. Kabinet ini harus menghadapi berbagai persoalan seperti pergolakan di daerah, melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat, dan menghadapi buruknya keadaan ekonomi. Salah satu program Kabinet Djuanda yakni membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional mempunyai fungsi untuk menampung dan menyalurkan keinginan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga mempunyai tugas sebagai penasehat untuk melancarkan jalannya rodanya pemerintahan dan menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara.¹²⁰ Periode selanjutnya sepanjang tahun 1957 – 1959, pemerintah masih menghadapi berbagai pergolakan di daerah yang semakin memburuk. Selain itu juga

¹¹⁷ Karena merasa tidak ada respon dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat sesuai dengan harapan dan tuntutan mereka, pergolakan daerah itu meningkat menjadi upaya melepaskan diri dari pemerintah pusat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Achmad Husein selaku Ketua Dewan Banteng (Sumatera Tengah) memproklamkan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Hal itu lalu diikuti kemudian oleh dewan-dewan daerah lain yang bergabung ke dalam PRRI atau membuat “Perjuangan Rakyat Semesta” (Permesta). *Ibid.*, hlm. 280.

¹¹⁸ Sebelum pemberlakuan keadaan darurat perang, Kabinet Ali II mengembalikan mandatnya kepada Presiden karena berbagai peristiwa pergolakan yang melemahkan kedudukan kabinet.

¹¹⁹ Presiden menunjuk Soekarno sebagai warga negara sebagai formatur yang membentuk Kabinet Karya (*Zaken Kabinet*) di bawah Perdana Menteri Djuanda. Hal itu dilakukan Presiden karena usulannya kepada partai untuk membentuk pemerintahan baru kembali memperlihatkan politik dagang sapi dalam membentuk kabinet koalisi yang dalam pengalaman sebelumnya selalu berganti-ganti.

¹²⁰ Dewan Nasional memiliki 45 orang anggotadari golongan fungsional dan dipimpin oleh Soekarno sendiri. Dalam prakteknya, Dewan Nasional ini tidak lebih sebagai alat Soekarno untuk “bermain” dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi Dewan Nasional digantikan dengan Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional yang dibentuk pasca Dekrit Presiden 1959. Nugroho, *SNI Jilid VI, op.cit.*, hlm. 277 – 278. Lihat juga M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*, Jakarta: Serambi, 2005, hlm. 526.

masih alotnya perdebatan dalam Badan Konstituante yang urung menghasilkan konstitusi baru.¹²¹

4.2. Demokrasi Terpimpin dan Kaum Tani

Pada tanggal 22 April 1959 di hadapan Konstituante, Soekarno berpidato menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945 karena upaya membuntuk konstitusi baru selama ini mengalami kebuntuan. Akhirnya pada tanggal 5 Juli Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi. Pada tanggal 16 Desember, Soekarno kembali mengumumkan negara dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1959.¹²² Mulai saat itu, kekuasaan Soekarno semakin kuat.

Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban Soekarno atas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta garis besar kebijaksanaan Presiden Soekarno dalam mencanangkan sistem Demokrasi Terpimpin.¹²³ Oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pidato itu diusulkan kepada Presiden agar menjadi garis-garis besar haluan negara dan dinamakan menjadi “Manifesto Politik”. Hal tersebut direspon MPRS dalam sidangnya tahun 1960 dengan Ketetapan MPRS

¹²¹ Walaupun dengan kondisi seperti itu, Pemilu DPRD di beberapa provinsi tetap berjalan walaupun diwarnai dengan berbagai pengunduran jadwal, propaganda kampanye yang dikaitkan dengan isu politik pergolakan dan pemberontakan, dan sebagainya.

¹²² Dokumen “Amanat PJM Presiden Berhubung dengan Pernyataan Negara dalam Keadaan Perang di Djakarta, 16 Desember 1959”, Sekretariat Negara, nst.679/65. Tjetakan ke-II. Arsip Kabinet Presiden RI (1950 – 1959) No.133 B.

¹²³ Arsip Pidato Presiden RI (1958 – 1967) No.100, “Pidato Presiden tentang Penemuan Kembali Revolusi Kita”, 17 Agustus 1959.

No.1/MPRS/1960 yang menetapkan Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam ketetapan itu juga diputuskan bahwa pidato Presiden yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita/ Jarek” dan pidato Presiden di depan sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960 sebagai pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.¹²⁴

Setelah pemberlakuan sistem Demokrasi Terpimpin, Soekarno seringkali berpidato tentang pentingnya revolusi dan gerakan yang mendukung hal tersebut.¹²⁵ Dalam pidato tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dan selanjutnya menjadi Manifesto Politik (Manipol), Soekarno mengusulkan pembentukan Front Nasional yang dimaksudkan sebagai organisasi massa untuk menggerakkan masyarakat dalam upaya menuju penyelesaian Revolusi.¹²⁶ Front Nasional lalu dibentuk melalui Penetapan Presiden No. 13 tahun 1959. Front Nasional dipimpin langsung oleh Soekarno.¹²⁷ Pembentukan Front Nasional sebagai organisasi massa¹²⁸ ini dalam perkembangannya digunakan Soekarno sebagai alat gerakan kampanye revolusi. Massa yang diandalkan sebagai “motor” gerakan adalah massa buruh dan tani.

¹²⁴ Nugroho, SNI Jilid VI, *op.cit.*, hlm. 314.

¹²⁵ Hal itu dapat dilihat dari berbagai pidato Soekarno dalam Arsip Pidato Presiden (1958 – 1967).

¹²⁶ Berdasarkan Keputusan DPA No.3/Kpts/Sd/II/59 tentang perincian Manipol dalam *Pantjawarsa Manipol, op.cit.*, hlm. 29.

¹²⁷ Nugroho, SNI Jilid VI, *op.cit.*, hlm. 316.

¹²⁸ Tentang Front Nasional sebagai organisasi massa ditegaskan Presiden Soekarno dalam amanatnya saat pelantikan Pengurus Besar Front Nasional di Istana Negara tanggal 8 September 1960. Arsip Kabinet Presiden RI (1950 – 1959) No. 213.

Dalam Pidato Presiden pada acara Resepsi Penutupan Kongres PKI ke-VI, Soekarno menyatakan:¹²⁹

“...di dalam penjelenggaraan masyarakat adil dan makmur, kaum buruh dan kaum tani lah yang harus menjadi motor. Kaum buruh dan kaum tani. Soko guru, Saudara-saudara, kaum buruh dan kaum tani daripada masyarakat adil dan makmur. Kaum buruh dan kaum tani yang jumlahnya lebih dari 90% daripada rakyat Indonesia, mereka ini sokoguru daripada masyarakat adil dan makmur, mereka ini sokoguru daripada masyarakat sosialisme a’la Indonesia...”

Manipol memuat ketentuan khusus tentang agraria sebagai berikut:

“Demikian pula persoalan tanah. Kita mewarisi dari zaman Belanda beberapa hal yang harus kita berantas. Antara lain apa yang dinamakan “hak eigendom” tanah dari hukum pertanahan Indonesia. Tak dapat kita benarkan, di Indonesia Merdeka ada sesuatu di bidang tanah yang dieigendomi oleh orang asing in casu orang Belanda! Kita hanya kenal hak milik untuk orang Indonesia; sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945...”¹³⁰

Manipol juga memuat dasar-dasar kebijaksanaan dalam mengikut sertakan segala modal dan usaha dalam menyelesaikan revolusi nasional. Sementara Jarek mengatur lebih banyak ketentuan mengenai khusus pertanahan.

Jarek memuat dasar-dasar hukum tanah nasional sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan modal asing terhadap rakyat Indonesia, terutama kaum tani. Karena itu harus dihapuskan “hak eigendom”, wet-wet agraris bikinan Belanda, “Domeinverklaring” dan lain sebagainya;
- b. Tanah untuk kaum tani! Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah. Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk onggang-onggang menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringat orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu;

¹²⁹ Dokumen “Pidato Presiden Sukarno pada Resepsi Penutupan Kongres PKI ke-VI di Gedung Pertemuan Umum, Djakarta, 16 September 1959”, Sekretariat Negara, nst.1045/59.-. Arsip Kabinet Presiden RI (1950 – 1959) No. 116.

¹³⁰ *Pidato Presiden: Penemuan Kembali Revolusi Kita. Op.cit.*

- c. Hak milik atas tanah masih kita akui! Orang masih boleh mempunyai tanah turun temurun! Hanya luasnya milik itu diatur baik maksimum maupun minimumnya. Dan hak milik atas tanah itu kita nyatakan berfungsi sosial. Negara dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari hak milik perseorangan.¹³¹

Demokrasi Terpimpin juga menegaskan tentang *Landreform* sebagai salah satu segi pokok revolusi, serta “Tanah untuk Tani” sebagai salah satu cara melaksanakan Manipol.¹³²

Mengenai *Landreform*, Soekarno menyatakan:¹³³

“Revolusi Indonesia tanpa *landreform* adalah sama sadja dengan gedung tanpa alas, sama sadja dengan pohon tanpa batang, sama sadja dengan omong besar tanpa isi. Melaksanakan *landreform* berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari revolusi Indonesia”.

“Perombakan hak tanah dan penggunaan tanah”, “agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan chususnja taraf hidup tani meninggi dan taraf hidup seluruh rakjat djelata meningkat”

“Tanah tidak boleh mendjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal asing terhadap rakjat Indonesia.”

Mengenai “Tanah untuk Tani, Soekarno menyatakan sebagai berikut:¹³⁴

“*Landreform* di satu fihak berarti penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi colonial atas tanah, dan mengachiri penghisapan feudal setjara berangsur-angsur, dilain fihak *Landreform* berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh Rakjat Indonesia terutama kaum tani”

“Ja! Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka jang betul-betul menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka jang duduk onggang-onggang mendjadi gemuk gendut karena menghisap keringatnja orang yang disuruh menggarap tanah itu!”

¹³¹Departemen Penerangan, *Pantja Warsa Manipol*, Djakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi, 1964, hlm. 159.

¹³² Pidato Presiden yang berjudul “Djalannja Revolusi Kita” dalam *Pantjawarsa Manipol, op.cit.*, hlm. 153 dan 159.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

4.3. Program Tuntutan Minimum PKI Hasil Kongres Nasional ke-VI

Program agraria PKI yang lebih sistematis dan memiliki orientasi yang lebih strategis sebenarnya baru dapat kita lihat dalam penjabaran “Program Umum PKI” hasil Kongres Nasional PKI ke-VI pada tahun 1959. Salah satu poin program umum yang langsung terkait dengan masalah agrarian adalah program ketujuh. Dalam penjabaran program tersebut dinyatakan bahwa hubungan agraria seharusnya tidak bersifat imperialis, melainkan harus bersifat merdeka dan demokratis. Oleh sebab itu, semua tanah yang dimiliki oleh para tuan tanah harus disita tanpa ganti rugi dan dibagikan secara cuma-cuma kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tani miskin.

Selain itu, sistem kepemilikan tanah harus diubah menjadi sistem milik perseorangan kaum tani atas tanah. Sedangkan tanah-tanah hutan dan perkebunan yang memiliki teknik moderen tidak diberikan kepada kaum tani, akan tetapi harus dikuasai oleh negara. Tanah dan milik lain dari kaum tani kaya tidak disita. Begitu juga dengan tanah dan milik lain dari kaum tani sedang dilindungi oleh pemerintah. Sistem rodi, polorogo, dan perbudakan lainnya, serta hutang yang menjerat kaum tani harus dihapuskan. Kaum tani dibantu dengan sistem kredit yang panjang, mudah, dan murah. Kaum tani juga dibantu dengan sistem irigasi serta dukungan peralatan baru.¹³⁵

Berdasarkan program umum yang dibuat, PKI mengajukan “Program Tuntutan” atau yang juga sering disebut sebagai “Tuntutan Minimum” atau program

¹³⁵ CC PKI, *Tentang Program PKI*, Djakarta: Depagitprop, 1959, hlm. 46 – 47.

tuntutan yang dianggap paling mendesak untuk segera dilakukan. Program Tuntutan tersebut terdiri atas 50 poin dengan enam judul tuntutan utama yakni untuk kemerdekaan nasional, untuk hak-hak demokrasi, untuk perbaikan nasib, untuk perbaikan ekonomi, untuk kemajuan budaya, dan untuk perdamaian dunia.

Beberapa kutipan poin tuntutan yang terkait dengan masalah petani dan agraria antara lain:¹³⁶

- Perbaiki keadaan kaum tani dengan mewajibkan tuantanah² menurunkan sewatanah, sehingga kaum tani penjewa tanah menerima minimum 60% dan tuantanah menerima maximum 40% dari hasil panen, serta dengan mewajibkan lintahdarat² mendaftarkan diri dan menurunkan bunga uang pindjaman, dengan meringankan pajak² negara dan dengan menghapuskan tunggakan pajakbumi.
- Perbaiki nasib buruhtani dan lindungi hak kaum tani penjewa tanah, beri pindjaman yang mudah, langsung, pandjang dan berbunga rendah kepada petani² miskin bantu petani² mengorganisasi diri untuk mengembangkan produksi pertanian.
- Hapuskan setoran² paksa kaum tani, hapuskan sistem polorogo dan rodi serta perbaiki nasib pamongdesa.
- Sahkan milik kaum tani atas tanah jang dulunja milik perkebunan² asing tetapi jang sudah lama dikerdjakan oleh kaum tani, larang perampasan tanah² tersebut oleh pihak perkebunan, dan selesaikan sengketa² tanah dengan djalan berunding.
- Berikan dan bagikan dengan tjuma² tanah² kosong jang dikerdjakan kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.
- Sita tanah dan milik lain dari kaum tuantanah jang memihak gerombolan pengatjau kontra-revolusioner dan gerombolan² teroris lainnja, dan bagikan tanah² itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.
- Djamin hak kaum tani dan organisasi² tani dalam menentukan sewatanah kaum tani jang disewa untuk ditanami rosella, tebu, tembakau, dll.
- Laksanakan dengan sungguh² nasionalisasi tanah² partikelir dengan harga dan tjara pembajaran jang ditentukan oleh pemerintah dan bagikan tanah² sawah dan lading dari bekas² tanah² partikelir itu kepada kaum tani takbertanah dan tanimiskin.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 57 – 59.

- Djamin hak mendirikan dan mengembangkan koperasi2 dikalangan kaum buruh, kaum tani, nelayan...
- Beri hak kepada kaum tani untuk dengan latihan dan pimpinan TNI mengangkat sendjata membela diri terhadap gerombolan2 teroris jang membunuh kaum tani dan menghantjurkan desa2...
- Perteinggi panen padi, bahan2 makanan lainnja...dengan djalan memberikan bantuan kepada kaum tani berupa bibit, alat2 pertanian, rabuk, bimbingan teknis dan perbaikan pengairan.

Apabila kita mencermati program tuntutan minimum hasil Kongres Nasional PKI ke-VI, kita tidak akan menemukan perbedaan signifikan dengan apa yang dirumuskan PKI dalam Program Agraria mereka hasil Kongres Nasional ke-V tahun 1954. Program tuntutan minimum yang dibuat oleh PKI di atas pun terkesan tidak memiliki ketegasan sikap politik PKI terhadap masalah agraria (yang di dalamnya juga terkait nasib petani). Semboyan “Tanah untuk Kaum Tani” yang mulai didengungkan sejak tahun 1953 dalam kenyataannya masih memiliki fleksibilitas isu karena diantara program tuntutan minimum di atas terdapat salah satu poin yang mengangkat tentang perbaikan sewa tanah.

Strategi sewa tanah yang mereka gaungkan justru baru semakin berani diungkapkan pasca munculnya kebijakan *Landreform*. Mereka menjadikan isu *Landreform* sebagai alat gerakan taktis mereka dalam membangun kekuatan politik. Tujuan PKI untuk meraih kekuasaan dengan semangat membangun gerakan massa petani juga diperlihatkan dengan salah satu poin program tuntutan minimum yang menuntut pemberian hak kepada petani untuk menggunakan senjata dan mendapatkan pelatihan militer. Dalam perkembangan selanjutnya, ide ini diangkat PKI dalam isu

“Ganyang Malaysia” untuk membentuk “Angkatan ke-V” yang mempersenjatai kaum petani.

4.4. Pembentukan Front Nasional

Salah satu kewajiban lainnya yang penting dalam partai adalah mengenai taktik dalam memperkuat partai dan menjadikan PKI sebagai partai yang berkuasa. Hal itu dilakukan dengan cara menggalang kerjasama dalam Front Persatuan Nasional. Taktik Front Nasional ini adalah siasat yang tidak pernah ditinggalkan oleh gerakan komunis di Indonesia ketika kondisi partai ini dalam keadaan lemah. Hal itu juga dilakukan untuk mencapai tahap revolusi nasional demokratis. Dalam Front Persatuan Nasional ini, PKI bekerja sama dengan kelas borjuis nasional dan kelas-kelas lainnya. Langkah PKI ini mendapat sorotan karena dianggap bertentangan dengan teori komunisme tentang revolusi sosial. Terkait dengan hal tersebut, Aidit menyatakan bahwa program PKI tersebut akan terlaksana dengan dukungan elemen Front Persatuan Nasional. Dan ditunjukkan untuk membebaskan rakyat dari imperialisme asing dan penghisapan kaum tuan tanah terhadap buruh tani. Aidit juga menyatakan bahwa tugas PKI bukan melaksanakan komunisme atau sosialisme, tetapi melaksanakan pembebasan nasional dan perubahan-perubahan demokratis.¹³⁷

Melalui Front Persatuan Nasional, kaum buruh tani, tani miskin, dan tani sedang berada di bawah pimpinan kaum buruh dan diajak untuk melakukan revolusi

¹³⁷ Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh George T. Rice (*United Press Staff Correspondent*). *Harian Rakjat*, 24 Desember 1953.

agraria antifeodal serta mengikis habis kaum tuan tanah sisa-sisa feodalisme.

Berkaitan dengan hal ini, Aidit menuliskan:

“Tanpa partisipasi petani, Front Persatuan Nasional dengan organ PKI dalam fase Revolusi Nasional Demokratis, sebelum meningkat kepada Revolusi Rakyat Demokratis tidak mungkin kuat dan berkuasa. Tanpa partisipasi petani, Front Persatuan paling-paling hanya dapat menarik 20 sampai 30 persen rakyat...Karena itu Front Persatuan Nasional yang kuat berkuasa adalah Front Nasional yang mendasarkan kekuatannya kepada kerjasama antara buruh dan petani”.¹³⁸

Pandangan Aidit sendiri mengenai taktik PKI dalam Front Persatuan ini dapat dilihat dalam pernyataannya berikut:

“Dengan tidak ikutnya kaum tani, Front Persatuan paling banyak hanya bisa menghimpun 20 sampai 25 persen rakyat, yaitu kaum buruh, borjuis kecil, dan borjuis nasional. Sedangkan kaum tani yang jumlahnya lebih dari 70 persen dari rakyat Indonesia...”¹³⁹

Selain itu, PKI juga menyerukan agar tanah-tanah perkebunan asing, tanah partikelir, dan tanah milik tuan tanah disita. Tanah tersebut juga diberikan kepada petani tak bertanah, buruh tani atau tani miskin secara cuma-cuma sebagai hak milik perseorangan. Usaha yang dilakukan PKI ini berhasil dan terbukti dengan adanya perkembangan keanggotaan PKI.¹⁴⁰

Sasaran kampanye PKI adalah keadaan masyarakat dan perekonomian Indonesia yang dualistik. Para petani dianjurkan untuk menyerobot atau menanami tanah-tanah perkebunan asing yang terlantar. Hal yang menarik adalah ketika kaum

¹³⁸ Lihat: DN. Aidit, *Lahirnya PKI dan Perkembangannya (1920 – 1955)*, Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1955, hlm. 53.

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ Aminudin Kasdi, *Op.Cit.*, hlm. 105.

buruh, pekerja, dan buruh tani miskin di pedesaan Jawa Timur memperlihatkan ketertarikan kepada komunisme daripada nasionalisme ataupun agama, walaupun sekitar 90% mayoritas masyarakat beragama Islam. Hal ini mengakibatkan para buruh tani dan tani miskin abangan cenderung lebih mendekati PKI. PKI juga berhasil menggabungkan dua basis kekuatan yaitu buruh dan tani (miskin) sebagai kekuatan revolusioner. PKI memberikan kepercayaan kepada keduanya untuk melaksanakan dua tujuan revolusi yaitu melenyapkan imperialisme dan membasmi penindasan kelas feodal untuk mewujudkan masyarakat sosialis-komunis.

Ide tentang Front Persatuan Nasional yang merupakan taktik jalan damai PKI semakin kuat dengan dukungan Presiden Soekarno yang mengusulkan ide pembentukan Front Nasional pada tahun 1959.¹⁴¹ Front Nasional dibentuk melalui Penetapan Presiden No.13 tahun 1959. Dalam penetapan itu disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.¹⁴² Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Organisasi ini dijadikan sebagai forum organisasi politik Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Front Nasional dianggap mewakili tiga golongan di pedesaan dengan mempersatukan semangat bersama (gotong royong). Hal tersebut dilaksanakan guna menghidupkan kembali revolusi, melaksanakan sosialisme serta mendukung kepemimpinan Presiden Soekarno. Dengan demikian, kompetisi dalam revolusi telah dimulai.

¹⁴¹ Departemen Penerangan, *Pantja Warsa Manipol, op.cit.*, hlm. 29.

¹⁴² Nugroho Notosusanto, *SNI Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, hlm. 316.

Pada kenyataannya, jumlah kaum borjuis itu sedikit tetapi mereka mampu memimpin dan berada dalam pucuk kepemimpinan, walaupun kemungkinan dari mereka tidak dapat diharapkan loyalitas yang penuh. Dalam kondisi yang belum memungkinkan dalam melakukan penyebaran partai komunis, PKI juga berusaha mendekati kaum borjuis sebagai lapisan atas masyarakat desa. Bagi PKI, mengkonsolidasi Front Nasional dan menjadikan Bung Karno dan Demokrasi Terpimpin-nya merupakan salah satu strategi yang cukup penting dilakukan terhadap masyarakat pedesaan. PKI cukup menyadari bahwa kondisi sosial kultural masyarakat pedesaan Jawa masih melihat Soekarno sebagai “pemimpin tradisonal” yang kharismatik. Dalam hal ini, PKI mencoba menyelaraskan konsep kepemimpinan dan aliran masyarakat Jawa dengan kepemimpinan politik.¹⁴³

Kembali dengan penggalangan Front Nasional, menurut Aidit, penggalangan Front Nasional anti-imperialis dan anti-feodal yang berbasis persekutuan buruh tani merupakan tugas PKI yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Agar kebijakan itu dapat direalisasikan, dalam aksinya PKI mempercepat pembangunan partainya sebagai partai yang berkarakter massa dan terkonsolidasi sepenuhnya di lapangan politik, ideologi, ataupun organisasi. Kebijakan itu menyebabkan lahirnya sekolah-sekolah partai, Balai Pendidikan Marxis di pedesaan, koran masuk desa (Harian Rakjat), penyusupan terhadap berbagai organisasi seperti PNI, Baperki (Badan

¹⁴³ Rex Mortimer, “Class, Sosial Cleavage and Indonesian Communism”, *Indonesia*, Vol. 8. (Oct, 1969), hlm. 15.

Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), PGRI, dan lain-lainnya.¹⁴⁴ Dengan momentum itu mereka membangkitkan kesadaran politik petani. Hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa tuntutan pokok mereka yaitu terbentuknya masyarakat sosialis pasti tercapai.

Dalam kurun waktu sekitar 5 tahun, jumlah resmi anggota partai meningkat secara drastis. Hal itu terlihat dari jumlah 651.206 orang pada Kongres V tahun 1954 meningkat menjadi 1.500.000 pada tahun 1959.¹⁴⁵ Peningkatan secara kuantitas itu bukan berarti PKI tidak mengalami hambatan. PKI selalu menghadapi hambatan dalam membangun persekutuan buruh-tani di Indonesia. Hal ini disebabkan kaum buruh di Indonesia yang jumlahnya masih sedikit.

4.5. *Landreform* dan Aksi Sepihak¹⁴⁶

Seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa dalam masa Demokrasi Terpimpin ditegaskan mengenai *Landreform* sebagai salah satu segi pokok revolusi. serta “Tanah untuk Tani” sebagai salah satu cara melaksanakan Manipol. Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengungkapkan ide “Manipol”

¹⁴⁴ Nugroho Notosusanto, *SNI Jilid VI, op.cit.*, hlm 428

¹⁴⁵ *Ibid.*, yang selanjutnya dapat dibaca dalam *Bintang Merah* Nomor Spesial Dokumen Kongres Nasional VI PKI tahun 1959, hlm. 95—96; E Utrecht, “*Landreform*”, dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, ANUPress, Vol. V No. 3 November 1969, hlm. 71 – 88. Yang dikutip oleh Aminudin Kasdi, *op.cit.*

¹⁴⁶ Penelitian yang cukup komprehensif mengenai Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur telah dilakukan oleh Aminuddin Kasdi dalam tesis beliau di Fakultas Pascasarjana UGM tahun 1990 yang berjudul “Masalah Tanah dan Keresahan Petani di Jawa Timur (1960 – 1965): Studi tentang Gerakan Aksi Sepihak yang Dilancarkan PKI/BTI. Tesis tersebut telah diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur (1960 – 1965)*.

(Manifestasi Politik). Dalam Manipol tersebut, diumumkan berakhirnya hak-hak pemilikan tanah yang didasarkan hukum barat diganti dengan hukum nasional.

Tanggapan atas pidato presiden tersebut direspon dengan diadakannya sidang Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam sidangnya yang dilakukan pada 13 Januari 1960 dikemukakan bahwa tujuan revolusi adalah terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang dicapai dengan menghapuskan kelas-kelas tuan tanah yang menggarap tanahnya dengan buruh upahan, mengurangi jumlah tuna wisma, dan memberikan tanah hanya kepada mereka yang benar-benar mengerjakannya sendiri melalui pelaksanaan *landreform*.¹⁴⁷

Tujuan pemerintah melaksanakan *landreform* adalah untuk lebih pemeratakan pendapatan sesama warga negara serta menciptakan susunan sosial yang akan membuka jalan bagi peningkatan produksi nasional. DPA dalam laporannya kepada pemerintah mengemukakan bahwa *landreform* merupakan sarana yang tepat guna menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran khususnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat.¹⁴⁸

Dalam proses penetapannya, *landreform* ternyata diputuskan berdasarkan prinsip kompromis antara dua aliran, yaitu: *pertama*, aliran yang mewakili kepentingan petani yang tidak memiliki tanah; *kedua*, aliran yang mewakili kepentingan tuan-tuan tanah atau pemilik tanah luas. Adanya dua aliran ini

¹⁴⁷ Aminudin Kasdi, *op.cit.*, hlm. 127.

¹⁴⁸ Selanjutnya dapat dibaca dalam E Utrecht, “*Landreform*”, dalam *Bulletin of Indonesia Economics Studies*, ANU Press, Vol V No. 3 November 1969, hlm. 71—88 yang dikutip oleh Aminudin Kasdi, *ibid.*

menimbulkan perdebatan di DPA yang kemudian di DPR. Perdebatan tersebut membentuk pandangan-pandangan, yaitu: kelompok pertama, mereka datang dari kelompok yang berpandangan radikal, terutama dari wakil-wakil PNI, Partai Murba, dan PKI yang duduk sebagai wakil golongan fungsional (petani). Kelompok ini mengusulkan pembagian tanah berdasarkan pada prinsip: tanah hanya untuk mereka yang benar-benar menggarap. Mereka menegaskan pula pembagian itu akan berpengaruh luas secara sosial karena jumlah pemilik tanah akan bertambah. Selain itu juga akan menghapus sistem petani penggarap, petani bagi hasil, dan sistem sewa tanah. Oleh golongan ini, sistem tersebut dianggap sebagai alat pengisapan terhadap kaum tani tidak bertanah. Mereka sepakat dengan pemerintah mengenai penggantian kepada pemilik tanah yang melebihi ketentuan atau *absentee*.

Kelompok kedua, mereka adalah kelompok konservatif yang terdiri dari wakil-wakil organisasi atau partai-partai Islam dan sebagian PNI. Golongan ini menolak tuduhan bahwa mereka telah melakukan pengisapan lewat penggarapan, sistem bagi hasil ataupun penyewaan tanah. Kelompok ini membuktikan bahwa hak pemilikan tanah yang ada pada mereka didasarkan pada hukum adat Indonesia, hak waris. Kelompok ini pada dasarnya juga tidak menyetujui adanya pembatasan kepemilikan tanah karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

Kelompok ketiga adalah kelompok kompromis. Presiden Soekarno dan Menteri Agraria Soedjarwo termasuk dalam kelompok ini. Pada prinsipnya, golongan ini menerima pandangan radikal, hanya saja mereka menganjurkan agar pelaksanaan *landreform* dilakukan secara bertahap. Hasil kompromi itu akhirnya dapat

diwujudkan dalam suatu RUU yang dianjurkan kepada DPR. PKI sangat mendukung dengan adanya RUU itu.

Juru bicara PNI di parlemen pada mulanya bersuara radikal. Ia menganjurkan agar pasal-pasal tentang sewa atau gadai tanah dihilangkan serta ada larangan pemilikan tanah bagi orang asing. Menurut mereka tindakan itu merupakan usaha PNI untuk mencegah agar PKI tidak berpeluang mengambil peranan dalam proses pengadaan hukum tersebut. Apa yang dilakukan PNI itu sia-sia karena ketika pemerintah menyetujui usul-usul itu para anggota PNI justru melangkah mundur dari amandemennya. Langkah itu terlambat karena PKI yang berdiri di belakangnya segera mengganyangnya.¹⁴⁹

Program *Landreform* itu akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama akan ditentukan batas kepemilikan maksimum dan minimum. Azas pemilikan tanah maksimum-minimum kemudian dikembangkan dalam kerangka UUPA yang diajukan ke DPR pada pertengahan tahun 1960. Undang-undang itu dinyatakan mulai berlaku tanggal 24 September 1960, sebagai pengganti Undang-undang Agraria Belanda tahun 1870. Dengan pelaksanaan UUPA, pemerintah berupaya mengakhiri dualisme hak kepemilikan tanah serta mencoba menyesuaikan kepentingan-kepentingan modal barat dan kepentingan penduduk asli yang tidak

¹⁴⁹ Rex Mortimer, *The Indonesia Communist Party & Landreform 1959—1965*, Centre of Southeast Asian studies, Monash University, 1972, hlm. 14 – 15 yang dikutip oleh Aminudin Kasdi, *ibid.*, hlm. 130.

dapat dipisahkan dari tanah mereka. Pemerintah mengharapkan pelaksanaan *landreform* telah selesai pada akhir 1964.¹⁵⁰

PKI sangat menyetujui adanya undang-undang tersebut. Mereka merasa UU itu dapat dijadikan landasan mengembangkan aksi-aksi kaum tani guna mengenal musuh-musuhnya. Dengan pelaksanaan UUPA kaum tani miskin akan mendapat sekadar perbaikan nasib meskipun sifatnya sementara.

Dalam pelaksanaan *landreform* dibentuk panitia *landreform*. Pembentukan panitia ini berdasarkan Penetapan Presiden No. 131 Tahun 1961. Salah satu tugas panitia ini adalah menaksir dan membagikan tanah. Susunan panitia secara hierarkis di tingkat pusat panitia tertinggi diketuai oleh Presiden. Pada tingkat di bawahnya: provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, masing-masing diketuai oleh Gubernur, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Camat, dan Kepala Desa. Dalam Penpres itu ditetapkan pula wakil-wakil organisasi yang tetap harus dimasukkan dalam kepanitiaan.¹⁵¹ Panitia *landreform* mulai melaksanakan tugas-tugasnya pada 1 September 1961. Diperlukan waktu satu tahun sebagai persiapan kerja sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai pada 24 September 1962.

Tugas dari kepanitiaan itu tidaklah mengalami hambatan. Pada 1964, ketika pelaksanaan *landreform*, kepanitiaan itu disempurnakan lagi dengan Keputusan Presiden No. 263/1964. Dalam Keppres itu ormas-ormas tani diberikan peranan yang lebih penting. Ada dugaan keluarnya Keppres tersebut sebagai akibat tekanan-

¹⁵⁰ Pembahasan yang lebih rinci mengenai kebijakan *landreform* dapat dibaca dalam BAB II.

¹⁵¹ Mengenai panitia *landreform* dapat dibaca dalam E Utrecht, *op.cit.*, hlm. 77 yang dikutip oleh Aminudin Kasdi, *ibid.*, hlm. 134.

tekanan yang dilancarkan oleh PKI, dan bukti kemenangan politiknya. Berdasarkan Keppres ini, PKI memperkuat tuntutannya agar ormas-ormas tani Nasakom, yaitu BTI (PKI), Petani (PNI), dan Pertanu (NU), dilibatkan dalam semua tingkat kepanitiaan *landreform*.¹⁵²

Tiga kegiatan yang menandai pelaksanaan *landreform* dari tahun 1961 sampai 1965 adalah sebagai berikut.¹⁵³

1. Pendaftaran tanah.
2. Penentuan tanah lebih serta pembagiannya, kepada sebanyak mungkin petani tidak bertanah.
3. Pelaksanaan Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) atau Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

Pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Pasal 19 UUPA 1960. Pendaftaran ini dipusatkan pada tingkat desa yang dilakukan desa demi desa dengan memerhatikan riwayat tanah yang diberikan oleh yang berkepentingan (Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 PP No. 10/1961). Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas pendaftaran dan pengukuran telah ditentukan dalam ayat 3 pasal 3 PP 10/1961. Anggotanya terdiri atas seorang pejabat dari Jawatan Agraria setempat sebagai ketua, dibantu dua orang anggota pejabat pemerintah desa. Anggota ini akan mengalami penambahan apabila menurut Menteri Agraria perlu

¹⁵² DN Aidit, "Berani, Berani, Sekali Lagi Berani", *Laporan Politik Ketua CC PKI pada Sidang Pleno*, 19 Februari 1963, hlm. 4 – 5; *Jarek* (Jalan Revolusi Kita), pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1961; *Dekon* (Deklarasi Ekonomi 1963); Tavip (Tahun Vivere Pericoloso), pidato Presiden pada tahun 1964 yang dikutip oleh Aminudin Kasdi, *ibid.*, hlm 135.

¹⁵³ *Ibid*

ditambahkan. Penambahan dapat berasal dari Jawatan Agraria, Pamong Praja, dan Kepolisian Negara.¹⁵⁴ Ujung tombak keberhasilan dari pelaksanaan *landreform* berada dalam tanggung jawab kerja petugas pendaftaran dan pengukuran tanah. Hal itulah yang menyebabkan PKI, yang sejak semula telah memusatkan perhatiannya di desa-desa, dengan serius menuntut agar pembentukan panitia *landreform* melibatkan unsur-unsur ormas tani Nasakom. Tuntutan itu memiliki tujuan jelas agar PKI dapat mengontrol atau ikut menentukan dalam proses pendaftaran dan pengukuran bagi penetapan tanah lebih.

PKI menyetujui UUPA dan UPBH karena kedua UU itu dapat dijadikan sarana menggerakkan aksi-aksi kaum tani yang merupakan pengikutnya. Oleh karena tuntutan *landreform*-nya yang radikal gagal, maka pengikut-pengikutnya mencium penyimpangan dari ketentuan UUPA. PKI/ BTI menyoroti dengan serius akibat tindakan-tindakan onar yang mereka lakukan dalam mempersoalkan pelaksanaan pendaftaran, penentuan tanah lebih, penentuan atau urutan yang berhak menerima yang berpusat pada tingkat desa.¹⁵⁵ Tidak dapat dipungkiri ketika pendaftaran

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁵⁵ Untuk kepentingan ini PKI telah mengirimkan 250 kader dan 3000 petugas riset ke desa-desa di 142 kecamatan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur antara bulan Februari – Mei 1964. Di Jawa Timur, riset dilakukan pada tanggal 11 April – 22 Mei 1964. Objek penelitian berjumlah 74 Kecamatan daerah pertanian dari 30 Kabupaten. Kecamatan yang diteliti adalah Kanor dan Ngraho (Kabupaten Bojonegoro), Brondong dan Leran (Lamongan), Palang dan Plumpang (Tuban), Wungu dan Caruban (Madiun), Geneng, Karangjati, Kedunggalar (Ngawi), Sambit, Badegan (Ponorogo), Karangmojo dan Plaosan (Magetan), Pacitan dan Punung (Pacitan), Pakel, Campurdarat (Tulung Agung), Trenggalek, Wates, Grogol (Kediri), Wlingi, Gandusari, Pongkok (Blitar), Patianrawa, Gondang (Nganjuk), Batu, Singosari (Malang), Bangil, Puspo (Pasuruan), Dringu, Sukapura (Probolinggo), Candipuro, Jatiroto (Lumajang), Genteng (Banyuwangi), Ambulu, Puger, Tanggul (Jember), Panarukan dan Kapangan (Situbondo), Tlogosari dan Sukasari (Bondowoso), Dasuk, Gapura (Sumenep), Sampang (Sampang), Bangkalan dan Secang (Bangkalan), Waru dan Pademasren (Pamekasan), Gedongan, Jabon, Krian (Sidoarjo), Trowulan, Gade (Mojokerto), Bareng dan

dilaksanakan, tidak jarang pemilik tanah luas atau tuan tanah memecah tanah miliknya kemudian membagikannya kepada berbagai relasi dekat. Hal ini dilakukan oleh mereka melalui tangan pejabat-pejabat desa. Tindakan itu mungkin tidak diketahui ketua pendaftaran, kecuali bila pamong desa yang bersangkutan melakukan protes atau sebagai simpatisan PKI/ BTI.

Kesulitan di lapangan dalam pendaftaran tanah sebenarnya telah diakui oleh Menteri Sadjarwo. Menteri Sadjarwo dalam laporannya kepada MPRS mengakui bahwa dalam hal mendaftar dan menentukan luas tanah lebih yang akan diambil alih dan dibagi oleh panitia adalah administrasi tanah yang tidak sempurna.¹⁵⁶ Hal ini merupakan hambatan terpokok dalam pelaksanaan *landreform*. Sejak *landreform* dimulai pada 1961, tidak ada angka yang tersedia secara pasti mengenai jumlah tanah lebih. Pemerintah dan PKI memiliki data angka yang berbeda-beda.

Pelaksanaan *landreform* ini tidak disambut baik oleh para tuan tanah. Faktor yang menyebabkan tuan tanah menghindari *landreform* adalah keadaan keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk melakukan penggantian atas tanah lebih atau tanah yang telah dibeli pemerintah. Pemerintah jarang melakukan penggantian

Tembalang (Jombang), Bawean, Gresik dan Tandes (Surabaya), Tambaksari, Wonokromo (Surabaya Kota), Klojen dan Kedung Kandang (Malang Kota). *Harian Rakjat*, 3 Juni 1964. Secara umum, riset di daerah Jawa Timur tidak menghasilkan perbedaan yang dengan riset yang dilakukan PKI di berbagai daerah lain (Jawa Barat dan Jawa Tengah). Secara garis besar, PKI hanya membuat kesimpulan metode “3 sama”, “4 harus”, dan “4 jangan” serta upaya melawan “7 setan desa”. Salah satu perbedaan hanya terletak dalam kajian lokal kondisi buruh, tani, dan nelayan. Misalnya tentang kondisi di Banyuwangi, Kediri, Ngawi, dan Magetan yang memiliki intensitas yang lebih tinggi dalam melakukan perlawanan terhadap berbagai penghisapan.

¹⁵⁶ Selengkapnya dapat dibaca dalam Ir. Surachman, *Peranan Kaum Tani dalam Melaksanakan Amanat Berdikari*, disampaikan di Depan Pendidikan Kilat Kader Nasakom, 3 Juni 1965, (Djakarta: PB Front Nasional, 1965), hlm. 67 yang dikutip oleh Aminudin Kasdi, *ibid.*, hlm. 140.

langsung. Hal ini memberikan kesan bahwa pemerintah hanya menyita tanah mereka.¹⁵⁷

Ketidakberhasilan *landreform* yang dijalankan oleh pemerintah menyebabkan PKI memberikan tuntutan, antara lain: *Pertama*, panitia *landreform* dalam semua tingkat kelas harus berporos pada Nasakom. Harus diadakan *retooling* apabila ada anggota dan ketua panitia yang tidak aktif. *Kedua*, *retooling* personalia Jawatan Agraria sebagai jawatan yang paling erat hubungannya dengan soal-soal *landreform*, dari tingkat pusat sampai daerah. *Ketiga*, pembentukan pengadilan *landreform* dengan mengikutsertakan wakil-wakil dan untuk mengadili tuan-tuan tanah dan petugas-petugas pemerintah yang tidak sungguh-sungguh melaksanakan UUPA.¹⁵⁸

Adanya pihak yang tidak mendukung program *landreform* yang telah ditetapkan pemerintah, maka pemerintah kemudian menganggap perlu menerapkan Peraturan Menteri Agraria No. 4/1964. Peraturan ini mengenai penjatuhan sanksi hukum terhadap mereka yang menolak pelaksanaan *landreform* serta menyeretnya ke pengadilan *landreform*. Pembuatan sanksi itu ternyata tidak banyak artinya sebab para tuan tanah dengan berbagai cara menghindari *landreform* karena tidak menguntungkan mereka.¹⁵⁹ Benturan kepentingan tersebut membuat langkah aksi sepihak.

¹⁵⁷ Margo L Lyon, *op.cit.*, hlm. 273.

¹⁵⁸ Selengkapnya dapat dibaca dalam DN. Aidit, "Berani, Berani, Sekali Lagi Berani", Aminudin Kasdi, *op.cit.*, hlm. 147.

¹⁵⁹ *Ibid.*

Aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI merupakan jawaban atas tidak berjalannya *landreform* yang telah ditentukan oleh pemerintah. Aidit (dalam laporannya kepada CC PKI Februari 1964) menyatakan bahwa apabila UUPA dilaksanakan secara konsekuen, maka UUPA akan menjadi syarat yang penting dan menguntungkan untuk melancarkan program agraria yang radikal. Dengan berjalannya UUPA dengan baik, PKI akan meneruskan atau melaksanakan program agraria, yaitu melenyapkan seluruh tuan tanah.¹⁶⁰ Dalam kaitannya dengan aksi sepihak, PKI menjadikan aksi itu sebagai tempat penggemblengan kaum komunis untuk dipersiapkan melakukan revolusi sosial atau revolusi agraria.

Gerakan aksi sepihak yang dilakukan oleh sekelompok petani di berbagai daerah di Jawa Timur adalah gerakan yang terprogram dan terkendali oleh pimpinan dengan tujuan tertentu. Gerakan itu didasari oleh ideologi yang pelaksanaannya dengan menggunakan metode dan pola tertentu.¹⁶¹

Dalam pelaksanaan *landreform* terdapat beberapa hal yang berbeda antara PKI dan PKC. PKC melaksanakan *landreform* di daerah-daerah yang benar-benar telah mereka “bebaskan” dan telah mereka kuasai sepenuhnya.¹⁶² Sementara itu, PKI, ketika melancarkan aksi sepihak dalam kerangka UUPA, undang-undang itu belum disetujui benar karena hanya merupakan kompromi. UUPA belum memenuhi tuntutan PKI untuk melenyapkan keberadaan tuan tanah sebagai bagian dari program

¹⁶⁰ Selengkapnya dapat dibaca dalam DN aidit, “Konsolidasi Pengintegrasian PKI yang Marxis-Leninis dengan Kaum Tani”, dalam *Kobarkan Semangat Banteng, Madju Terus Pantang Mundur*, Djakarta: Pembaruan, 1964, hlm. 23 yang dikutip oleh Aminudin Kasdi, *ibid.*, hlm. 150.

¹⁶¹ Bruce Cameron, *Modern Sosial Movements*, New York: Random House, 1966, hlm. 124—149.

¹⁶² Selengkapnya dapat dibaca dalam Abdul Salam, *Komunisme di Cina*, Jakarta: Pancasila Sakti, 1982.

agrariannya yang radikal. PKI juga belum memiliki basis yang benar-benar telah mereka kuasai secara sosial, ekonomi, politik, dan militer.

Dalam struktur politik, PKI juga belum sekuat PKC. PKC telah memiliki pemerintahan sendiri di wilayah yang mereka kuasai sehingga program *landreform* dapat berjalan dengan lancar. PKI belum memiliki daerah basis yang dikuasai 100%. Di tingkat nasional dalam struktur politik belum memperoleh kedudukan tertentu di puncak pemerintahan. Melalui pelaksanaan *landreform* ini PKI berusaha mengguncang struktur politik dan pemerintahan yang ada dari bawah.

Dalam laporan kepada Kongres VI DPP BTI menggariskan langkah-langkah aksi, yaitu: *Pertama*, aksi sepihak harus berporos kepada “Gerakan 6 Baik” yaitu turun sewa, turun bunga, naik upah, naik produksi, naik kebudayaan, dan naik politik. *Kedua*, para kader yang melakukan turun ke bawah harus menjalankan “3 sama” sambil melakukan penelitian tentang bentuk-bentuk “pengisapan feodal” di desa untuk membangkitkan, mengorganisasikan, memobilisasikan, dan memimpin petani miskin yang merasa diisap. *Ketiga*, para petani harus membentuk kelompok serta memilih pimpinannya dari kalangan mereka sendiri. *Keempat*, melalui kelompok dilancarkan agitasi. *Kelima*, gerakan tuntutan tanah harus disertai dengan tuntutan bagi hasil. *Keenam*, harus diadakan kerjasama dengan organisasi-organisasi tani Manipolis serta menarik golongan lain. *Ketujuh*, mendapatkan dukungan diperlukan tenaga propaganda yang pandai mempengaruhi massa. *Kedelapan*, dalam menetapkan

tuntutan harus lebih menekankan hasil.¹⁶³ Sebelum aksi dijalankan, langkah persiapan harus dibentuk. Langkah persiapan terdiri dari kegiatan penelitian, agitasi, dan pemilihan kader. Langkah pertama pelaksanaan aksi adalah pembentukan tim-tim aksi untuk tiap-tiap aksi.

Selanjutnya, PKI menetapkan tiga syarat yang harus dipatuhi agar aksi-aksi yang dilancarkan sukses antara lain: organisasi yang kompak, penyelenggaraan pendidikan berjalan seperti kursus kilat yang khusus menangani soal-soal praktis tentang aksi untuk kader-kader desa, dan aksi dilancarkan secara terpimpin, mencegah aksi pimpinan tanpa massa atau aksi massa tanpa pimpinan, konsekuen bersandar pada kekuatan buruh tani dan tani miskin.¹⁶⁴

PKI terlihat belum siap untuk melakukan konfrontasi total guna melancarkan revolusi sosial lewat aksi-aksi sepihak yang dilancarkan, meskipun propaganda dan publikasi yang dilancarkan telah mewarnai media massa dari akhir 1963 sampai 1965-an. Dalam peristiwa aksi sepihak, pada kenyataannya PKI tidak berhasil memperoleh dukungan massa petani seluruhnya. Mereka terpecah dalam tiga kelompok besar dalam kerangka politik Nasakom.

Aksi sepihak yang dilancarkan PKI mendapat perlawanan keras dari warga NU maupun PNI. Bila dibandingkan dengan petani miskin di Cina terdapat perbedaan pada petani di Jawa Timur. Sikap petani miskin di Cina mau menerima tanah

¹⁶³ Asmu, *loc. cit.*, hlm. 53—60 yang dikutip oleh Aminudin Kasdi, *ibid.*, hlm. 157—158.

¹⁶⁴ Mao Tse Tung, “Situasi Dewasa Ini dan Tugas-tugas Kita”, *Laporan pada Sidang Pleno CC PKI, 25—28 Desember 1947*, Peking: Pustaka Bahasa Asing, 1964, hlm. 11 yang dikutip oleh Aminudin Kasdi, *ibid.*, hlm. 164.

pembagian sedangkan para petani miskin di Jawa Timur khususnya warga NU tidak tertarik terhadap cara-cara yang dilakukan PKI karena konteks sosial masyarakat Jawa serta latar belakang tuan tanah di Jawa Timur yang notabene adalah para ulama.

Hubungan *kawulo-gusti* di pedesaan Jawa pada 1960-an masih memegang peranan sentral. Para pemimpin formal, tradisional, petani kaya atau tuan tanah masih memiliki pengaruh sangat besar pada buruh tani atau petani miskin. Banyak diantara tuan tanah tersebut juga merupakan orang yang dihormati. Khusus untuk daerah Jawa Timur, para tuan tanah sebagian besar adalah *ulama* atau *kyai* yang mereka hormati.

Seperti telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya mengenai kondisi sosial masyarakat Jawa Timur dengan berbagai klasifikasi yang salah satunya adalah masyarakat *santri*, konteks masyarakat Islam Jawa Timur mengenal sistem *zakat*, *infaq*, dan *wakaf*. Hubungan *kawulo-gusti* juga membuat buruh tani atau petani miskin masih tetap setia kepada tuan tanah walaupun kondisi mereka buruk. Mereka merasa tuan tanah sebagai pelindung dan mereka tidak tertarik mengikuti gerakan aksi sepihak PKI/BTI.

4.6. Aksi Ofensif Revolusioner

Setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, kekuasaan berporos kepada Presiden Soekarno. Berbagai ide Revolusi yang disampaikan Soekarno terutama dalam setiap kesempatannya berpidato. Narasi mengenai Demokrasi Terpimpin yang disampaikan Soekarno seperti Manipol, USDEK, Front Nasional, dan kerjasama NASAKOM selalu didukung dan dimanfaatkan PKI. Istilah-istilah

yang digunakan Soekarno seperti “Progresif Revolusioner” dan “Kontra Revolusioner” serta berbagai isu politik yang disampaikan Soekarno seperti pembebasan Irian Barat, “Ganyang Malaysia”, dan *Landreform* selalu direspon PKI dengan baik.

Kekuatan politik besar yang berada dalam diri Soekarno sejak dikeluarkannya Dekrit membuat PKI berpikir untuk menjadikan Soekarno sebagai tameng bagi PKI menuju puncak kekuasaan. Bahan bakar yang dipakai PKI untuk mencapai hal tersebut adalah massa yang sebagian besar diantaranya diambil dari petani. Maka, yang dilakukan PKI adalah memanfaatkan sebesar-besarnya karisma Soekarno dan membentuk massa yang siap digunakan untuk revolusi. Dalam Tesis 45 Tahun PKI, disampaikan bahwa upaya mengintegrasikan diri dengan gerakan tani dan merebut wilayah pedesaan memiliki empat peranan, yaitu menjadikan desa sebagai basis sumber makanan, sumber prajurit, markas untuk mundur ketika revolusi terpukul di kota, serta menjadikannya sebagai pangkalan untuk menyerang musuh dan merebut kembali kota.¹⁶⁵

Dengan melihat potensi yang sudah dimilikinya, PKI menyerukan kepada kadernya untuk melakukan gerakan “Ofensif Revolusioner”.¹⁶⁶ Langkah ofensif revolusioner dilakukan PKI untuk menciptakan situasi revolusioner yang menurut PKI akan memiliki ciri-ciri utama yang diantaranya adalah aktivitas massa rakyat yang semakin meningkat dalam melakukan tuntutan perbaikan hidup mereka;

¹⁶⁵ CC PKI, *Tesis 45 Tahun PKI (23 Mei 1920 – 23 Mei 1965)*, Djakarta: Politbiro CC PKI, 1965, hlm.13.

¹⁶⁶ Tim Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indoensia*, *op.cit.*, hlm. 63.

kelompok anti-rakyat (yang didefinisikan sebagai kelompok anti komunis) semakin terdesak sedangkan kelompok pro-rakyat (komunis) semakin unggul dan politik pemerintah yang banyak disesuaikan dengan tuntutan rakyat; serta aksi massa yang semakin meluas sehingga peranan rakyat begitu menentukan dalam kehidupan masyarakat dan politik negara.¹⁶⁷ Sasaran ofensif revolusioner yang dilakukan PKI diantaranya adalah partai-partai politik, organisasi massa, organisasi fungsional, organisasi agama, organisasi budaya, Angkatan Bersenjata, dan siapapun baik organisasi maupun perorangan yang dianggap sebagai kaum kontra-revolusioner dan menghalangi tujuan politik PKI.¹⁶⁸ Langkah tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk aksi massa seperti demonstrasi, propaganda, dan aksi sepihak.

Langkah ofensif revolusioner yang dilakukan PKI yang banyak terjadi justru terkait dengan isu agraria. Massa petani yang dikonsolidasikan PKI mampu bergerak di bawah dengan cukup militan. Kebijakan *landreform* yang direspon PKI dengan seruan aksi sepihak membuat massa petani melakukan serangkaian gerakan merebut tanah. Propaganda PKI untuk mengganyang tujuh setan desa dan mempersenjatai kaum tani marak dilakukan di berbagai kota. Propaganda isu itu pun diikuti dengan seruan perlawanan fisik. Contohnya adalah ceramah BTI di Madiun tentang pentingnya satu tangan memegang cangkul dan satu tangan lagi memegang bedil.¹⁶⁹

Klaim besarnya jumlah anggota yang disampaikan PKI menambah keyakinan partai ini untuk lebih meningkatkan gerakan ofensif. Pada 1964, PKI mengklaim

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

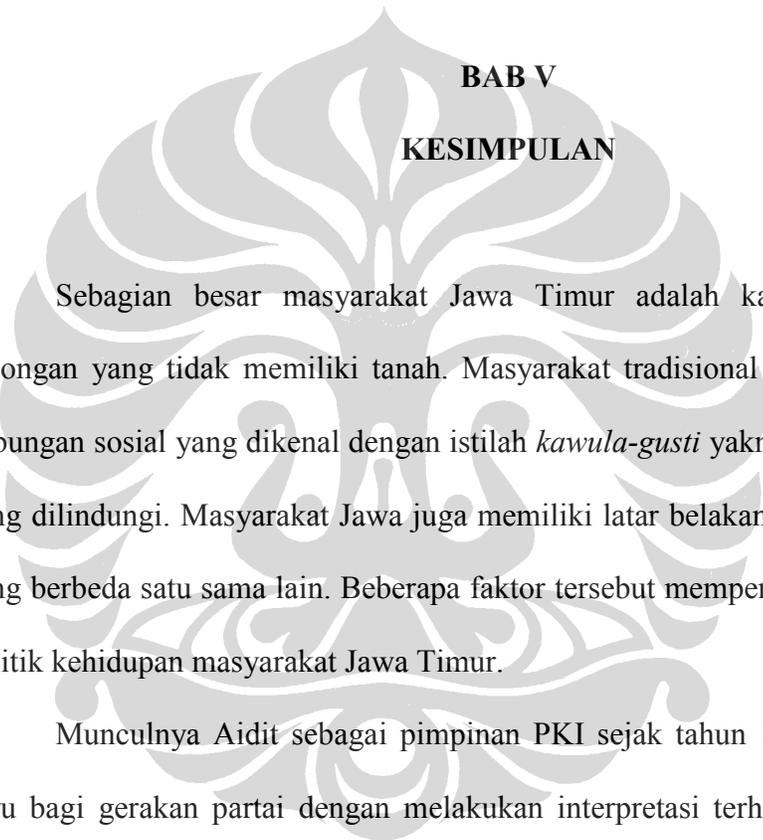
¹⁶⁹ *Harian Rakjat*, 20 Juli 1962.

memiliki 3.000.000 anggota. Berbagai organisasi yang berafiliasi kepada PKI juga mengalami lonjakan jumlah anggota. Pemuda Rakyat mengklaim memiliki 2.000.000 anggota. Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) memiliki 1.750.000 anggota.¹⁷⁰ Sedangkan BTI, sayap organisasi tani PKI pada tahun 1962 mengklaim memiliki anggota sebesar 5.654.974 orang.¹⁷¹

Di tengah perkembangan pesat jumlah anggota PKI dan keyakinan untuk menggerakkan massa petani, propaganda untuk pembentukan angkatan ke-V dengan mempersenjatai kaum tani marak dilakukan oleh PKI. Hal ini memperlihatkan langkah ekstrim PKI untuk menjadikan petani sebagai alat merebut kekuasaan. Akan tetapi hal ini tidak pernah terwujud hingga meletusnya Gerakan 30 September yang diakhiri dengan gagalnya PKI merebut kekuasaan.

¹⁷⁰ Hermawan Sulisty, *op.cit.*, hlm. 31.

¹⁷¹ *Harian Rakjat*, 30 Juli 1962.



BAB V
KESIMPULAN

Sebagian besar masyarakat Jawa Timur adalah kaum tani miskin dan golongan yang tidak memiliki tanah. Masyarakat tradisional Jawa memiliki sistem hubungan sosial yang dikenal dengan istilah *kawula-gusti* yakni antara pelindung dan yang dilindungi. Masyarakat Jawa juga memiliki latar belakang golongan primordial yang berbeda satu sama lain. Beberapa faktor tersebut mempengaruhi dimensi sosial-politik kehidupan masyarakat Jawa Timur.

Munculnya Aidit sebagai pimpinan PKI sejak tahun 1951 membawa warna baru bagi gerakan partai dengan melakukan interpretasi terhadap ideologi maupun propaganda komunisme. Pada tahun 1953, Aidit mendesak kader partai untuk lebih mengoptimalkan usahanya untuk mendapatkan dukungan kaum tani dengan mencetuskan semboyan "Tanah untuk Kaum Tani". Rencana Aidit itupun menandai perubahan garis strategi PKI ketika diadakannya Kongres Nasional V PKI pada bulan Maret 1954 yang mengubah fokus utama partai dari buruh kepada petani. Hal itu

dilakukan karena menyadari bahwa revolusi agraria adalah inti revolusi demokratik rakyat di Indonesia.

Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ingin mewujudkan revolusi sosial di Indonesia, menjadikan masalah pertanahan dan nasib petani sebagai hal yang penting. Polarisasi yang dibuat oleh PKI dalam perkembangannya menjadi konsepsi PKI dalam melakukan pertentangan kelas antara para tuan tanah dengan buruh tani. PKI menggariskan tujuannya untuk melaksanakan program agraria. Melalui strateginya tersebut, PKI sebagai partai yang baru kembali setelah "noda" pemberontakan yang telah dilakukan dapat bersaing dengan partai lain. Hal itu dilakukan dengan menarik dukungan dari petani.

Menjelang Pemilu 1955, PKI berusaha berkonsolidasi dengan golongan abangan. Secara ideologis, kerja sama PKI dengan golongan Abangan dapat dilihat lebih potensial karena relatif tidak bertentangnya agama sinkretisme dengan ideologi PKI. Langkah yang juga dilakukan PKI dalam mencari dukungan massa petani di pedesaan adalah dengan mengenali kehidupan petani dan hubungannya dengan masalah agraria. Dalam hal ini, PKI mengirimkan kader-kader partai ke pedesaan dan mengadakan diskusi, konsolidasi serta meluaskan jaringan organisasi yang berafiliasi kepada PKI sebagai kegiatan pokok partai.

PKI juga membuat berbagai organisasi *onderbouw* partai. Hal itu dilakukan PKI sebagai cara merekrut anggota melalui berbagai latar belakang sosial masyarakat. Dengan tindakan ini, PKI memiliki organisasi yang dapat dipakai sebagai alat untuk memasuki berbagai kegiatan hidup di pedesaan dan menjadikan petani sebagai kader

militan untuk menarik dukungan yang luas. PKI menggunakan langkah struktural melalui organisasi petani. Berbagai organisasi massa petani yang dibentuk pascakemerdekaan merupakan suatu wadah strategis untuk menggalang dukungan massa. Selain organisasi yang didasarkan kepada fungsi organ-organ PKI, terdapat juga organisasi yang didasarkan kepada tugas seseorang atau kelompok. Petani digerakkan melalui organisasi pemuda, wanita, buruh (tani), nelayan, dan sebagainya. Organisasi yang terbentuk adalah Barisan Tani Indonesia (BTI), Serikat Tani Indonesia (SAKTI), dan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI). Dibentuk pula organisasi untuk pamong desa, yakni Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) yang semula merupakan organisasi non-komunis, tetapi sejak 1951 dikuasai PKI.

Dalam menghadapi Pemilu, PKI juga mengangkat persolan kemiskinan dan kehidupan rakyat yang buruk karena kekuasaan imperialisme yang masih berlanjut atas perekonomian Indonesia. Masalah tanah merupakan hal yang penting dalam kampanye PKI di beberapa daerah yang luas dan besar. Metode lain kampanye PKI adalah dengan melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Bagi PKI, kegiatan semacam ini tidak hanya dilakukan untuk menang dalam pemilihan umum, tetapi juga untuk membangun basis massa yang lebih permanen.

Dalam Pemilu 1955 di tingkat nasional, PKI memperoleh suara sebesar 6.176.914 atau 16,4% dari persentase keseluruhan suara pemilihan anggota DPR. Sedangkan dalam pemilu konstituante, PKI memperoleh suara sebesar 6.232.512. Perolehan suara PKI di Jawa Timur, PKI mendapatkan suara terbesar kedua setelah

NU dalam pemilu parlemen dan suara terbesar ketiga setelah NU dan PNI dalam pemilu konstituante. Dalam pemilu parlemen, PKI mendapatkan suara sebesar 2.299.602 atau 23,3% dari total suara. Perolehan suara PKI berada di bawah NU yang mendapatkan suara sebesar 3.370.000. Sedangkan dalam pemilu konstituante, PKI mendapatkan suara sebesar 2.266.801 di bawah NU dan PNI yang masing-masing mendapatkan suara sebesar 3.260.392 dan 2.329.991.

Dalam Pemilu DPRD Jawa Timur yang mulai dilakukan pada tanggal 29 Juli 1957, PKI kembali memperoleh peningkatan suara yang sangat signifikan. Perolehan suara PKI melonjak menjadi 2.952.555 suara atau 29,3% dari total suara. Kemenangan itu memberikan gambaran bahwa daerah pedesaan Jawa Timur merupakan salah satu basis terkuat PKI. Berkat kemenangan dalam Pemilu 1955 dan 1957, PKI menjadi salah satu kekuatan sosial politik terbesar.

Salah satu rumusan Kongres Nasional PKI ke- V pada tahun 1954 juga mengatakan bahwa tidak mungkin bagi PKI untuk memimpin Front Persatuan Nasional tanpa mengorganisasikan massa petani dan memasukannya sebagai bagian dari front persatuan nasional. Taktik Front Persatuan Nasional ini adalah siasat yang tidak pernah ditinggalkan oleh gerakan komunis di Indonesia ketika kondisi partai ini dalam keadaan lemah. Hal itu juga dilakukan untuk mencapai tahap revolusi nasional demokratis. Dalam Front Persatuan Nasional ini, PKI juga bekerja sama dengan kelas borjuis nasional dan kelas-kelas lainnya.

Berbagai rangkaian perubahan strategi yang dilakukan Aidit, menunjukkan usaha PKI untuk melepaskan isolasi yang melekat pada dirinya pasca peristiwa-

peristiwa yang mencoreng partai tersebut. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, PKI sedikit demi sedikit menghilangkan hambatan untuk masuk kembali dalam kancah politik nasional.

Kongres Nasional PKI ke-VI pada tahun 1959 menghasilkan “Program Umum PKI” dan Program Tuntutan Minimum. Program agraria PKI yang lebih sistematis dan memiliki orientasi yang lebih strategis sebenarnya baru dapat kita lihat dalam penjabaran “Program Umum PKI” tersebut. Salah satu poin program umum yang langsung terkait dengan masalah agraria adalah program ketujuh yang menyatakan bahwa hubungan agraria seharusnya tidak bersifat imperialis, melainkan harus bersifat merdeka dan demokratis. Oleh sebab itu, semua tanah yang dimiliki oleh para tuan tanah harus disita tanpa ganti rugi dan dibagikan secara cuma-cuma kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tani miskin.

Program Umum dan Program Tuntutan Minimum hasil Kongres Nasional PKI ke-VI sebenarnya tidak memiliki perbedaan signifikan dengan apa yang dirumuskan PKI dalam Program Agraria hasil Kongres Nasional ke-V tahun 1954. Program tuntutan minimum pun terkesan tidak memiliki ketegasan sikap politik PKI terhadap masalah agraria (yang di dalamnya juga terkait nasib petani). Semboyan “Tanah untuk Kaum Tani” yang mulai didengungkan sejak tahun 1953 dalam kenyataannya masih memiliki fleksibilitas isu karena diantara program tuntutan minimum di atas terdapat salah satu poin yang mengangkat tentang perbaikan sewa tanah.

Strategi merebut tanah yang disampaikan PKI justru baru semakin berani diungkapkan setelah adanya kebijakan *Landreform* di masa Demokrasi Terpimpin.

Isu *Landreform* dijadikan sebagai alat gerakan taktis mereka dalam membangun kekuatan politik. Tujuan PKI untuk meraih kekuasaan dengan semangat membangun gerakan massa petani juga diperlihatkan dengan salah satu poin program tuntutan minimum yang menuntut pemberian hak kepada petani untuk menggunakan senjata dan mendapatkan pelatihan militer. Dalam perkembangan selanjutnya, ide ini diangkat PKI dalam isu “Ganyang Malaysia” untuk membentuk “Angkatan ke-V” yang mempersenjatai kaum petani.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya tentang penggalangan semua elemen massa dalam Front Persatuan Nasional, ide ini akhirnya terealisasi dalam sebuah badan resmi yang dibuat pada masa Demokrasi Terpimpin. Ide tentang Front Persatuan Nasional yang merupakan taktik jalan damai PKI semakin kuat dengan dukungan Presiden Soekarno yang mengusulkan ide pembentukan Front Nasional pada tahun 1959 dan selanjutnya dibentuk melalui Penetapan Presiden No.13 tahun 1959. Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Organisasi ini dijadikan sebagai forum organisasi politik Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Front Nasional dianggap mewakili tiga golongan dan mempersatukan semangat bersama (gotong royong).

Masa Demokrasi Terpimpin menegaskan *Landreform* sebagai salah satu segi pokok revolusi serta “Tanah untuk Tani” sebagai salah satu caranya. Dengan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria yang merupakan perwujudan dari *landreform*, kaum tani miskin dan petani yang tidak memiliki tanah akan mendapat sekadar perbaikan nasib meskipun sifatnya sementara. Dalam pelaksanaannya

landreform ternyata kurang memenuhi harapan. Pembagian tanah tidak terealisasi secara baik. Hal ini menimbulkan kekecewaan PKI yang memicu semboyan aksi sepihak untuk merebut tanah. Aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI merupakan jawaban atas tidak berjalannya *landreform* yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan aksi sepihak, PKI juga menjadikan aksi itu sebagai sarana penggemblengan kaum komunis untuk dipersiapkan melakukan revolusi sosial atau revolusi agraria.

Strategi PKI terhadap petani tidak membawa perubahan signifikan bagi para petani itu sendiri. Berbagai program tuntutan PKI pun terkesan hanya sebagai jargon politik belaka yang tidak terealisasi dengan baik karena berbagai tuntutan pragmatis PKI yang juga ingin menggalang berbagai elemen kekuatan lain yang pada akhirnya menghadapkan PKI pada konflik kepentingan. Petani pun pada akhirnya hanya menjadi alat politik PKI untuk memobilisasi massa sekaligus menjadi *bargaining* politik PKI terhadap kekuatan politik lain. Upaya PKI untuk meraih kekuasaan juga ternyata berujung pada kegagalan karena strategi aksi sepihak yang dilakukan PKI berbenturan dengan realitas kondisi sosial masyarakat petani pedesaan. Yang terjadi setelah itu justru konflik horizontal antar masyarakat petani yang memakan banyak korban jiwa.

BIBLIOGRAFI

Arsip:

Arsip PB NU di Jakarta

Surat PB NU Tanfidziah, Tgl. 6 Djuni 1954 No.3044/Tnf./VI-'54 kepada Dewan Harian Putjuk Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di Djakarta, perihal: Sekitar sikap tegas terhadap komunisme.

Surat PB NU Tanfidziah, Tgl. 10 Djuni 1954 No.3060/Tnf./VI-'54 kepada Zainul Arifin, KH. Masjkur, Moh. Hanafiah di Tempat, perihal: Peninjauan kembali tanda gambar PKI dalam Pemilihan Umum yang akan datang.

Surat PW NU Tanfidziah, Tgl. 20 September 1957 No.127/Tanf./PW/IX-54 kepada Pengurus Besar Partai Nahdlatul 'Ulama di Djakarta, perihal: Laporan Situasi Pemilihan DPRD di Djawa Timur.

Surat PB NU Tanfidziah, Tgl. 25 Oktober 1957 No.808/Tanf./X/57 kepada Pengurus Tjabang Partai Nahdlatul 'Ulama di Djember, perihal: Ulangan pemilihan umum.

Surat PB NU Tanfidziah, Tgl. 1 Nopember 1957 No.915/Tanf./XI-'57 kepada Pengurus Tjabang Partai Nahdlatul 'Ulama di Surabaja, perihal: Persiapan menghadapi ulangan pemungutan suara.

Surat PB NU Tanfidziah, Tgl. 18 Nopember 1957 No.991/Tanf./XI-'57 kepada Pengurus Tjabang Partai Nahdlatul 'Ulama Seluruh Sumatera Selatan di Tempat, perihal: Kewaspadaan menghadapi detik-detik pemungutan suara dalam pemilihan umum.

Dokumen Pesan Tahun Baru 1959 dari Politbiro CC PKI, Djakarta, 29 Desember 1958, "Memasuki Tahun Baru 1959 dengan Tekad Meningkatkan Lebih Landjut Perjuangan Anti-Kolonialisme".

Dokumen Pokok-pokok Pendapat Golongan Islam terhadap RUU Pokok Agraria, tanpa tanggal.

Dokumen Notulensi Pembicaraan ke-3 Panitia "7", Tgl. 19 Oktober 1960 di Ruangan DPR-GR tentang acara lanjutan sidang mengenai Program Revolusi.

Dokumen Sekretariat PB Front Nasional, tanpa tanggal, "Tjataan tentang Partai-partai untuk Persiapan Pengesahan sebagai Anggota Front Nasional".

Dokumen Keputusan Presiden Republik Indonesia No.202 Tahun 1962 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.658 Tahun 1961 Jang Mengenai Penerimaan Anggota Front Nasional dari Golongan Politik dan Karya.

Surat PB NU Tanfidziah, Tgl. 6 february 1962 No.1487/Tanf/II-62 kepada PJM Presiden Republik Indonesia/ Pemimpin Besar/ Ketua Umum PB Front Nasional di Djakarta, perihal: Keanggotaan Partai NU dalam Front Nasional.

Dokumen Rahasia Panitia Ketjil Golongan Islam Menghadapi Atjara Sidang MPRS tentang Kesimpulan-kesimpulan fikiran tentang dasar Pendidikan Nasional, Djakarta, Tgl. 18 Nopember 1964.

Arsip Kabinet Presiden RI dalam koleksi Arsip Nasional RI

Surat CC PKI, Tgl. 24 Mei 1954 No.439/L/Pa/54 kepada Soekarno di Djakarta, perihal: Pernyataan DN. Aidit Sekretaris Djenderal CC PKI (11-6-1954) tentang Kesediaan PKI untuk Mengadakan Stembusaccord atau Persetdjuan Tidak Saling Menjerang dengan Partai-partai Lain dalam Kampanye Pemilihan Umum" tanggal 18 Mei 1954.

Surat CC PKI, Tgl. 14 Djuni 1954 No.554/OSI/54 kepada Dr. Ir. Sukarno Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, perihal: Keterangan Kawan DN. Aidit Sekretaris Djenderal CC PKI tentang Nama Daftar "PKI dan Orang Tak Berpartai".

Dokumen Keterangan Pers Njono Sekretaris Djenderal SOBSI, Djakarta, 17 Djuni 1954, Adanya "Daftar PKI dan Orang Tak Berpartai" atau daftar lain jang sematjam itu adalah sewadjarnja dan demokratis.

Surat Pernyataan Dewan Harian Putjuk Pimpinan GP Ansor, Djakarta, Tgl. 24 Djuni 1954 kepada PJM Presiden Republik Indonesia, tentang Protes atas tanda gambar palu-arit bagi PKI dan nama daftar "PKI dan Orang Tak Berpartai".

Surat Pernyataan Konferensi-besar Masjumi Tjabang Tuban, Tuban, Tgl. 26 Djuni 1954 kepada JM Presiden Republik Indonesia, tentang Protes atas tanda gambar palu-arit bagi PKI dan nama daftar "PKI dan Orang Tak Berpartai".

Surat Pernyataan Pimpinan GPII Wilayah Djawa Timur, Surabaya, Tgl. 12 Djuli 1954 kepada Presiden RI di Djakarta, tentang Protes atas nama dan tanda gambar PKI dalam Pemilihan Umum.

Surat Pernyataan Rapat Seluruh Anggota Masjumi Tjabang Sidoardjo, Sidoardjo, Tgl. 24 Djuli 1954 kepada Presiden RI, tentang Protes atas tanda gambar palu-arit bagi PKI dan nama daftar "PKI dan Orang Tak Berpartai".

Surat Pernyataan Dewan Harian Gerwani Ranting Kiaratjondong Bandung, Bandung, Tgl. 12 Agustus 1954 kepada PJM Presiden RI di Djakarta, tentang Membenarkan nama daftar kumpulan PKI dan orang-orang tak berpartai dan tanda gambarnya (palu-arit).

Surat Pernyataan Dewan Tjabang SOBSI Kediri, Kediri, Tgl. 20 September 1954 disposisi kepada PJM Presiden RI di Djakarta, tentang Adanja Daftar PKI dan Orang Tak Berpartai atau Daftar Lain Jang Sematjam Itu Adalah Sewadjarja dan Demokratis.

Surat Dewan Pimpinan Tjabang Barisan Tani Indonesia Muara Enim, Tandjung Enim, Tgl. 11 Oktober 1954 No.97/A2/54.- kepada CC PKI di Djakarta, perihal: Tanda Gambar PKI dan orang tak berpartai.

Dokumen "*Decree of The President of The Republic of Indonesia/ Supreme Commander of The Armed Forces on The Return to The Constitution of 1945*", Djakarta: Ministry of Information Republic of Indonesia, 5 July 1959.

Dokumen "Pidato Presiden Sukarno pada Resepsi Penutupan Kongress PKI ke-VI di Gedung Pertemuan Umum, Djakarta, 16 September 1959", Sekretariat Negara, nst.1045/59.-. Belum dikoreksi.

Dokumen "Amanat PJM Presiden Berhubung dengan Pernyataan Negara dalam Keadaan Perang di Djakarta, 16 Desember 1959", Sekretariat Negara, nst.679/65. Tjetakan ke-II.

Dokumen "Amanat Presiden Sukarno pada waktu Pelantikan Pengurus Besar Front Nasional di Istana Negara tanggal 8 September 1960", Departemen Penerangan, Djakarta, 8 September 1960, A.I.249.-.

Dokumen "Pidato PJM Presiden Sukarno pada Penutupan Kongres Nasional ke-VII PKI di Djakarta pada tanggal 30 April 1962", Sekretariat Negara, nst.417/62. Belum dikoreksi.

Dokumen "Amanat PJM Presiden Sukarno pada Kongres Petani di Semarang pada tanggal 20 Desember 1962", Sekretariat Negara, nst,82/63.-. Belum dikoreksi.

Arsip Ruslan Abdul Gani dalam koleksi Arsip Nasional RI

Memo Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, "Pernyataan Sdr. DN. Aidit dalam tulisannya menjambut ulang tahun kemerdekaan tgl.17 Agustus 1962, disiarkan oleh PIA tgl. 21 Agustus 1962.

Arsip Pidato Presiden (1958 – 1967) dalam koleksi Arsip Nasional RI

Pidato tentang "Penemuan Kembali Revolusi Kita", Djakarta, 17 Agustus 1959.

Arsip Dinas Dokumentasi Pusat Sejarah TNI

Surat CC PKI, No.73/Ist/65 kepada Semua CDB/ CP, perihal: Siswa Sekolah Tani Menengah "EGOM". Tanpa tanggal.

Surat CC PKI, Tgl. 1 Djuli 1965 No.66/Inst/65 kepada Semua CDB/ CP, perihal: Konfernas Tani ke-III Partai.

Surat Kabar dan Majalah:

Berita Antara, Jakarta, 1964 – 1965.

Bintang Merah, Jakarta, 1952 – 1959.

Harian Rakjat, Jakarta, 1953 – 1965.

Trompet Masyarakat, Surabaya, 1960 – 1965.

Suara Tani, Jakarta, 1957 – 1960.

Buku dan Artikel:

Aidit, DN. *Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa (Laporan singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Djawa Barat)*, Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1964.

_____. "Hari Depan Gerakan Tani Indonesia" dalam *Pilihan Tulisan*, Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1959.

_____. "Hidup Revolusi Agustus!" dalam *Pilihan Tulisan*, Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1959.

_____. "Kongres Nasional ke-V Partai Komunis Indonesia" dalam *Pilihan Tulisan*, Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1959.

_____. *Lahirnya PKI dan Perkembangannya (1920—1955)*, Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1955.

_____. "Perkuat Front Nasional dan Perkuat Partai!" dalam *Pilihan Tulisan*, Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1959.

Alisyahbana, S. Takdir. *Revolusi Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966.

Bachriadi, Dianto, *et.al.* (Peny.). *Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia*, Jakarta: KPA & Lembaga Penerbit FE-UI, 1997.

Booth, Anne, *et. al* (ed). *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.

Burger, DH. *Structural Change In Javanese Society: The Supra Village Sphere*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1956.

Brackman, Arnold C. *Indonesian Communism*. New York: Frederick A. Praeger, 1963.

Corsino, MacArthur F. *A Communist Revolutionary Movement as an International State-Actor: The Case of The PKI-Aidit*, Singapura: Maruzen Asia, 1982.

Cribb, Robert. *The Indonesian killings of 1965—1966: Studies from Java and Bali*, Victoria: Monash University, 1990.

Crouch, Harold, *Militer & Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999.

- CC PKI, *Tentang Program PKI*, Djakarta: Depagitprop, 1959
- _____, *Tesis 45 Tahun PKI (23 Mei 1920 – 23 Mei 1965)*, Djakarta: Politbiro CC PKI, 1965
- Departemen Penerangan RI., *Pantja Warsa Manipol (Pidato Presiden RI dan Tap MPRS)*, Djakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi, 1964.
- Fauzi, Noer. *Memahami Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Yogyakarta: INSISTPress, 2005.
- _____. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress, 1999.
- Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955*, Jakarta: KPG, 1999.
- _____. *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- _____. *The Decline of Constitutional Democracy on Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, dan Priyayi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- _____. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983.
- _____. "The Integrative Revolution" dalam Clifford Geertz (ed.), *Old Societies and New States*, Glencoe, 1963.
- Hardjosudarmo, Soedigdo. *Masalah Tanah di Indonesia: suatu studi sekitar pelaksanaan landreform di Djawa dan Madura*, Djakarta: Bhratara, 1970.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003.
- Hefner, Robert W. "Islamizing Java? Religion and Politics in Rural east Java", *The Journal of Asian Studies*, Vol. 36, No. 3, (Aug., 1987).
- Hindley, Donald. *The Communist Party of Indonesia (1951-1963)*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966.

_____. "Political Power and the October 1965 Coup in Indonesia", *The Journal of Asian Studies*, (Vol. XXVI, No. 2, February 1967).

Ingleson, John. *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Serikat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2004.

Kahin, George Mc Turnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952.

Kano, Hiroyosi, dkk. *Di bawah asap pabrik gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20*, Yogyakarta: Akatiga & Gadjah Mada University Press, 1996.

Karim, Rusli, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Kementerian Penerangan RI., *Kepartaian di Indonesia*, Jogjakarta, 1950.

Kartodirdjo, Sartono. *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1984.

_____. *Ratu Adil*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Kasdi, Aminuddin. *Kaum Merah Menjarah: Aksi Sepihak PKI/ BTI di Jawa Timur (1960—1965)*, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 1990.

Kroef, JM van der. "Indonesian Reform and The Indonesia Communist Party", *Far Eastern Survey*, Vol. 29, No.1 (Jan, 1960).

_____. "Penguasaan Tanah dan Struktur Sosial dan Pedesaan" dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Gramedia, 1984.

_____. "Indonesia's First National Election: A Sosialigical Analysis", *American Journal of Economics and Sosiology*, Vol. 16 No. 3, (April., 1957).

_____. "Agrarian Reform and the Indonesian Communist Party", *Far Eastern Survey*, Vol. 29 No. 1, (Jan., 1960).

Kuntowijoyo. *Radikalisasi Agraria*. Yogyakarta: PT Bentang Intervisi Utama, 1993.

- Lewis, John Wilson. *Peasant Rebellion and Communist*, Stanford. 1974
- Lyon, Margo L. “Dasar-dasar konflik di Pedesaan Jawa”, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959—1965)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mc Vey, Ruth T. “Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution”, *Indonesia*, Vol. 50, 25th Anniversary Edition, Oktober 1990.
- _____. *The Rise of Indonesian Communist*. New York: Cornell University Press, 1965.
- Moertono, Soemarsaid. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Mortimer, Rex, “Class, Sosial Cleavage, and Indonesian Communism”, dalam *Indonesia*, Vol. 8, (Oct., 1969).
- _____. *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics (1959-1965)*, Ithaca: Cornell University Press, 1974.
- Mubyarto. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Paige, Jeffery M. *Agrarian Revolution: Sosial Movements and Export Agriculture in The Underdeveloped World*. New York: Free Press, 1975.
- Pelzer, Karl. *Sengketa Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- _____. *Toean Kebun dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto., *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

- Popkin, Samuel. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*, Berkeley: University of California Press, 1979.
- Reid, Anthony. *Revolusi Nasional Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1996.
- Sanit, Arbi. *Badai Revolusi: Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Scoot, James C. *Moral Ekonomi Petani*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Soemardjan, Selo. *Sosial Change in Yogyakarta*, Ithaca, 1962.
- Soewargana, Oejeng dan Noegroho Notokusanto, *Rencana Pelajaran Terurai Tentang Komunisme*, 1967.
- Sulistyo, Hermawan. *Palu Arit di Ladang Tebu*, Jakarta: KPG, 2000.
- Tim Pengajar Land Reform dan Tata Guna Tanah., *Buku Ajar Land Reform dan Tata Guna Tanah*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Tjondronegoro, Sediono M.P dan Gunawan Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Warriner, Dorren. *Land Reform in Principle and Practice*, London: Colorado Press, 1969.
- Wibowo, Priyanto. *Mao dan Perubahan Sosial di Pedesaan Cina 1949 – 1959: Kebijakan-kebijakan untuk Menuju Masyarakat Baru*, Depok: Disertasi FIB-UI, 2006.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ahmad Fathul Bari, lahir di Jakarta, 11 Januari 1985. Ia adalah anak kedua dari pasangan suami istri (Alm.) H. Achmad Munadi dan Hj. Tuti Suryati. Ia memperoleh pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 28 Jakarta seta pendidikan menengah di SMP Negeri 178 Jakarta dan SMU Negeri 86 Jakarta. Setelah tamat SMU pada tahun 2002, ia melanjutkan studinya di Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengerahuan Budaya, Universitas Indonesia hingga memperoleh gelar Sarjana Humaniora dengan skripsi yang berjudul “Strategi Partai Komunis Indonesia terhadap Petani dan Pengaruhnya di Jawa Timur 1953 – 1965”.



Semasa kuliah, ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Setelah ditunjuk menjadi Kepala Departemen Seni dan Olahraga Forum Amal dan Studi Islam (FORMASI) FIB-UI periode 2003/2004, ia akhirnya terpilih dan diamanahkan menjadi Ketua Umum FORMASI FIB-UI periode 2004/2005. Amanahnya sebagai Ketua Umum FORMASI FIB-UI 2004/2005 tidak ia selesaikan hingga akhir kepengurusan karena ia mendapat dukungan untuk “bertarung” dalam Pemilihan Raya FIB-UI 2005 menjadi Calon Ketua Senat Mahasiswa FIB-UI periode 2005/2006. Melalui proses panjang Pemira FIB-UI 2005, akhirnya ia terpilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FIB-UI (SM FIB-UI) periode 2005/2006. Kiprah organisasinya ternyata tidak berhenti di tingkatan Fakultas. Pada tahun 2006/2007 ia dipercayai untuk memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) setelah melewati proses Pemilihan Raya UI 2006 yang diselenggarakan di seluruh Fakultas se-UI.

Ketika mahasiswa, ia juga aktif menjadi pembicara di berbagai Seminar, Lokakarya, dan Pelatihan di tingkat Universitas maupun di tingkat Nasional. Dengan berbagai aktivitasnya, ia juga pernah mendapat beberapa penghargaan antara lain Mahasiswa Berprestasi Bidang Organisasi FIB-UI selama dua tahun berturut-turut yakni di tahun 2006 dan 2007. Selain itu, ia juga pernah mendapat beasiswa antara lain *Diversity Scholarship* dari *Hongkong Shanghai Bank Corporation* (HSBC) dan *The Posco Asia Fellowships* dari Posco TJ Park Foundation, Korea Selatan.